



KELOMPOK **TANI** **GREEN**
Berebut **ECONOMY**

Dr. M. Anjim Adlan, M.El & Labib Muzakki Shobir, M.Pd.I



Dr. M. Aqim Adlan, M.EI
Labib Muzakki Shobir, M.Pd.I

KELOMPOK TANI **BEREBUT *GREEN ECONOMY***



Kelompok Tani Berebut Green Economy

Copyright © M. Aqim Adlan & Labib Muzakki Shobir, 2024.
Hak cipta dilindungi undang-undang
All right reserved

Layout: Kowim Sabilillah
Desain cover: Diky M. Fauzi
viii + 121 hlm: 14 x 21 cm
Cetakan Pertama, November, 2024
ISBN: 978-623-157-131-1

Anggota IKAPI

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

Diterbitkan oleh:
Akademia Pustaka
Jl. Raya Sumbergempol, Sumberdadi, Tulungagung
Telp: 081807413208
Email: redaksi.akademia.pustaka@gmail.com
Website: www.akademiapustaka.com

Kata Pengantar

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat, rahmat, hidayah dan inayahnya kita sehingga buku ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi besar Muhammad SAW dan seluruh umatnya.

Buku yang berjudul *Kelompok Tani Berebut Green Economy* ini disusun sebagai upaya untuk memberikan tambahan wawasan kepada para praktisi, pemerhati dan pengkaji ekonomi dalam memahami praktek pembangunan ekonomi khususnya di desa setelah pemerintah melalui Bappenas meluncurkan apa yang disebut dengan Green Economic Index (GEI) pada tanggal 9 Agustus 2022. Program tersebut bertujuan untuk mengukur efektivitas transformasi ekonomi ke arah pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan dan diintegrasikan ke dalam dokumen pembangunan nasional sehingga diharapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6,1-6,5% per tahun hingga 2050, intensitas emisi berkurang hingga 68% pada tahun 2045, dan menciptakan 1,8 juta lapangan kerja hijau pada tahun 2030.

Ekonomi hijau merupakan salah satu dari enam strategi transformasi ekonomi Indonesia yang ditetapkan oleh Bappenas untuk mencapai visi Indonesia 2045. Strategi ini dianggap sebagai pengubah permainan bagi Indonesia dalam pemulihan ekonomi pasca-pandemi Covid-19 dan menuju pembangunan

berkelanjutan. Dengan tema “*Recover together, recover stronger*”, Indonesia berharap menjadi pemrakarsa utama dan contoh bagi negara lain dalam mengimplementasikan kebijakan ekonomi hijau.

Diakui bahwa buku ini masih banyak mengandung kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan. Oleh karena itu, kepada para pembaca dimohon saran dan kritik konstruktif demi kesempurnaan buku ini.

Dan akhirnya, semoga buku ini benar-benar memberi manfaat dan barakah yang sebesar-besarnya kepada penulis, keluarga dan para pembaca serta memperoleh ridla dari Allah swt. *Amin ya rabb al-'alamin...*

Tulungagung, 14 Nopember 2024

Penulis

Daftar Isi

Kata Pengantar iii

Daftar Isi v

BAGIAN I

Mengenal Poros Agraria dan Potensi Ekonomi

• *Indonesia dan Potensi Ekonomi Berbasis Agraria* 1

• *Selang Pemahaman Potensi Agraria
dan Penguatan Kelompok Tani*..... 9

BAGIAN II

Kreativitas Perekonomian pada

Kelompok Tani Perspektif Ekonomi Islam

• *Tinjauan tentang Kreativitas Ekonomi* 11

• *Tinjauan tentang Kebijakan Indonesia
dalam Sektor Pertanian* 17

• *Tinjauan tentang Green Economy*..... 23

• *Tinjauan tentang Ekonomi Islam*..... 27

BAGIAN III

Strategi Peningkatan Kreativitas Kelompok Tani

• *Strategi Peningkatan Kreativitas Kelompok Tani di
Kabupaten Tulungagung dalam Menghadapi Kebijakan
Green Economy* 57

- *Strategi Peningkatan Kreativitas Kelompok Tani di Kabupaten Trenggalek dalam Menghadapi Kebijakan Green Economy..... 65*
- *Strategi Peningkatan Kreativitas Kelompok Tani di Kabupaten Blitar dalam Menghadapi Kebijakan Green Economy..... 73*
- *Implementasi Konsep Ekonomi Islam dalam Penguatan Kreativitas Kelompok Tani di Kabupaten Tulungagung untuk Menghadapi Kebijakan Green Economy..... 78*
- *Implementasi Konsep Ekonomi Islam dalam Penguatan Kreativitas Kelompok Tani di Kabupaten Trenggalek untuk Menghadapi Kebijakan Green Economy..... 81*
- *Implementasi Konsep Ekonomi Islam dalam Penguatan Kreativitas Kelompok Tani di Kabupaten Blitar untuk Menghadapi Kebijakan Green Economy..... 82*

BAGIAN IV

Kajian Ekonomi Islam Terhadap Kreativitas Kelompok Tani

- *Strategi Peningkatan Kreativitas Kelompok Tani di Kabupaten Tulungagung, Trenggalek, dan Blitar dalam Menghadapi Kebijakan Green Economy..... 87*
- *Implementasi Konsep Ekonomi Islam dalam Penguatan Kreativitas Kelompok Tani di Kabupaten Tulungagung, Trenggalek, dan Blitar untuk Menghadapi Kebijakan Green Economy..... 94*

BAGIAN V

Penutup

- *Kesimpulan 101*

| | |
|------------------------------|------------|
| Daftar Pustaka..... | 104 |
| Biodata Penulis | 117 |

BAGIAN I

Mengenal Poros Agraria dan Potensi Ekonomi

Indonesia dan Potensi Ekonomi Berbasis Agraria

Sebagai negara agraris, sektor pertanian memiliki peranan dalam pergerakan perekonomian di Indonesia.¹ Dalam konteks pengembangan ekonomi melalui sektor pertanian, perlu kiranya membangun pola pertanian yang berkelanjutan. Artinya, sebagai karakter dari negara agraris, sektor pertanian memiliki posisi yang sangat penting dalam mendongkrak ekonomi negara.² Hal ini bisa dilihat dari persentase kontribusi sektor pertanian yang mencapai 20% terhadap produk domestik bruto dan mampu menyerap tenaga kerja di tingkat pedesaan hingga 50%.³ Selain itu, sektor pertanian memiliki potensi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa serta mengurangi tingkat kemiskinan. Upaya peningkatan kesejahteraan dan pengurangan kemiskinan melalui

¹ Lihat dalam Mercy Bientri Yunindanova, "Preparing for Indonesian Agricultural Transformation in The Society Era 5.0," *Agrasains: Jurnal Penelitian Agronomi* 24, no. 1 (2022).

² Ibtihal Hidayah, Yulhendri, & Nora Susanti, "Peran Sektor Pertanian Dalam Perekonomian Negara Maju Dan Negara Berkembang: Sebuah Kajian Literatur," *Jurnal Salingka Nagari* 1, no. 1 (2022).

³ Niko Ramadhani, "Indonesia Sebagai Negara Agraris, Apa Itu Agraris?," *Www.Akseleran.Co.Id*, 08 Juni, 2023, [https://www.akseleran.co.id/blog/agraris-adalah/#:~:text=Sebagai salah satu negara agraris%2C peran sektor pertanian,dari masyarakat pedesaan hingga lebih dari 50 persen.](https://www.akseleran.co.id/blog/agraris-adalah/#:~:text=Sebagai%20peran%20sektor%20pertanian,dari%20masyarakat%20pedesaan%20hingga%20lebih%20dari%2050%20persen.)

sektor pertanian bisa di lihat melalui berbagai program seperti bantuan social, pengembangan koperasi pertanian, dan program UMKM di sektor pertanian.⁴

Berkenaan dengan hubungan pertanian dan perekonomian, rencana strategis Kementerian Pertanian menyebutkan bahwa sektor pertanian menjadi salah satu sektor yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Peran ini digambarkan melalui kontribusi sektor pertanian dalam penyediaan lahan pangan dan bahan baku industri, penyumbang PDB, penghasil devisa negara, penyerap tenaga kerja, sumber pendapatan keluarga pedesaan, penyedia bahan pokok, dan berperan dalam penurunan emisi gas rumah kaca. Kementerian Pertanian juga menyebutkan bahwa pertanian diharapkan mampu mewujudkan kedaulatan pangan dalam tatanan nasional. Langkah ini untuk mensupport kebutuhan pokok masyarakat Indonesia secara berdaulat.⁵

Pada praktiknya, meskipun sektor pertanian memegang peran penting dalam pengembangan perekonomian, namun sektor ini mendapatkan berbagai tantangan dan problematika yang berkaitan dengan kebijakan dan kesadaran masyarakat. Masalah-masalah pertanian selalu muncul seiring dengan perkembangan

⁴ Press Release, “The World Bank Supports Indonesia’s Agriculture Sector to Become More Resilient and Inclusive,” *Www.Worldbank.Org*, 09 September, 2022, <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2022/09/09/the-world-bank-supports-indonesia-agriculture-sector-to-become-more-resilient-and-inclusive>.

⁵ Lihat dalam Policy Brief, *Permasalahan, Tantangan Dan Kebijakan Pembangunan Pertanian 2020-2024* (Jakarta: Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, 2019).

waktu yang ditandai oleh sulitnya akses permodalan pertanian, kemacetan pupuk,⁶ serta kesadaran masyarakat terhadap sektor pertanian.⁷ Problematika ini kemudian menimbulkan permasalahan tersendiri yang menghambat akselerasi dan eksistensi sektor pertanian dalam tatanan perekonomian masyarakat.⁸

Pada aspek kebijakan, permasalahan mendasar yang dihadapi oleh sektor pertanian diantaranya adalah kerusakan lingkungan dan perubahan iklim,⁹ kurangnya infrastruktur, sarana, prasarana dan lahan pertanian, sempitnya kepemilikan lahan, kurangnya perhatian terhadap pembibitan nasional, kurangnya akses permodalan dan penyuluhan, serta kurangnya strategi koordinasi antar sektor dalam pengembangan pertanian.¹⁰ Pada aspek

⁶ Ujang Maman, “Efektifitas Pupuk Bersubsidi Terhadap Peningkatan Produktivitas Padi Sawah,” *Jurnal Agribisnis Terpadu* 14, no. 2 (2021): 176.

⁷ Ismi Imania Imania Ikhsani, Feninda Eka Tasya, Iradhad Taqwa Sihidi, Ali Roziqin, & Ach Apriyanto Romadhan, “Arah Kebijakan Sektor Pertanian Di Indonesia Untuk Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0,” *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik* 5, no. 2 (2020): 134–154.

⁸ Nova Ladiansi, “Problematika Pembangunan Ekonomi Indonesia Pada Sektor Pertanian,” *Www.Kompasiana.Com*, 24 November, 2021, <https://www.kompasiana.com/nova74069/619de31906310e02a31ce502/problematika-pembangunan-ekonomi-indonesia-pada-sektor-pertanian>.

⁹ Tim Editor, “Dampak Perubahan Iklim Pada Pertanian: Tantangan Dan Solusi,” *Www.Kompasiana.Com*, 14 September, 2023, <https://www.kompasiana.com/cids0504/6500822ce1a1672ac6085b62/dampak-perubahan-iklim-pada-pertanian-tantangan-dan-solusi>.

¹⁰ Andi Tri Wahyudi, “Upaya Terhadap Permasalahan Lahan, Birokrasi, Dan Infrastruktur Yang Menghambat Masuknya Investasi,” *Www.Kompasiana.Com*, 24 Juni, 2021,

kesadaran masyarakat, generasi milenial saat ini tidak memiliki ketertarikan pada sektor pertanian.¹¹

Padahal, dalam konteks kontemporer perubahan iklim menuntut adanya kebijakan yang mengarah pada penghijauan alam. Perubahan iklim sendiri menjadi salah satu tantangan global yang mendesak untuk dipecahkan. Hal ini dikarenakan dampak dari perubahan iklim menyebabkan kerugian ekonomi, seperti kerusakan infrastruktur hilangnya mata pencaharian. Oleh karenanya, kebijakan lingkungan yang efektif dan berkelanjutan menjadi aspek yang sangat penting dalam merespon problematika perubahan iklim di Indonesia. Implementasi kebijakan berbasis lingkungan secara holistik bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, mempromosikan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, dan meningkatkan adaptasi terhadap perubahan iklim.¹²

Dalam rangka menghadapi problematika lingkungan sebagaimana di atas, Indonesia melalui Bappenas menerbitkan indeks ekonomi hijau. Indeks ekonomi hijau melakukan penghitungan terhadap skor Indonesia dalam transformasi ekonomi untuk melihat perbandingan kemajuan dan indikator

<https://www.kompasiana.com/anditriwahyudi4386/60d41f3406310e796c368402/upaya-terhadap-permasalahan-lahan-birokrasi-dan-infrastruktur-yang-menghambat-masuknya-investasi-pada-sektor-pertanian-indonesia>.

¹¹ Marya Yenita Sitohang, Rahmat Saleh, & Irin Oktafiani, "Sulitnya Regenerasi Petani Pada Kelompok Generasi Muda," *Jurnal Studi Pemuda* 10, no. 1 (2021).

¹² Asti Amelia Novita, "Environmental Governance and Climate Change Adaptation in Indonesia," *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik* 7, no. 1 (2021).

terhadap nilai minimal dan target maksimal yang ingin diwujudkan Indonesia. Dalam laporan indeks ekonomi hijau, upaya transisi menuju ekonomi hijau untuk meningkatkan pertumbuhan PDB rata-rata diangkat 6,1-6,5 persen per tahun hingga 2050. Pada aspek emisi gas rumah kaca, 87-96 Miliar ton diselamatkan pada rentang tahun 2021 hingga 2060. Selanjutnya, Pendapatan Nasional Bruto (PNB) lebih tinggi di rentang 25-34 persen, atau setara 13. 890-14.975 perkapita pada tahun 2045.¹³ Lebih jauh lihat dalam ilustrasi gambar berikut:

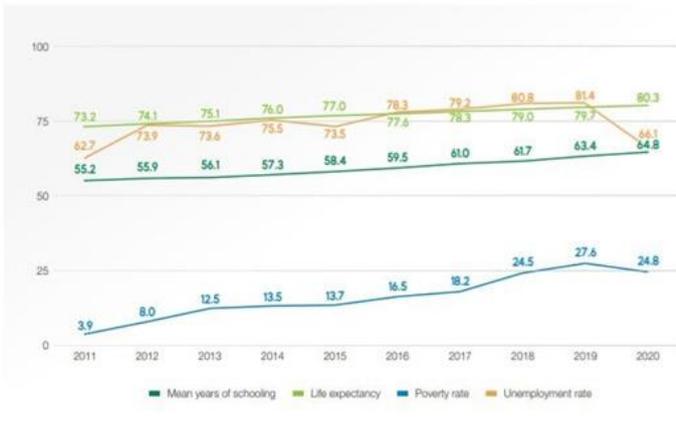


Sumber:
*Tempo.Co*¹⁴

¹³ Komunikasi LCDI, “Bappenas Luncurkan Indeks Ekonomi Hijau Untuk Mendukung Transformasi Ekonomi Indonesia,” *Lcdi-Indonesia.Id*, 25 Agustus, 2022, [https://lcdi-indonesia.id/2022/08/25/bappenas-luncurkan-indeks-ekonomi-hijau-untuk-mendukung-transformasi-ekonomi-indonesia/#:~:text=Laporan Indeks Ekonomi Hijau menyebutkan%2C upaya transisi menuju,persen%2C setara USD 13.890-14.975 per kapita pada 2045.](https://lcdi-indonesia.id/2022/08/25/bappenas-luncurkan-indeks-ekonomi-hijau-untuk-mendukung-transformasi-ekonomi-indonesia/#:~:text=Laporan%20Indeks%20Ekonomi%20Hijau%20menyebutkan%20upaya%20transisi%20menuju,persen%20setara%20USD%2013.890-14.975%20per%20kapita%20pada%202045.)

¹⁴ Tim Editor, “Green Economy Index Becomes Measuring Instrument for Green Economic Performance in Indonesia,” *Tempo.Co*, 15 Desember, 2022, <https://en.tempco.co/read/1668778/green-economy-index-becomes-measuring-instrument-for-green-economic-performance-in-indonesia.>

Selanjutnya, untuk melihat urgensi *green economy* di Indonesia, berikut data indeks dan indikator *green economy*:¹⁵



¹⁵ Kementerian PPN/Bappenas, *Green Economy Index: A Step Forward to Measure the Progress of LBoW Carbon and Green Economy in Indonesia* (Jakarta: Bappenas, 2020).

Berkaitan dengan lokasi penelitian, luas lahan pertanian dan jumlah unit usaha pertanian Kabupaten Tulungagung, Trenggalek, dan Blitar ditemukan data sebagai berikut:

| | | |
|---------------------------|------------|--------------|
| Tulungagung ¹⁶ | 27.516 Ha | 172.720 unit |
| Trenggalek ¹⁷ | 26.759 Ha | 179.259 unit |
| Blitar ¹⁸ | 31. 705 Ha | 193.327 Unit |

Sementara berkaitan potensi pertanian padi melalui lahan pertanian di Kabupaten Tulungagung, Trenggalek, dan Blitar dapat ditemukan data sebagai berikut:

| | |
|---------------------------|-------------|
| Tulungagung ¹⁹ | 302 266 Ton |
| Trenggalek ²⁰ | 160.466 Ton |
| Blitar ²¹ | 233.522 Ton |

¹⁶ Badan Statistik, “Badan Statistik Kabupaten Tulungagung,” 2022, <https://tulungagungkab.bps.go.id/statictable/2023/11/22/5673/jenis-tanah-menurut-penggunaannya-di-kabupaten-tulungagung-2022.html>.

¹⁷ Admi, “Data Produksi Pertanian Pagi Kabupaten Trenggalek,” *Dinas Pertanian*, 2022, <https://satudata.trenggalekkab.go.id/dataset/127/2022/data-produksi-pertanian-padi>.

¹⁸ Badan Statistik, “Badan Statistik Kabupaten Blitar,” 2022, <https://blitarkab.bps.go.id/publication/2022/02/25/9bb576865560d13c1e1125bb/kabupaten-blitar-dalam-angka-2022.html>.

¹⁹ Badan Statistik, “Badan Statistik Kabupaten Tulungagung,” n.d., <https://tulungagungkab.bps.go.id/statictable/2021/12/16/5307/produksi-padi-menurut-kecamatan-dan-jenis-padi-di-kabupaten-tulungagung-2020.html>.

²⁰ BPS Kabupaten Trenggalek, “Data Produksi Pertanian Padi,” n.d., <https://satudata.trenggalekkab.go.id/dataset/127/2022/data-produksi-pertanian-padi>.

Berdasarkan data di atas, hubungan antara kreativitas pengembangan ekonomi pertanian dan penciptaan lingkungan hijau merupakan strategi kebijakan yang dipandang sangat urgent untuk dilakukan. Hal ini sebagai bentuk respon atas dinamika kebutuhan bahan pokok dan penjagaan lingkungan hidup. Terlebih pada daerah-daerah yang dipandang memiliki potensi wilayah pertanian yang sangat luas. Berkaitan dengan potensi pertanian, Kabupaten Tulungagung, Trenggalek, Blitar memiliki lahan pertanian yang sangat luas. Di Kabupaten Tulungagung, potensi pertanian dibuktikan dengan kegiatan pameran produk pertanian unggulan tahun 2023 yang diinisiasi oleh Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung. Dalam pameran ini produk-produk unggulan para petani di Kabupaten Tulungagung dipamerkan dalam rangka mendorong terciptanya ketahanan pangan. Melalui pameran produk pertanian ini juga memiliki banyak manfaat bagi para petani Tulungagung untuk menyerap hasil pertanian yang berimplikasi pada output peningkatan ekonomi.²¹ Untuk Kabupaten Trenggalek, potensi komoditas pertanian memiliki implikasi terhadap terciptanya aktivitas perekonomian masyarakat. Dari lahan pertanian di Kabupaten Trenggalek, telah dapat dihasilkan berbagai produk pertanian

²¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar, “Luas Panen Dan Produksi Padi Kabupaten Blitar 2023 Angka Sementara,” n.d., <https://blitarkab.bps.go.id/pressrelease/2024/01/10/128/luas-panen-dan-produksi-padi-kabupaten-blitar-2023---angka-sementara--.html>.

²² Mukhamad Zainul Fikri, “Potensi Pertanian Tulungagung Harus Dikenalkan, Pj Bupati Singgung Harga Beras,” *Radartulungagung.Jawapos.Com*, 03 November, 2023, <https://radartulungagung.jawapos.com/tulungagung/763213058/potensi-pertanian-tulungagung-harus-dikenalkan-pj-bupati-singgung-harga-beras>.

yang mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat Trenggalek.²³ Hal yang sama juga ada di Kabupaten Blitar, Kabupaten Blitar merupakan wilayah yang sebagian besar penduduknya bergerak dalam sektor pertanian.²⁴

Melalui problematika dan deskripsi di atas, tampak bahwa kebijakan *green economy* memiliki hubungan dengan upaya kreativitas dalam dunia pertanian. Oleh karena itu, perlu adanya sinergi dan pemahaman akan pentingnya sektor pertanian dalam revitalisasi pengembangan ekonomi. Upaya ini, sejalan dengan prinsip ekonomi Islam yang memiliki nilai-nilai tentang pemerataan dan kebermanfaatan dalam dunia ekonomi. Oleh karenanya, upaya kreativitas dalam dunia pertanian perlu disandarkan pada aspek kebermanfaatan kebijakan *green economy* untuk merevitalisasi kembali nilai-nilai ekonomi Islam dalam praktek perekonomian di Indonesia.

Selam Pemahaman Potensi Agraria dan Penguatan Kelompok Tani

Dalam konteks pembahasan yang mendalam atas potensi agraria dan upaya peningkatan kelompok tani, buku ini merupakan adaptasi dari kajian lapangan penulis, dengan mengeja

²³ Trigus D. Susilo, "Potensi Komoditas Pertanian Di Trenggalek Yang Bagus Untuk Investasi," *Kabartrenggalek.Com*, 16 Januari, 2023, <https://kabartrenggalek.com/2023/01/potensi-komoditas-pertanian-di-trenggalek-yang-bagus-untuk-investasi.html>.

²⁴ Admin, "Begini Gambaran Dan Potensi Pertanian Di Kabupaten Blitar," *Serayunusantara.Com*, 23 Mei, 2023, <https://serayunusantara.com/begini-gambaran-dan-potensi-pertanian-di-kabupaten-blitar/>.

permasalahan dari akar rumput dan fenomena aktual di tengah masyarakat.

Berbekal asumsi atas gemilangnya potensi ekonomi dan alternatif green economy sebagai olah gerakan baru, wilayah Tulungagung, Blitar dan Trenggalek yang notabene memiliki daerah produktif yang cukup luas. Hal ini mengarahkan asumsi tentang bagaimana potensi tersebut dapat digelorkan dan menjadi semangat baru dalam penguatan kelompok tani

Kelompok tani tak hanya merupakan subjek agraris semata, dalam koridor keorganisasian yang matang, KopTan dalam singkatnya mampu mengawal nilai-nilai kultural masyarakat di wilayah tersebut, tak hanya itu, sisi dan visi ekonomi berbasis keagamaan mampu diolah gabungan untuk upaya upgrading pemahaman atas green economy ini.

Buku ini berbekal hasil observasi langsung dengan model wawancara menaruh pusat pembahasannya pada aspek-aspek argumentasi dan tindakan yang telah dilakukan anggota KopTan dalam gerakan proposional untuk mampu mengimplementasikan potensi ekonomi berbasis agraria, serta green economy yang sekarang menjadi agenda besar penguatan pangan di Indonesia.

BAGIAN II

Kreativitas Perekonomian pada Kelompok Tani Perspektif Ekonomi Islam

Tinjauan tentang Kreativitas Ekonomi

Keberadaan kemunculan ekonomi kreatif di mulai sejak pemerintahan Tony Blair di Inggris memperkenalkan gagasan “industri kreatif” (industri yang berasal dari kreativitas, keterampilan, dan bakat individu serta memiliki potensi untuk menciptakan kekayaan dan lapangan kerja melalui penciptaan dan eksploitasi kekayaan secara intelektual), gagasan ini dengan cepat menjadi karakteristik ortodoks dalam konteks kebijakan ekonomi. Berfokus pada ekonomi dan industry kreatif dalam berbagai sektor, hal ini telah memberikan pemahaman yang spesifik mengenai kreativitas dan menentukan imajinasi para pembuat kebijakan mengenai ekonomi di tengah masyarakat. Menarik untuk dicatat bahwa wacana industri kreatif membuka ruang diskursif di mana para pelaku ekonomi yang telah didelegitimasi dan dipinggirkan oleh kebijakan publik neoliberal dapat dilegitimasi kembali. Dalam ekonomi ekonomi dapat menjadi advokasi yang kuat terhadap hubungan nilai pelaku ekonomi, dan lebih jauh lagi sebagai seruan untuk meningkatkan porsi pelaku ekonomi dalam pendapatan nasional. Hal ini karena wacana tersebut memiliki kesempatan untuk secara persuasif menyoroti bahwa kreativitas sebagai konsekuensi dari kerja manusia yang tidak hanya menentukan nilai-nilai estetika dan simbolis, tetapi

juga nilai-nilai ekonomi. Meskipun demikian, wacana tersebut disibukkan dengan potensi output ekonomi sektor budaya yang tidak terbatas dan gagal memicu minat pembuat kebijakan terhadap tenaga kerja kreatif berupa input dari industri.²⁵

Pada aspek aplikatif, ekonomi kreatif menitikberatkan pada kepekaan pelaku ekonomi terhadap situasi dan kondisi lapangan kerja. Hasil kepekaan dan pengamatan tersebut kemudian diaplikasikan dalam konteks penentuan arah ekonomi berbasis penemuan strategik yang bisa diterima oleh kebutuhan masyarakat. Kreativitas dalam menentukan langkah ekonomi menjadi sangat penting untuk menunjukkan eksistensi pelaku ekonomi dalam konteks pendapatan dan peningkatan kesejahteraan. Oleh karenanya, kreativitas ekonomi menentukan arah ke depan dengan pendekatan multidimensi berbasis perkembangan dan situasi budaya maupun teknologi.²⁶

Diskusi global mengenai ekonomi kreatif menemukan momentumnya pada tahun 1990-an, ketika tekanan globalisasi mendorong pendekatan yang bersifat defensif. Dalam lanskap global yang ditandai dengan pergeseran ekonomi pasar, meningkatnya komodifikasi budaya menimbulkan kekhawatiran tersendiri. Perjanjian multilateral yang dipahami sebagai bagian dari Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan (GATT) dan kemudian Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), kerangka kerja ini bertujuan untuk mengatur perdagangan global. Langkah

²⁵ Hye-Kyung Lee, "Rethinking Creativity: Creative Industries, AI and Everyday Creativity," *Media, Culture & Society* 44, no. 3 (2022).

²⁶ Herry A Pradana, "Peranan Sektor Ekonomi Kreatif Pada Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketenagakerjaan Di Kalimantan Selatan," *Jurnal Kebijakan Pembangunan* 13, no. 1 (2018).

ini berpotensi merugikan kekhususan sektor budaya dan kreatif yang melibatkan aspek moneter dan non-moneter. Pendekatan yang sebagian besar bersifat proteksionis terhadap budaya dan keanekaragaman budaya ini merupakan ciri umum dalam perdebatan kebijakan. Hal ini dipandang sebagai respon paling mendesak dan layak terhadap ancaman ekonomi global saat itu. Implikasinya, negara-negara berusaha untuk memerangi homogenisasi budaya dengan melindungi budaya, nilai-nilai dan keanekaragamannya. Hal ini kemudian diperluas menjadi konsensus global tentang pentingnya keanekaragaman budaya, yang diabadikan dalam Deklarasi Universal UNESCO tentang Keanekaragaman Budaya dan diratifikasi oleh semua negara anggota. Berdasarkan konsep-konsep inti, laporan Komisi Dunia untuk Kebudayaan dan Pembangunan “Our Creative Diversity” (1996) secara jelas menegaskan kembali “kekhususan budaya sebagai vektor identitas, nilai dan makna dalam realitas ekonomi”.²⁷

Dalam 20 tahun terakhir, pergeseran progresif dalam wacana kebijakan budaya dan pemahaman tentang ekonomi kreatif dapat difahami dari pendekatan yang bersifat defensif ke pendekatan yang lebih inklusif. Evolusi lanskap kebijakan menuju lingkungan multipolar, baik di tingkat global maupun nasional secara bersama mengalami percepatan transformasi digital secara bertahap. Hal ini telah mengubah parameter secara radikal melalui perkembangan daya tarik politik di tengah-tengah lingkungan yang berubah

²⁷ M.E. Pangestu, *Pengembangan Industri Kreatif Menuju Visi Ekonomi Kreatif Indonesia 2025* (Jakarta: Departemen Perdagangan Republik Indonesia, 2008).

melalui dorongan kemajuan digital.²⁸ Berdasarkan beberapa resolusi PBB tentang budaya dan pembangunan yang secara eksplisit mengakui keterkaitan antara budaya dan tiga pilar pembangunan berkelanjutan, dan penyertaan budaya secara transversal dalam Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 pada tahun 2015, pendekatan inklusif terhadap ekonomi kreatif secara bertahap dikonsolidasikan. Namun, pergeseran dalam diskusi kebijakan publik ini masih harus diterjemahkan sepenuhnya ke dalam pembuatan kebijakan yang sebenarnya. Pemikiran ulang dan pembentukan kembali spektrum kebijakan publik yang mendalam diperlukan untuk sepenuhnya mencakup kekhususan sektor kreatif dan kekuatan ekonomi.²⁹

Momentum pertumbuhan ekonomi kreatif terjadi di berbagai wilayah dengan cara yang berbeda, berdasarkan pendekatan dan prioritas masing-masing negara. Pada tahun 1990-an, Commodity Channel Index (CCI) secara bertahap dimasukkan ke dalam kebijakan budaya nasional. Kebijakan budaya Australia “Creative Nation” pada tahun 1994 secara eksplisit mengemas CCI sebagai sumber pertumbuhan finansial untuk ekonomi nasional, sementara kebijakan budaya Inggris pada tahun 1997 mempromosikan industri kreatif sebagai pendorong ekonomi negara. Sementara di Asia, Cina meluncurkan strategi industri budaya pada tahun 2001 untuk rencana pembangunan ekonomi, sementara di Singapura, prioritas diberikan pada pengembangan “masyarakat kreatif” melalui perusahaan seni, teknologi dan

²⁸ Carunia Mulya Firdausy, *Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2017).

²⁹ Badan Ekonomi Kreatif, *Opus: Ekonomi Kreatif Outlook 2019* (Jakarta: Badan Ekonomi Kreatif, 2018).

penelitian. Beralih ke Afrika, industri film Nigeria atau “Nollywood” berkembang selama revolusi digital ketika camcorder menggantikan kamera film 35 milimeter dan industri film menjadi pemberi kerja terbesar kedua di negara ini. Minat yang luas pada sektor kerajinan dan seni pertunjukan dalam kebijakan publik di sebagian besar wilayah di dunia juga membuktikan pengakuan yang semakin besar akan pentingnya sektor ini bagi pembangunan ekonomi dan social masyarakat.³⁰

Terlepas dari pengakuan luas terhadap CCI, kebijakan publik yang berkaitan dengan ekonomi kreatif sebagian besar masih terfragmentasi. CCI cenderung menempati posisi ambivalen dalam kerangka kerja kebijakan publik. Secara implementatif, kebijakan CCI beroperasi di antara budaya, ekonomi dan teknologi. Melalui kebijakan ini, industri kreatif sering kali ditempatkan di belakang dalam kebijakan budaya dan ekonomi.³¹ Pada satu sisi, industri budaya tidak dianggap sebagai sektor yang terintegrasi dalam perekonomian suatu negara, namun di sisi lain sifat industri budaya yang kompleks dan memiliki banyak sisi melibatkan aspek moneter dan non-moneter, namun juga berbicara tentang berbagai bidang kebijakan termasuk teknologi, pendidikan, atau pariwisata yang dapat mencakup secara komprehensif oleh kebijakan budaya dalam spektrum kebijakan publik.³²

³⁰ Zul Asfi Arroyhan Daulay, “Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif Dengan Metode Triple Helix (Studi Pada UMKM Kreatif Di Kota Medan),” *Tansiq* 1, no. 2 (2018).

³¹ J. Howkin, *The Creative Economy* (London: Penguin Book, 2001).

³² I Gusti Kade Siladana & Putu Sudira, “Implementation of Creative Economy Entrepreneurial Character Development through the

Ekonomi kreatif secara khusus dibahas melalui dua instrumen normatif UNESCO, yaitu Deklarasi Universal tentang Keanekaragaman Budaya (2001) dan Konvensi Perlindungan dan Promosi Keanekaragaman Ekspresi Budaya (2005). Konvensi ini merupakan satu-satunya instrumen hukum internasional yang diadopsi oleh Uni Eropa. Empat pilar inti Konvensi 2005 memiliki implikasi penting terhadap berbagai komponen ekosistem budaya, masyarakat dan ekonomi melalui: (i) tata kelola; (ii) arus barang dan jasa budaya, dan mobilitas seniman; (iii) pembangunan berkelanjutan; dan (iv) hak asasi manusia dan kebebasan fundamental. Melalui komponen budaya dan perdagangan, ekonomi kreatif memiliki hubungan yang erat dengan klausul tentang perlakuan istimewa yang dibahas dalam Konvensi 2005. Klausul tersebut menyatakan bahwa negara maju harus memberikan perlakuan istimewa kepada seniman dan profesional dan praktisi budaya lainnya, serta barang dan jasa budaya dari negara berkembang.³³

Selanjutnya, Konvensi Perlindungan Warisan Budaya Takbenda (2003) juga membahas bidang-bidang yang merupakan komponen utama ekonomi kreatif. Meskipun tidak mencakup ekonomi kreatif sebagai konsep inti, warisan budaya takbenda mencakup praktik-praktik dalam cakupan ekonomi kreatif, terutama kerajinan tangan dan seni pertunjukan. Meskipun pembangunan ekonomi bukanlah tujuan eksplisit untuk

Culture of Sustainable Development and Vocational Stakeholders Partnership,” *Jurnal Pendidikan Vokasi* 9, no. 2 (2019).

³³ Prayudi Prayudi, Kartika Ayu Ardhanariswari, & Ninik Probosari, “Indonesia’s Creative Economy Agency’s Communication Strategy in Supporting Creative City,” *Jurnal ASPIKOM* 7, no. 1 (2022).

melindungi warisan budaya takbenda yang berfokus pada transmisi, namun semakin banyak praktik budaya takbenda yang berdampak pada pembangunan ekonomi. Dimensi ekonomi dari warisan budaya takbenda telah ditingkatkan, bersama dengan dimensi sosial dan lingkungannya sebagai bagian dari upaya untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan. Mengingat tren yang berkembang ini, Badan Evaluasi Konvensi merekomendasikan pada tahun 2019 untuk merumuskan panduan bagi negara pihak untuk menyeimbangkan pembangunan ekonomi dan langkah-langkah perlindungan, sehingga dapat memanfaatkan potensinya untuk memberi manfaat bagi para pembawa warisan budaya dan masyarakat setempat serta menghindari komersialisasi yang berlebihan. Melalui pemahaman ini, ekonomi kreatif merupakan upaya untuk membangun pembangunan ekonomi negara secara berkelanjutan.³⁴

Tinjauan tentang Kebijakan Indonesia dalam Sektor Pertanian

Sebagai upaya mengelola potensi pertanian di Indonesia, kebijakan pertanian diperlukan untuk melakukan pengelolaan terhadap akselerasi sektor pertanian. Kebijakan ini tidak hanya mengelola sektor pertanian semata, melainkan lebih daripada itu untuk mengelola output pengembangan potensi pertanian sebagai upaya mensupport sektor-sektor lain, di sektor ekonomi. Kebijakan pertanian sendiri merupakan langkah pemerintah untuk mencapai tingkat standar ekonomi yang lebih baik melalui

³⁴ Khusnul Azhar & Dias Satria Satrio Pratomo, "Role of Creative Economy on Local Economic Development," *Journal of Indonesian Applied Economics* 9, no. 1 (2021).

standart pengembangan sektor pertanian. Secara implementatif, kebijakan pemerintah merupakan campur tangan pemerintah untuk mengelola produksi, pemasaran, politik luar negeri, maupun tindakan pemerintah untuk mendorong, mengendalikan, dan mengatur pembangunan pertanian untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.³⁵

Kebijakan pertanian juga mengarah pada upaya pembentukan instrumen dan peraturan untuk meningkatkan produksi dan konsumsi komoditas sektor pertanian di Indonesia. Melalui konsep ini, tujuan kebijakan pertanian dapat diterjemahkan sebagai langkah konkret yang dilaksanakan secara konsisten pada pengaturan sektor pertanian. Urgensi dari kebijakan pertanian diharapkan memiliki aspek positif dalam pengembangan dan peningkatan kreativitas para petani di Indonesia. Untuk itu, pembentukan kebijakan pertanian memiliki urgensi dalam peningkatan sektor pertanian secara berkelanjutan. Selanjutnya juga untuk mengatur tingkatan produksi, investasi, dan penerapan teknologi pertanian melalui instrumen kebijakan yang memiliki kepastian hukum.³⁶ Kebijakan pertanian juga mengatur tentang aspek-aspek yang memfasilitasi terselenggaranya sektor pertanian yang baik, seperti distribusi pupuk dan obat-obatan pertanian.

³⁵ Juli Panglima Saragih, "Tantangan Kebijakan Pengembangan Sektor Pertanian Di Masa Datang," *Kajian* 21, no. 2 (2016).

³⁶ Ismi Imania Ikhsani, Feninda Eka Tasya, Ul Inati, Iradhad Taqwa Sihidi, Ali Roziqin, & Ach. Apriyanto Romadhan, "Arah Kebijakan Sektor Pertanian Di Indonesia Untuk Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0," *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik* V, no. 2 (2020): 138.

Dari sisi aspek manfaat, kebijakan pertanian tidak hanya mengatur tentang output pertanian, melainkan juga pada aspek pengelolaan sumber daya manusia di bidang pertanian. Hal ini sebagaimana Pasal 42 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Dalam pasal ini dijelaskan adanya kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi para petani. Pendidikan dan pelatihan dilaksanakan melalui program yang memiliki objek peningkatan sumber daya manusia di bidang pertanian. Pendidikan dan pelatihan pertanian juga didukung oleh adanya penyuluh pertanian di setiap wilayah. Harapannya, program ini mampu meningkatkan aspek kreativitas para petani di Indonesia untuk meningkatkan pengembangan sektor pertanian dan berimplikasi pada kesejahteraan ekonomi petani.³⁷

Dalam konteks kebijakan, kebijakan pertanian merupakan serangkaian upaya tindakan yang akan, sedang, atau bahkan akan dilakukan oleh pemerintah dalam menentukan pencapaian tujuan di sektor pertanian. Tujuan utama kebijakan pertanian adalah untuk memajukan, mengusahakan dalam rangka peningkatan produktivitas, produksi, dan efisiensi tingkat penghidupan dan kesejahteraan petani. Oleh karenanya, untuk mencapai tujuan-tujuan ini, pemerintah pusat maupun daerah menerbitkan berbagai peraturan sebagai bentuk kebijakan yang bersifat mengatur (*regulating policies*) yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan pemerataan (*distributive policies*).

Sebagai contoh kebijakan yang bersifat pengaturan adalah adanya peraturan tentang distribusi atau perdagangan pupuk

³⁷ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

untuk sektor pertanian. Sementara peraturan yang bersifat mengatur untuk mewujudkan pemerataan pendapatan bagi petani adalah penentuan harga kopra minimum yang berlaku sejak tahun 1969 di daerah-daerah kopra di wilayah Sulawesi. Dalam bidang pertanian juga terdapat beberapa kebijakan seperti kebijakan harga; kebijakan pemasaran; kebijakan pertanian dan industri; serta kebijakan pendapatan penduduk desa dan kota. Berkaitan dengan kebijakan harga, kebijakan harga merupakan upaya kebijakan yang memiliki tujuan untuk mengadakan stabilitas harga (*price and economic policy*). Kebijakan harga mengandung upaya pemberian support atas harga-harga hasil pertanian untuk melindungi petani dari harga yang tidak merugikan bagi kelompok tani. Oleh karenanya, kebijakan harga mengandung unsur pengaturan terhadap stabilitas harga-harga hasil pertanian; peningkatan pendapatan petani melalui perbaikan dasar tukar (*term of trade*): serta memberikan arah dan petunjuk pada jumlah produksi pertanian.³⁸

Adapun dalam aspek kebijakan pemasaran, pemerintah melakukan perlindungan terhadap para produsen di bidang pertanian. Melalui kebijakan pemasaran, penguatan terhadap daya saing petani melalui *central marketing board* untuk mengurangi pengaruh fluktuatif harga pasar dunia atas penghasilan petani di Indonesia. Selain melalui kebijakan ini, kebijakan terhadap pemasaran hasil-hasil tanaman perdagangan untuk ekspor meliputi pengaturan terhadap distribusi sarana produksi bagi petani. Melalui upaya ini, pemerintah menciptakan persaingan

³⁸ R. N. A. Prasetyo, R., & Saksono, "Pengaruh Subsidi Input Terhadap Nilai Tukar Petani Padi Di Indonesia," *Jurnal Good Governance* 15, no. 2 (2019).

secara sehat antara para pedagang dengan melayani kebutuhan petani seperti pupuk, pestisida, insektisida. Harapannya, para petani dapat membeli sarana-sarana produksi tersebut dengan harga yang relatif tidak membebani serta mampu mengembangkan aktivitas pertanian secara efektif.³⁹

Sementara itu pada aspek kebijakan struktural, kebijakan ini dimaksudkan untuk memperbaiki struktur produksi terhadap sektor pertanian. Kebijakan struktural ini terlaksana melalui kerjasama yang erat dari berbagai lembaga pemerintah dengan para pelaku sektor pertanian melalui kelompok tani. Oleh karenanya, kebijakan struktural ini untuk merepresentasikan tindakan ekonomi yang mendorong adanya perubahan struktural yang dilaksanakan dengan proses penyuluhan yang intensif untuk mewujudkan struktur perekonomian yang membela kepentingan kelompok tani. Selanjutnya, kebijakan pertanian dan industri laju pada penguatan sektor pertanian dan industri untuk saling melengkapi. Tujuannya adalah untuk mengembangkan sektor pertanian dan industri dalam konteks yang seimbang dan saling melengkapi. Terakhir, kebijakan pemerataan pendapatan penduduk desa dan kota untuk mengatur keseimbangan antara pola pengeluaran dan konsumsi bagi para pelaku ekonomi serta masyarakat desa dan kota. Harapannya, tidak terjadi ketidakseimbangan antara produksi dan konsumsi di tingkat desa maupun kota.⁴⁰

³⁹ Ashari, "Optimalisasi Kebijakan Kredit Program Sektor Pertanian Di Indonesia," *Analisis Kebijakan Pertanian* 7, no. 1 (2009): 21–42.

⁴⁰ Endro Gunawan, "Persepsi Petani Dalam Implementasi Program Kartu Tani Untuk Mendukung Distribusi Pupuk Bersubsidi," *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan* 28, no. 2 (2020).

Berkaitan dengan upaya pemerintah untuk memberikan kebijakan dalam sektor pertanian, tampaknya pemerintah memiliki tujuan untuk mewujudkan pemerataan, pembangunan, dan pengolahan, serta pemasaran hasil pertanian. Oleh karenanya, melalui kebijakan dalam sektor pertanian, upaya peningkatan kapasitas dan pemberdayaan SDM di kelembagaan kelompok tani menjadi hal yang sangat penting. Hal ini direalisasikan melalui upaya pemerintah untuk melakukan penyuluhan dan pengembangan kelembagaan pada kelompok tani yang mampu mengikuti perkembangan dan tantangan perekonomian di Indonesia, khususnya dalam sektor ekonomi pertanian. Dalam konteks lain, inovasi dan diseminasi teknologi pada sektor pertanian merupakan salah satu hal untuk meningkatkan produktivitas hasil pengolahan pertanian. Upaya ini menjadi sarana untuk meningkatkan efisiensi usaha dalam sektor pertanian melalui revitalisasi teknologi, pengembangan produksi dan potensi pertanian, jaminan mutu pengelolaan kelompok tani, pengembangan kelembagaan di sektor kelompok tani, memberikan fasilitas terhadap pengembangan kewirausahaan dan kemitraan di sektor pertanian. Melalui pemberdayaan kelompok tani dengan kebijakan yang relevan, diharapkan kebijakan pemerintah mampu memberikan peranan penting terhadap pengembangan pertanian di Indonesia.⁴¹

⁴¹ Dahiri, "Analisis Kritis Terhadap Kinerja Sektor Pertanian Subsektor Tanaman Pangan," *Jurnal Budget* 3, no. 2 (2020): 137–149.

Tinjauan tentang Green Economy

Sebagai landasan teoritis, *green economy* merupakan konstruksi yang sangat kompleks sebagai upaya untuk mengintegrasikan kepentingan ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial, serta tata kelola yang diperlukan untuk mengatur proses terlaksananya *green economy*. Berkaitan dengan gagasan *green economy*, UNEP memiliki tujuan untuk mendukung upaya penurunan emisi gas rumah kaca. Gagasan ini juga sebagai upaya untuk memberikan peluang terhadap pemanfaatan konsepsi *green economy* untuk menunjang terciptanya pembangunan ekosistem secara berkelanjutan. Secara pengertian, *green economy* merupakan aktivitas ekonomi yang memberikan output terhadap emisi Green Honses Gas (GHG).⁴²

Tujuan *green economy* sendiri adalah untuk menciptakan pola ekonomi yang tidak hanya sekedar mempertimbangkan masa makro ekonomi, melainkan juga memperhatikan investasi di sektor-sektor yang memproduksi produk yang ramah lingkungan. Selain itu, *green economy* juga memiliki tujuan untuk menyiapkan panduan investasi hijau yang mampu mendorong pengentasan kemiskinan masyarakat.⁴³ Melalui tujuan *green economy* ini, perhatian terhadap konsep *green economy* sejalan dengan upaya masyarakat dunia untuk mencari solusi terhadap berbagai tantangan globalisasi yang terjadi di era kontemporer.

⁴² Dean Stroud, Peter Fairbrother, & Joanne Blake, "Skill Development in the Transition to a 'Green Economy': A 'Varieties of Capitalism' Analysis," *The Economic and Labour Relations Review* 25, no. 1 (2014).

⁴³ David Michael M. San Juan, "Transitioning to a Progressive Green Economy in the Philippines," *Journal of Developing Societies* 36, no. 2 (2020).

Kemunculan teori ekonomi lingkungan juga menjadi salah satu solusi yang bersama konsep *green economy* menyediakan solusi atas berbagai produk yang berkaitan dengan lingkungan, khususnya berkaitan dengan kebijakan ekonomi yang memiliki visi untuk penjagaan terhadap lingkungan hidup.⁴⁴

Dalam konteks kontemporer, *green economy* memfokuskan pada aspek pembahasan yang memberikan pembatasan terhadap perilaku ekonomi yang bersifat ramah lingkungan. Pada aspek implementatif, *green economy* tidak hanya memberikan penekanan terhadap kebijakan ekonomi, melainkan juga sebagai sarana penilaian terhadap aktivitas ekonomi serta memberikan sanksi terhadap perilaku ekonomi yang memberikan kerusakan terhadap lingkungan. Lebih penting lagi, *green economy* mendorong adanya pelaku ekonomi untuk memproduksi barang, perdagangan, dan konsumsi pada barang-barang yang memiliki keramahan terhadap lingkungan.⁴⁵ Artinya, pendapatan dan lapangan pekerjaan yang dihasilkan dari kebijakan *green economy* pada muaranya diharapkan mampu memberikan motivasi terhadap berbagai kegiatan yang berdimensi pada keramahan terhadap lingkungan. Pemahaman ini menunjukkan adanya nilai investasi jangka panjang yang berkaitan dengan infrastruktur perekonomian seperti inovasi teknologi dan kelembagaan perekonomian untuk

⁴⁴ Ihnji Jon, "Reassembling the Politics of 'Green' Urban Redevelopment in East Garfield Park: A Polanyian Approach," *Environment and Planning A: Economy and Space*, 2024, <https://doi.org/10.1177/0308518X231221019>.

⁴⁵ M. S. Cato, *Green Economics: An Introduction to Theory, Policy and Practice* (London: Earthscan, 2012), 27.

mampu bersama-sama menciptakan struktur ramah lingkungan dalam setiap aktivitas perekonomian.⁴⁶

Evolusi pemaknaan *green economy* dari upaya kebijakan menjadi fokus pembangunan dan pembukaan lapangan kerja merupakan salah satu strategi untuk mengimplementasikan *green economy* di tengah masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesadaran terhadap masyarakat untuk bersama-sama berkontribusi dalam memenuhi permintaan pasar berbasis produk ramah lingkungan. Output dari kebijakan *green economy* setidaknya berorientasi pada tiga aspek, yaitu: 1) adanya sumber-sumber penghasilan dan lapangan kerja baru yang berorientasi pada keramahan lingkungan, 2) mengurangi aktivitas ekonomi yang menggunakan sumber daya alam yang mengancam eksistensi lingkungan, 3, memberikan kontribusi sosial melalui pelaksanaan pembangunan berkelanjutan pengembangan lingkungan.⁴⁷

Pada 9 Agustus 2022, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) meluncurkan GEI Indonesia dalam rangkaian forum 3rd DWG Meeting Side Event G20 bertema “Towards Implementation and Beyond: Measuring the Progress of Low Carbon and Green Economy” di Bali.

Bappenas meluncurkan GEI bersama United Kingdom Foreign Commonwealth and Development Office, Germany’s Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action, Global

⁴⁶ Azwar Iskandar & Khaerul Aqbar, “Green Economy Indonesia Dalam Perspektif Maqashid Syari’ah,” *AL-MASHRAFIYAH: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah* 3, no. 2 (2019)., 86.

⁴⁷ Ian Bailey & Federico Caprotti, “The Green Economy: Functional Domains and Theoretical Directions of Enquiry,” *Environment and Planning A: Economy and Space* 46, no. 8 (2014).

Green Growth Institute (GGGI), WRI Indonesia, GIZ, LCDI, dan United Nations Partnership for Action on Green Economy (PAGE).

GEI Indonesia terdiri dari 15 indikator yang mencakup tiga pilar, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan, yang mencerminkan pembangunan ekonomi hijau. Pilar ekonomi meliputi enam indikator, seperti intensitas emisi, intensitas energi, dan pendapatan nasional bruto (PNB) per kapita. Pilar sosial terdiri dari empat indikator, termasuk tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, angka harapan hidup, dan rata-rata lama sekolah. Sementara pilar lingkungan mencakup lima indikator, seperti tutupan lahan, lahan gambut terdegradasi, penurunan emisi, sampah terkelola, dan energi baru terbarukan.

GEI Indonesia akan diintegrasikan ke dalam dokumen pembangunan nasional, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Melalui implementasi GEI, diharapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6,1-6,5% per tahun hingga 2050, intensitas emisi berkurang hingga 68% pada tahun 2045, dan menciptakan 1,8 juta lapangan kerja hijau pada tahun 2030.

Ekonomi hijau merupakan salah satu dari enam strategi transformasi ekonomi Indonesia yang ditetapkan oleh Bappenas untuk mencapai visi Indonesia 2045. Strategi ini dianggap sebagai pengubah permainan bagi Indonesia dalam pemulihan ekonomi pasca-pandemi Covid-19 dan menuju pembangunan berkelanjutan. Dengan tema “Recover together, recover stronger”, Indonesia berharap menjadi pemrakarsa utama dan contoh bagi negara lain dalam mengimplementasikan kebijakan ekonomi hijau.

Tinjauan tentang Ekonomi Islam

Berkaitan dengan nilai-nilai ekonomi Islam, pemerataan dan ekonomi berkelanjutan merupakan esensi perwujudan ekonomi berkeadilan. Ekonomi berkeadilan merupakan nilai dasar atas konsep ekonomi Islam. Ekonomi Islam sendiri menekankan adanya upaya kesadaran masyarakat dan kebijakan pemerintah yang mengedepankan nilai-nilai keadilan. Dalam hal ini, kesadaran masyarakat merupakan praktik atas nilai esensial dalam perekonomian. Sementara pada aspek kebijakan pemerintah, representasi ekonomi Islam bisa diterapkan melalui kebijakan-kebijakan di bidang ekonomi yang mengedepankan nilai-nilai pemerataan, keadilan, dan berkelanjutan.⁴⁸

Dalam konteks Islam, Islam memberikan bimbingan dalam semua bidang kehidupan manusia termasuk berkaitan masalah ekonomi. Oleh karena itu, problematika ekonomi yang dihadapi dunia baik pada tingkat makro maupun mikro menuntut dipecahkan melalui nilai-nilai ekonomi Islam. Dalam konsep pengembangan ekonomi, ekonomi Islam memiliki signifikansi sebagai standar etika dan nilai moral dalam menentukan arah program perekonomian dan kebijakan ekonomi. Ekonomi Islam juga merupakan nilai esensial atas perwujudan tujuan-tujuan syariah, di mana ekonomi berkeadilan dan berkelanjutan adalah cita-cita yang harus diwujudkan. Pengembangan ekonomi melalui nilai ekonomi Islam modern merupakan reaksi keagamaan, intelektual, dan epistemologis terhadap perkembangan ekonomi di era modern. Selain itu, ekonomi Islam juga memberikan perhatian

⁴⁸ Daud A. Mustafa, Hashir A. Abdulsalam, & Jibrail B. Yusuf, "Islamic Economics and the Relevance of Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah," *SAGE Open*, 2016, <https://doi.org/10.1177/21582440166713>.

terhadap peningkatan sumber daya manusia di bidang ekonomi yang memiliki kepekaan terhadap penciptaan keadilan dan kesetaraan.⁴⁹

1. Konsep dasar ekonomi Islam

Ilmu ekonomi, secara umum dipahami sebagai sebuah ilmu yang mempelajari cara manusia memenuhi kebutuhannya. Dari pemahaman tersebut, aksentasinya adalah cara manusia. Jika perekonomian adalah kegiatan-kegiatan dan pekerjaan-pekerjaan yang menjadikan manusia sebagai subyek pelakunya, maka hasil yang baik bagi aktivitas perekonomian tersebut, tentu saja didasarkan pada sejauh mana manusia itu melakukan bisnis ekonomi tersebut dengan cara yang baik. Oleh karena itu persoalan yang paling melekat dalam hal itu adalah moral manusia itu sendiri. Ekonomi akan menjadi baik jika manusia berakhlak baik, demikian pula sebaliknya.⁵⁰ Dengan demikian konsep Islam tentang ekonomi disebut juga perekonomian *ethical* yang memainkan fungsinya melalui “akidah tauhid” dengan prinsip-prinsip yang mengikutinya, yaitu keimanan, pengabdian, kerjasama dan etika. Semua prinsip itu menjadi *frame work* bagi kerja ekonomi Islam. Sementara perekonomian kapitalis menyandarkan prinsipnya hanya pada nilai materialismenya saja.

⁴⁹ Adiwarmarman A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 69.

⁵⁰ Lihat al-Zumar: 65: “Agar Allah akan menutupi (mengampuni) bagi mereka perbuatan yang paling buruk yang mereka kerjakan dan membalas mereka dengan upah yang lebih baik dari apa yang Telah mereka kerjakan”. Lihat juga al-Ma’idah: 5: “Pada hari Ini diharamkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka...”

Nilai perekonomian Islam diarahkan terbentuknya kesejahteraan masyarakat bukan kerusakan. Hal ini bisa dilihat dari konsep tentang harta dan cara perolehannya yang harus dilandaskan pada fungsi sosial.⁵¹ Oleh karena itu pembahasan tentang ekonomi Islam sesungguhnya sangat penting dan rasional, karena dampak positif dan asas manfaat yang dimiliki ekonomi Islam. Anjuran adanya *zakat*, *infaq* dan *shadaqah* yang sangat membantu kehidupan masyarakat ekonomi lemah menjadi bukti atas hal tersebut.

Sebagaimana atensinya terhadap masalah spiritual, Islam juga menaruh perhatian besar terhadap material. Bahkan tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa perhatian Islam terhadap materi dan aktivitas perekonomian itu mengungguli aliran-aliran materialisme itu sendiri. Sebagai gambarnya adalah sebagai berikut: (a) Manusia diciptakan Allah untuk beribadah. Allah telah memberikan hak sepenuhnya kepada manusia sebagai pengelola bumi demi merealisasikan kemakmuran manusia bukan kerusakan.⁵² Kemakmuran yang dimaksud adalah pengelolaan bumi dengan kerja, memproduksi materi, dan penegakan keadilan di antara manusia. (b) Manusia adalah makhluk yang terdiri dari unsur

⁵¹ Lihat al-Qashas: 77: “Dan carilah pada apa yang Telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah Telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”

⁵² Lihat Hud: 61: “*Dia Telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya*”.

material dan spiritual. Islam memberikan keseimbangan antara kombinasi dua unsur ini sehingga tidak terjadi ketimpangan antara yang satu dengan yang lainnya. (c) Bekerja dan berusaha mencari rezeki di muka bumi merupakan kewajiban dalam Islam. Karena hal itu merupakan sarana ditegakkannya kewajiban ibadah. Sebuah perbuatan yang jika tidak menerapkan sesuatu mengakibatkan ketidaksempurnaannya sebuah kewajiban, maka sesuatu itu menjadi wajib adanya. (d) Kegiatan perekonomian yang disandarkan kepada sebuah pengabdian kepada Allah maka kegiatan tersebut termasuk ibadah dalam arti yang luas. (e) Islam menganjurkan untuk mencari rezeki yang baik dan dengan cara yang baik.⁵³ Dan (f) Islam menyarankan agar individu sebagai bagian dari masyarakat hidup secara mulia. Islam mencela orang yang lemah dalam berusaha menggapai batas standar kecukupannya dari kebutuhan pokok dan primernya.

Sebagai sistem nilai yang didasarkan moral dan spiritual yang berupa akidah tauhid, ekonomi Islam memandang bahwa alam semesta dan segenap isinya; manusia, hewan, tumbuhan, batu, gunung dan sebagainya merupakan makhluk Tuhan. Ini berbeda dengan ekonomi materialisme yang memandang alam semesta sebagai sesuatu yang kekal dan kadim, ada sejak dulu. Benda-benda yang ada di dalamnya pun dianggap sebagai produk dari alam. Manusia dilihat hanya dari

⁵³ Al-A'raf: 32: *"Siapakah yang mengharamkan perbiasan dari Allah yang Telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezki yang baik?" Katakanlah: "Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat."*

sisi eksistensinya saja, ia dianggap bukan makhluk dan merupakan produk alam, sebagaimana yang diyakini para penganut paham evolusionisme. Lebih jauh manusia tidak mempunyai makna bagi kehidupannya selain eksistensi keberadaannya. Keberadaannya bertujuan tidak lain adalah untuk sesuatu yang tidak ada di luar dari kehidupan empirisnya, kehidupannya itu sendiri, yakni; kelezatan dan kenikmatan empiris. Ketika manusia diarahkan pada sesuatu yang realistis pada waktu yang sama, berimplikasi pada sesuatu yang anti realistis, di mana manusia menjadi *homo-economicus* yang menganggap tidak ada yang penting selain pemenuhan naluri empirismenya tanpa peduli dengan nilai-nilai kemanusiaan seperti kasih sayang, keadilan, tanggung jawab dan kemuliaan.

Pembahasan yang dilakukan atas dasar agama atau akidah bukanlah pembahasan bersifat metafisika yang miskin akan realita dan norma-norma pembahasan ilmiah. Watak akidah perekonomian Islam tidak berarti secara mutlak tidak dibangun atas asas ilmiah yang kokoh. Anggapan adanya pemisahan antara agama dan ilmu adalah anggapan yang tidak benar. Karena anggapan ini sangat mungkin berangkat dari metodologi yang salah yang menggeneralisasikan nilai-nilai *incomplete induction* terhadap agama selain Islam kepada Islam.

Sebagian orang meragukan keberadaan perekonomian dalam Islam', menurutnya, ilmu dengan segala hipotesa, teori dan norma-normanya tidak mempunyai watak kemandzhaban. Tidak benar jika dikatakan "ilmu sosialis" atau "ilmu kapitalis" atau juga "ilmu Islam". Oleh karena itu adanya ilmu

perekonomian Islam tidak mendapatkan pengakuan. Para pemikir Muslim menjawab pendapat itu dan ilmu perekonomian dan ilmu-ilmu sosial lainnya adalah ilmu-ilmu normatif. Sebuah norma tentu akan ditentukan oleh dimensi filosofis yang melandasinya, kecenderungan aliran yang melingkupinya. Ilmu sosial berbeda dengan ilmu-ilmu eksakta, ilmu-ilmu alam yang kebenaran dapat dilakukan secara pasti. Jadi adanya ilmu perekonomian Islam berangkat dari asumsi bahkan persoalan perekonomian yang hendak dibangun berdasarkan pada norma dan prinsip Islam. Oleh karena itu keberadaannya sah-sah saja.

Namun anggapan ilmu perekonomian Islam sebagai ilmu normatif sebagaimana ilmu-ilmu sosial lainnya seperti penjelasan di atas masih bisa diperdebatkan secara mendalam. Sebab kaidah-kaidah dan hukum-hukum Islam tidak bersifat normatif. Ia adalah undang-undang bagi irama kepastian yang senantiasa sejalan dengan irama fenomena alam. Allah menciptakan alam dan manusia disertai dengan membuat hukum kepastian atas keduanya. Tidak mungkin terjadi pertentangan antara keduanya. Sebab keduanya berasal dari satu sumber, yaitu Allah SWT. Oleh karena itu kaidah dan hukum Islam bukan bersandar pada “*what ought to be*”, sesuatu yang seharusnya ada, tetapi pada “*what should have been*”, sesuatu yang pasti adanya. Dimensi normatif yang memberikan hukum bagi manusia tidak termasuk dalam kaidah dan hukum Islam. Ia hanyalah sesuatu yang nisbi yang berada di antara bentangan hukum kepastian manusia.⁵⁴

⁵⁴ Lihat dalam, Euis Amalis, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Asatrus, 2005).

Sebagai contoh dapat diajukan hukum teori keseimbangan kuantitas dan kualitas. Tumbuh-tumbuhan tidak akan menyerap sinar lebih dari yang ia butuhkan. Dia tidak mungkin menyerap debu (kotoran) yang membuat bahaya bagi dirinya. Hewan tidak akan memakan rumput selain hanya sebatas keperluannya saja. Dia tidak mungkin memakan sesuatu yang membuat bahaya bagi kehidupannya. Ini adalah hukum keseimbangan kuantitas dan kualitas antara kebutuhan dan nilai. Hukum tersebut merupakan hukum alam yang bergulir tanpa kesadaran. Hukum keseimbangan ini berlaku pula bagi kegiatan distribusi harta, memperoleh dan menikmati makanan dan minuman.⁵⁵ Larangan Islam mengkonsumsi sesuatu yang kotor seperti minum *khamr* dan makan babi memberikan sinyal bahwa kaidah (hukum) Islam tidak lain hanyalah praktik dari hukum kesesuaian kuantitas dan kualitas dalam lingkup kegiatan berekonomi. Jadi teori hukum keseimbangan tersebut merupakan hukum kontekstual yang tidak dijumpai dalam dimensi normatif atau sebuah madzhab (aliran).

Pada tataran perilaku manusia, maka dapat dirumuskan bahwa perbuatan sadar manusia yang dilakukan sesuai dengan kaidah dan hukum Islam berarti dapat dikatakan pula bahwa unsur "*what ought to be*" dalam kaitannya manusia dengan

⁵⁵ Lihat al-Furqan ayat 67: "Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian." Lihat juga al-A'raf: 31: "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan."

dzatnya- sesuai dengan unsur “*what should have been*”. Sementara ketika perbuatan manusia tidak dilakukan berdasarkan kaidah dan hukum Islam, maka berarti unsur “*what ought to be*” tidak sesuai dengan “*what should have been*”. Dengan demikian sesungguhnya aspek normatif bukan termasuk dalam kaidah dan hukum Islam, tetapi aspek normatif yang mengikuti irama tolerir atau tidak tolerir kaidah dan hukum Islam-lah yang sesuai dengan kebenaran.

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa asas perekonomian Islam didasarkan pada karakter akidah. Oleh karena itu perekonomian Islam memiliki beberapa dimensi, yaitu: keimanan, pengabdian, moral, kerjasama dan alam. Sementara dalam perekonomian konvensional tidak ditemui dimensi tersebut. Walaupun di sana terdapat dimensi kerjasama dan alam namun kandungan pengertiannya berbeda dengan perekonomian Islam.

Islam, secara umum dipahami sebagai sebuah pandangan hidup yang diambil dari nilai-nilai al-Qur’an dan Sunnah yang diyakini oleh penganutnya dapat mengatur kehidupannya dan sekaligus memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia dan akhirat. Islam juga diimani mempunyai prinsip-prinsip lengkap yang meliputi semua aspek kehidupan; sosial, ekonomi, politik dan budaya. Karena kekhasan nilai dan prinsip Islam dalam segala aspek tersebut, para penganutnya mempercayai bahwa sistem ekonomi Islam, sistem politik Islam dan sistem budaya Islam pasti adanya.

Dalam konteks sistem ekonomi misalnya, Islam mempunyai model, karakter, dan rumusan-rumusan teori yang dapat digunakan umat Islam menjalankan usahanya, baik

dalam aktivitas konsumsi, produksi, maupun distribusi. Semua ini memberikan arahan yang diyakini benar dan ideal dalam membangun kesejahteraannya. Dalam hal konsumsi, sebagai contoh, Islam membuat batasan untuk tidak memakan babi dan meminum alkohol. Demikian dalam produksi dan distribusi, nilai-nilai Islam telah menjadi fondasinya.

Sebagai agama yang diturunkan oleh Allah (*samawi*), Islam dengan model sistem ekonominya yang khas dijadikan oleh umat Islam sebagai undang-undang yang mengatur aktivitas bisnis. Sehingga keseluruhan aspek kehidupan ekonomi umat Islam harus mengikuti aturan-aturan tersebut. Dengan kata lain, cara pandang masyarakat Muslim dan cara berperilaku dalam berbisnis harus selaras dengan nilai-nilai tersebut. Karena, masyarakat Muslim sangat terikat dengan aturan tersebut, maka sangat bisa dipahami jika ekonomi Islam menjadi doktrin ideologi bagi mereka.

Ekonomi Islam bukanlah ilmu melainkan doktrin. Karena di dalamnya terkandung nilai-nilai yang berasal dari al-Qur'an dan al-Hadis yang menuntut masyarakat Muslim untuk mentaatinya dalam kehidupan ekonominya. Konsepsi ekonomi Islam sebagai sebuah doktrin ini memaksudkan bahwa ekonomi Islam lebih kosen pada pencarian setiap aturan dasar kehidupan ekonomi yang berhubungan dengan ideologi keadilan sosial. Sebagai sebuah doktrin, ekonomi Islam bukanlah sebuah ilmu yang menafsirkan realita yang ada dengan memberikan penjelasan kehidupan, peristiwa dan fenomena ekonomi serta menghubungkannya dengan sebab-sebab dan faktor-faktor umum yang menentukannya.

Demikian juga dengan sistem ekonomi kapitalisme maupun sosialisme. Kedua sistem ini juga lebih merupakan doktrin, yang menjadi pedoman perilaku ekonomi (ideologi) masyarakat, daripada sebuah ilmu. Misal, dengan doktrinnya, kapitalisme membuat rumusan nilai berwujud pasar bebas yang mengorganisir para pelaku ekonomi untuk bebas melakukan bisnis. Melalui pasar bebas ini, para penjual dirakit untuk menentukan harga komoditasnya secara bebas.⁵⁶ Peran pemerintah dalam hal ini, hanya sebatas sebagai fasilitator dan penjaga keamanan keberlangsungan pasar bebas tersebut dari ancaman-ancaman luar yang mengganggu berjalannya mekanisme pasar tersebut, seperti peperangan, gempa bumi, dan lain-lain. Dalam sistem sosialisme juga dapat dilihat, misalnya, doktrin adanya sistem komando dalam pembangunan ekonomi. Kebebasan individu ditekan dan hanya diarahkan pada kepentingan bersama yang diprogramkan secara hirarkhis dari pemerintah. Dimensi keilmuan yang terbangun dari realita ini hanya berkuat pada pemahaman atas fenomena, gejala, dan sebab-sebab yang harus dibenahi untuk selalu selaras dengan doktrin umum kedua sistem ekonomi tersebut, bukan pada pencarian alternatif keilmuan baru yang menggantikan posisi kedua sistem ekonomi tersebut. Oleh karena itu, dapatlah dimaklumi jika sistem kapitalis mendasarkan paradigma berpikirnya pada ideologi kapitalisme dan sistem sosialis pada ideologi marxisme, kemudian sistem ekonomi Islam mendasarkan paradigmanya pada ideologi Islam.

⁵⁶ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 92.

Ideologi Islam lahir dari nilai-nilai dan aturan-aturan yang terkandung dalam al-Qur'an dan Hadits serta ijtihad para ulama. Nilai dan aturan yang terkandung dalam sumber-sumber tersebut membentuk kode etik ekonomi yang menjadi panduan dasar manusia dalam melakukan aktifitas ekonomi. Secara garis besar isi kandungan dalam sumber ideologi Islam tersebut adalah akidah (spiritual), ibadah (ritual) dan akhlak (moral) dan muamalah (kemasyarakatan).

Dari beberapa aspek yang terkandung dalam sumber ideologi Islam tersebut dapat dilihat bahwa sumber tersebut sangat lengkap, tidak saja berisi tentang hubungan manusia dengan manusia tetapi juga manusia dengan Tuhannya. Di samping juga keempat aspek di atas dapat memberikan rekomendasi terbangunnya hakikat eksistensi manusia di dunia yang memiliki ketangguhan secara moral, material dan spiritual.⁵⁷

2. Prinsip dasar ekonomi Islam

Islam tidak melarang adanya perbedaan pandangan mengenai sesuatu yang berhubungan dengan masalah selain akidah. Sebab perbedaan pandangan dalam Islam merupakan rahmat. Demikian pula perbedaan pandangan dalam hal pengertian dan dimensi ekonomi Islam. Karena masing-masing memiliki pandangan dan dasar hukum atau rasionalitas dalam memandang ekonomi Islam sebagai suatu disiplin kajian. Islam memiliki suatu konsep yang utuh yang berkaitan dengan ekonomi, akan tetapi pengkajian tentang ekonomi Islam belum dikaji secara komprehensif. Ketentuan-

⁵⁷ Adiwirman A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2002).

ketentuan yang ada masih bersifat normative konseptual, oleh karenanya dibutuhkan ahli-ahli ekonomi dan syariah untuk mengkaji ekonomi Islam sehingga tidak hanya sebatas konseptual semata, akan tetapi menjadi sebuah sistem operasional dan pemenuhan kebutuhan umat manusia.

Ekonomi adalah persoalan manusia yang selalu berkembang sesuai dengan konteksnya. Hal ini memerlukan pemikiran baru untuk pemecahan berbagai permasalahannya yang selalu berkembang cepat. Artinya ijtihad merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan. Prinsip-prinsip ekonomi Islam adalah seperangkat ajaran Islam yang mendasari dan menjadi acuan segala aktivitas ekonomi manusia (umat Islam). Beracu dari pengertian ekonomi sebagai kegiatan manusia memenuhi kebutuhannya, maka pemikiran dasar ekonomi Islam dapat dikemukakan bahwa Allah menciptakan alam dan manusia. Sebagai pencipta, dia juga adalah pemelihara makhluk termasuk manusia. Dalam kaitan ini Allah memberikan kewenangan kepada manusia untuk mengelola dan mengatur lingkungan dan kehidupannya serta manusia adalah *khalifah* Allah. Dengan demikian, apa yang terdapat di bumi adalah amanah Allah kepada manusia, dengan kewenangan yang dimilikinya manusia mengelola alam lingkungannya dan memanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.

Islam memandang bahwa berusaha atau bekerja merupakan bagian integral dari ajaran Islam. Terdapat sejumlah ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi yang menjelaskan pentingnya aktivitas usaha, di antaranya; "Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah di muka bumi. Dan

carilah karunia Allah”.⁵⁸ “Sungguh seandainya salah seorang di antara kalian mengambil beberapa utas tali kemudian pergi ke gunung kemudian kembali memikul seikat kayu bakar dan menjualnya, kemudian dengan hasil itu Allah mencukupkan kebutuhan hidupmu, itu lebih baik daripada meminta-minta kepada sesama manusia, baik mereka memberi maupun tidak”.⁵⁹ Pernah Rasulullah ditanya oleh sahabat, “Pekerjaan apa yang paling baik wahai Rasulullah?, Rasulullah menjawab, seorang bekerja dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang bersih”. Hadis yang lain, “Pedagang yang jujur lagi terpercaya adalah bersama-sama Nabi, orang-orang jujur, dan para syuhada”,⁶⁰ Ayat dan Hadis-hadis di atas menunjukkan bahwa bekerja mencari rezeki adalah aktivitas yang inheren dalam ajaran Islam. Tentu mencari rezeki dalam konteks ajaran Islam bukan untuk semata-mata memperkaya diri.

Islam memandang bahwa yang terpenting bukanlah pemilikan benda, tetapi kerja itu sendiri. Doktrin Al-Qur'an yang membentuk motivasi yang tinggi dalam bekerja umat Islam antara lain tercermin dalam QS Al-Mulk: 15:⁶¹

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

⁵⁸ QS. Al-Jumua (62): 10.

⁵⁹ Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Beirut: Dar al-Hadits, 1997), Juz III, 129.

⁶⁰ Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah* (Beirut: Dar Ihya Al-Turas Al-Arabi, 2000), 165.

⁶¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2010).

Artinya: Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.

Ayat di atas memberi kesimpulan, pertama, bahwa bumi ini semua milik Allah, tetapi dianugerahkan kepada manusia. Kalimat “milik Allah” sebenarnya dapat dipahami bahwa bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya bukan milik perseorangan karena kekuasaannya, melainkan untuk semua orang. Dalam konteks masyarakat feodal, Islam bermaksud menghilangkan “sistem upeti” di mana tanah dianggap milik raja, tiran atau penguasa feodal. Sebagai alternatif Al-Qur'an mengajarkan doktrin kemakmuran bersama. Kedua, ayat itu menimbulkan etos yang mendorong umat Islam untuk mengembara ke seluruh bumi mencari rezeki Allah. Pada QS Al-Baqarah (2): 22 Allah menyediakan sarana kehidupan baik dalam bentuk materi maupun non materi bagi umat manusia untuk menjalani kehidupan sebagaimana firmanNya: “Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagi kamu dan langit sebagai atap”. (QS Al-Baqarah [2]: 22).

Dengan bumi sebagai hamparan umat manusia dapat berusaha untuk mengadakan sesuatu untuk pemenuhan kebutuhannya, dan ayat ini pula menjelaskan betapa Allah memudahkan manusia dalam mencari rezeki dengan mengkaruniakan sumber kehidupan yakni air, yang dapat menghidupkan makhluk-makhluk yang ada di muka bumi. Pada QS Al-Baqarah; 21, Allah menjelaskan penciptaan manusia dan orang-orang sebelum manusia, serta

memperlihatkan kekuasaan Allah kepada manusia agar manusia selalu beribadah, mengingat Allah yang telah menciptakan manusia.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُونَ

Artinya: *Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa, (QS Al-Baqarah; 21).*⁶²

Secara khusus, prinsip-prinsip ekonomi Islam sebagai berikut:⁶³

- a. Tauhid. Keyakinan dasar manusia adalah Iman kepada Allah yang Esa, yang memelihara manusia dengan memberi rezeki manusia berdasarkan usahanya. Rezeki adalah ungkapan produk manusia yang dapat berwujud benda material ataupun immaterial (jasa dan pengetahuan). Kegiatan produksi harus berdasarkan aturan dan ajaran Islam. Demikian pula halnya dengan kegiatan konsumsi. Penyimpanan dari moral tersebut tidak mewujudkan rububiah Allah, justru sebaliknya kehancuran lingkungan dan kesengsaraan manusia yang muncul. Penyelenggaraan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan ajaran dan aturan Islam merupakan ibadah sebagai aktualisasi *tauhid uluhiyah*.

⁶² *Ibid*,

⁶³ Musa Asy'ari, *Islam: Etos Kerja Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Jogjakarta: LESFI, 1997), 63.

- b. Istikmar dan Istikhlaf. Kedua konsep ini ditemukan masing-masing dalam QS Hud (11): 60 dan QS Al-An'am (6): 165. Prinsip ini mengandung makna manusia diberi kewenangan mengelola bumi dan isinya (QS Al Baqarah, [2]: 29) dan dalam pengelolaan itu manusia dibebani tugas menerapkan aturan-aturan agama dan mengembangkan norma-norma dari ajaran-ajaran agama (QS Al-Baqarah [2]: 30, QS Shad, [38]: 26). Dengan prinsip ini maka segala nikmat yang dimiliki manusia adalah amanah dari Allah. Implikasi prinsip ini adalah adanya kebebasan berkarya dan berproduksi (sebagai manifestasi hak Istikmar) tetapi bertanggung jawab sebagai manifestasi hak istikhlaf. Implikasi lebih lanjut dari prinsip-prinsip ini adalah adanya aspek pengawasan dalam sistem ekonomi Islam.
- c. Kemaslahatan dan keserasian. Kemaslahatan di sini bukanlah dalam arti kegunaan belaka. Maksudnya hasil produksi bukan saja bermanfaat tetapi juga tidak menimbulkan kerusakan. Dan ini dapat terwujud jika kegiatan ekonomi (produksi, distribusi dan konsumsi) sesuai dengan aturan-aturan dan ajaran-ajaran agama dan juga dengan hukum perundang-undangan. Dengan begitu maka kegiatan ekonomi akan harmoni dengan lingkungan manusia. Ia diterima oleh Allah sebagai suatu pengabdian memenuhi kebutuhan manusia dan tidak merusak lingkungan. Prinsip kemaslahatan dapat ditemukan dalam QS Al-A'raf, (7): 56 dan 85. Sedangkan prinsip

keseimbangan dapat ditemukan dalam QS Al-Hadid (57): 58.

- d. Keadilan. Prinsip ini mengandung makna seluruh proses kegiatan ekonomi harus berdasarkan hukum agama dan hukum qanuni. Hal ini dipahami dari QS Al-Hadid (57): 25 yang menegaskan bahwa para rasul diutus Allah dengan tujuan agar manusia hidup di atas keadilan (norma-norma hukum). Sebab tanpa hukum masyarakat akan kacau dan rusak.
- e. Kehidupan sejahtera dan kesentosaan dunia akhirat. Prinsip ini relevan dengan tujuan ekonomi Islam. Ini berarti segala kegiatan ekonomi bukanlah sekadar memenuhi kebutuhan hidup, tetapi lebih jauh lagi kegiatan yang memberikan nilai tambah dalam kehidupan manusia, yakni kehidupan yang dimiliki sekarang mempunyai daya akselerasi kehidupan selanjutnya dan juga memberikan kesentosaan dalam kehidupan dunia dan akhirat.⁶⁴

Konsep pembangunan ekonomi yang Islami merupakan kegiatan yang berorientasi kepada tujuan dan dilandasi oleh kesadaran akan adanya nilai, moral yang bersandar pada ajaran ilahiah yang diarahkan pada peningkatan martabat kemanusiaan secara sempurna dalam segala aspeknya. Moral spiritual menjadi bagian fundamental bagi kegiatan ekonomi, untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih adil dan seimbang, melalui tatanan kehidupan politik dan kebudayaan yang berdimensi kemanusiaan.

⁶⁴ Ma'zumi, "Maqashid Syari'ah Dalam Perilaku Ekonomi," *Journal of Islamic Economics, Finance and Banking* 3, no. 1 (2019).

Keberhasilan sistem ekonomi Islam terletak pada sejauh mana keselarasan atau keseimbangan yang dapat dilakukan di antara kebutuhan material dan kebutuhan etika moral manusia. Sistem ekonomi Islam tidak melupakan ciri pokok kemajuan manusia yang bergantung kepada sejauhmana kelancaran koordinasi dan keharmonisan di antara aspek moral dan material dalam kehidupan manusia, apabila aspek moral dipisahkan dari perkembangan ekonomi, maka ia akan kehilangan kontrol yang berfungsi menjaga kestabilan dan keseimbangan dalam sistem sosial. Apabila dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi tidak mempunyai batas-batas moral yang jelas dan menuju pada paham materialis, amoralitas dan korupsi, yang mengakibatkan goyahnya kestabilan ekonomi masyarakat.⁶⁵

Al-Qur'an sebagai sumber ajaran yang komprehensif telah memberikan kebebasan kepada pemeluknya dalam membangun ekonominya, terjun langsung ke bidang-bidang tertentu disesuaikan dengan keahlian yang dimiliki dan yang bisa menguntungkan pada dirinya, asalkan dengan cara yang baik dan terhormat serta mengikuti aturan main yang menjadi pijakan masyarakat, dan tidak menyimpan dari ketentuan syariah. Seseorang harus menghormati hak-hak orang lain dan mengikuti prosedur yang berlaku sehingga tidak ada yang merasa dirugikan, bahkan sama-sama mendapat keuntungan karena keberadaan alam dan isinya ini memang untuk kepentingan dan kemaslahatan umat manusia secara bersama-sama, tidak ada yang harus memonopoli. Allah berfirman:

⁶⁵ Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*.

Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu (QS Al-Baqarah [2]: 29). Namun untuk memperolehnya umat Islam harus bekerja keras mencari nafkah untuk keperluan hidupnya dengan dasar kebaikan, artinya tidak boleh menipu, memalsu, curang, tidak boleh merebut atau merampas, tidak boleh memaksa dan lainnya, bahkan wajib berbuat kebajikan kepada orang lain, menyenangkan dan menggembarakan orang lain. Islam tidak membatasi kekayaan seseorang, sebab kekayaan tersebut menjadi kesenangan bagi sebagian umat manusia, akan tetapi Islam mempunyai peraturan-peraturan yang mengatur kekayaan tersebut.⁶⁶

Berpijak dari landasan ini, maka ada keharusan bagi setiap umat Islam sebelum mengkaji ekonomi Islam terlebih dahulu mengkaji asas dan dasar hukum Islam. Agar dalam berekonomi tidak keliru melangkah, maka umat ini harus memahami syariat Islam lebih dahulu walaupun pada taraf yang lebih rendah, utamanya yang menyangkut masalah-masalah muamalah atau ekonomi. Hal ini adalah wajib, karena pada dasarnya syariat Islam adalah suatu sistem norma Ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama manusia, hubungan manusia dengan alam lainnya dengan tujuan melindungi jiwa, pikiran, harta, keturunan, dan kehormatan.⁶⁷

Berkaitan dengan sistem ekonomi Islam, Baqir Sadr memandang ekonomi Islam, terdapat beberapa fokus pembahasan meliputi: 1. Definisi ekonomi Islam (usaha

⁶⁶ Adiwirman A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*.

⁶⁷ Muhammad, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam* (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2007).

penemuan doktrin ekonomi Islam). 2, Karakteristik ekonomi Islam. 3, Teori produksi 4, Teori distribusi kekayaan dan 5, Tanggung jawab pemerintah dalam bidang ekonomi. Lebih lanjut peran pemerintah ini berkenaan dengan upaya mewujudkan kesejahteraan di tengah-tengah kehidupan manusia. Dua peran pemerintah yang penting dalam hal ini adalah mewujudkan jaminan sosial dan keseimbangan sosial. Sistem ekonomi Islam sebagai bagian dari keseluruhan sistem yang *Islamic* dan tetap menekankan bahwa sistem ekonomi Islam harus dipelajari sebagai satu keseluruhan inter disiplinernya bersama-sama dengan para anggota masyarakat sehingga terbentuk agen-agen dari sistem tersebut. Lebih lanjut pemikiran yang Islami perlu untuk dipelajari dan dipahami sebelum seseorang secara sungguh-sungguh melakukan suatu analisa yang mendalam tentang sistem ekonomi Islam. Dalam doktrin ekonomi Islam, manusia mempunyai dua potensi keinginan yang berlawanan (pribadi dan sosial) sehingga masalahpun muncul dan melihat solusi ada di dalam agama, karenanya agama mempunyai peran yang sangat penting di dalam sistem ekonomi. Sementara pandangan penganut paham Marxisme tentang masyarakat dan perubahan, di mana pandangan masyarakat menyatakan penggolongan itu akan berpotensi menimbulkan konflik yang berlawanan karena ketidakcocokan mengubah gaya-gaya produksi dengan hubungan-hubungan produksi.⁶⁸

⁶⁸ Choirul Huda, "Ekonomi Islam Dan Kapitalisme: Merunut Benih Kapitalisme Dalam Ekonomi Islam," *Economica* VII, no. 1 (2016): 30.

Selanjutnya untuk mewujudkan keseimbangan sosial, harus didasarkan pada dua asumsi dasar. Pertama fakta kosmik dan fakta doktrinal. Fakta kosmik merupakan suatu perbedaan yang eksis ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Fakta yang tidak bisa diingkari oleh siapapun bahwa setiap individu secara alamiah memiliki bakat dan potensi yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut dalam satu titik pada akhirnya akan melahirkan perbedaan dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, perbedaan tersebut dikenal dengan strata sosial. Dari hal ini, tidak dapat dibenarkan bahwa perbedaan yang bersifat bawaan atau kosmik di atas merupakan hasil dari proses sejarah yang bersifat eksidental, sebagaimana Marx dan para pengikutnya memaknai proses tranformasi sistem kehidupan masyarakat dari tingkatan komunal menuju sistem puncak yakni komunisme adalah berakar dari proses dialektis dalam relasi produksi (interaksi ekonomi). Adapun fakta doktrinal adalah hukum distribusi yang menyatakan bahwa kerja adalah salah satu instrument kepemilikan pribadi yang membawa konsekwensi atas segala sesuatu yang melekat padanya. Dari hal tersebut diatas, maka konsep keseimbangan sosial dalam Islam adalah konsep keseimbangan yang harus didasarkan pada dua asumsi dasar di atas.⁶⁹

⁶⁹ Terdapat beberapa karya Baqir Sadr yang sering dikutip terkait pandangannya terhadap ekonomi, diantaranya adalah *Falsafatuna* dan *Iqtishaduna* yang berisikan kritik yang serius terhadap aliran marxisme dan kapitalisme. Baca: Choiriyah, "Pemikiran Ekonomi Muhammad Baqir Ash Shadr," *Islamic Banking* 2, no. 1 (2016).

3. Dasar *ijtihad* ekonomi Islam

a. *Maqashid syari'ah*

Maqashid merupakan bentuk *jama'* dari *maqshud*, asal katanya *maqshud* yang berarti yang menghendaki atau memaksudkan. Jadi *maqashid syari'ah* menurut etimologi adalah tujuan/maksud disyariatkannya hukum dalam Islam. Menurut Zuhaili⁷⁰ *Maqashid ssy-syari'ah* adalah makna-makna atau tujuan-tujuan yang telah ditetapkan bagi *syara'* dalam seluruh hukum-hukumnya. *Maqashid asy-syari'ah* berarti juga tujuan akhir dari syariah dan rahasia-rahasia yang telah ditetapkan oleh pembuat *syara'* mengenai kecenderungan kecenderungan hukumnya. Sedangkan menurut terminology, *maqashid syari'ah* adalah tujuan disyariatkannya hukum Islam guna memelihara kemaslahatan umat manusia di dunia dan di akhirat baik berupa mendatangkan manfaat maupun menghindarkan *mudharat*.⁷¹ Contohnya, seperti diwajibkannya shalat, zakat, puasa, haji, begitu pula dengan persoalan muamalat yang kesemuanya mengandung maksud-maksud tertentu sebagai tuntutan bagi manusia di dunia sebagai bekal untuk akhirat. Seluruh hukum yang dibebankan kepada manusia

⁷⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Wajiz Fi Ushul Fiqh* (Beirut: Dar al-Fikr, 2003).

⁷¹ Abdurrahman Ba Bakr, *Dirasat Tathbiqiyyah Haula Falsafah Al-Maqashid Fi as-Syari'ah Al-Islamiyah* (Beirut: Dar al-Fikr, 2007).

senantiasa mengacu pada *maqashid al-syariah*, yaitu berupa terwujudnya suatu kemaslahatan.⁷²

Maqashid al-syari'ah merupakan cara untuk menjelaskan tujuan dan rahasia syariat. Dalam rangka menjelaskan tujuan dan rahasia syariat itu, kata *maqashid* kadang-kadang digabungkan dengan *al-syariat* (syariat) dan kadang-kadang digabungkan dengan *al-syari'* (pembuat syariat) dengan maksud dan pengertian yang sama. Artinya *maqashid al-syari'* dan *maqashid al-syari'ah* adalah dua istilah yang mempunyai maksud dan pengertian yang sama, yaitu maksud-maksud ditetapkan suatu hukum dalam kehidupan umat manusia.⁷³

Pemahaman terhadap *maqashid al-syari'ah* sangat penting dalam kehidupan manusia yang senantiasa berkembang dan berubah sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman, terkhusus pada persoalan-persoalan ekonomi. Perkembangan zaman tentunya akan membawa banyak permasalahan baru yang tidak semuanya mendapat penyelesaian secara eksplisit dalam Al Qur'an maupun Hadis Nabi, oleh karena itu dituntut adanya upaya untuk memahami kandungan maksud yang terdapat Al-Qur'an dan Hadis. Sehingga hukum-hukum

⁷² Muhammad Yafiz, "Internalisasi Maqashid Syari'ah Dalam Ekonomi Menurut M. Umer Chapra," *Abkam: Jurnal Ilmu Syariah* XV, no. I (2015).

⁷³ Iffatin Nur, Syahrul Adam, M. Ngizzul Muttaqien, "Maqasid Al-Shari'at: The Main Reference and Ethical Spiritual Foundation for the Dynamization Process of Islamic Law," *Abkam: Jurnal Ilmu Syariah* 20, no. 2 (2020).

yang dihasilkan tetap *up to date* dengan permasalahan yang muncul.⁷⁴

Menurut Al-Ghazali,⁷⁵ tujuan-tujuan syariah adalah untuk mencapai dan merealisasikan manfaat dan semua kepentingan umat manusia, tujuan-tujuan tersebut dapat ditelusuri dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang mengandung rumusan hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan manusia. Bagi Al-Ghazali manfaat harus harmonis dan konsisten dengan *maqashid* demi menjaga kepentingan manusia dari hal-hal yang tidak diinginkan, bagi Al-Ghazali tujuan syariah terletak pada lima yaitu: agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan kekayaan (*mal*), yang sering disebut *al-kulliyat al-khamsah*. Konsep *maqashid* dapat diaplikasikan dan memiliki signifikansi dalam berbagai kajian ilmu, baik kajian klasik maupun kajian-kajian ilmu-ilmu modern, termasuk ekonomi Islam. Untuk menyusun sebuah konsep ekonomi Islam maka tidak bisa lepas dari *maqashid*. Ekonomi dalam Islam disusun tanpa mengesampingkan realitas, namun tetap dibingkai dengan *maqashid*, karena *maqashid* berupaya untuk mengaplikasikan kandungan hukum-hukum dengan aspirasi yang manusiawi.⁷⁶

⁷⁴ Achmad Musyahid, "Diskursus Maslahat Al-Mursalah Era Milenial: Tinjauan Filosofis Terhadap Konsep Maslahat Imam Malik," *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019).

⁷⁵ Muhammad Ibn Muhammad Al-Ghozali, *Al-Mustasyfa Min Ilmil Ushul* (Beirut: Dar al-Fikr, 1999), 287.

⁷⁶ Arif Nur'aini & Muhammad Ngizzul Muttaqin, "Istihsan Sebagai Metode Istimbath Hukum Imam Hanafi Dan Relevansinya

b. Kemaslahatan

Secara umum ulama *ushuliyyun* sepakat bahwa kemaslahatan boleh dijadikan sebagai sumber hukum manakala Al-Qur'an ataupun Hadis tidak menjelaskan status hukum sebuah objek perbuatan. Kalaupun terjadi *ikhtilaf* di antara mereka tampak sekali bahwa perbedaan itu hanyalah dari segi penggunaan istilah, sementara terhadap substansi kemaslahatan sebenarnya sepakat (*ittifaq*) akan keujjahannya. Perbedaan kecil terdapat pada syarat -syarat keujjahan *maslahah* agar bisa dijadikan sebagai dasar hukum. Imam Malik mensyaratkan bahwa *maslahah* tersebut haruslah: pertama, rasional (*ma'qul al-ma'na*) dan relevan (*munasib*) dengan kasus hukum yang ditetapkan. Kedua, *maslahah* juga harus bertujuan memelihara sesuatu yang dharuri (sifatnya darurat) dan menghilangkan kesulitan. Ketiga, *maslahah* haruslah bersesuaian dengan maksud disyariatkannya hukum (*maqashid al-tasyri'*) dan tidak bertentangan dengan nash yang dalalahnya *qath'iy* (dalilnya telah jelas).⁷⁷

Sementara Imam al-Ghazali mensyaratkan berlakunya *maslahah* itu dengan tiga hal, pertama, *maslahah* itu harus masuk kategori peringkat *dharuriyat*, kedua, *maslahah* itu bersifat *qath'iy* dalam artian *maslahah*

Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah," *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 30, no. 1 (2020).

⁷⁷ Ahmad Mifidiol Muthohar, *Analisis Preferensi Berkah Dalam Kecenderungan Pilihan Berzakat Ke Lembaga Zakat Di Jalur Joglosemar* (Jogjakarta: Disertasi UIN Sunan Kalijaga, 2014).

itu bukan didasarkan atas dugaan (*zhan*) semata, ketiga, *mashlahah* itu bersifat kulliy artinya *mashlahah* itu bisa diterapkan atau meliputi seluruh kemaslahatan orang banyak/umum. Hal ini baik persyaratan yang dikemukakan oleh Imam Malik ataupun Imam al-Ghazali, keduanya sangat berkait erat dengan *maqashid al-syariah*. Ungkapan Imam Malik bahwa *mashlahah* itu harus sesuai dengan tujuan disyariatkan hukum demikian pula al-Ghazali yang menyatakan bahwa *mashlahah* itu harus bertujuan untuk memelihara kepentingan yang sifatnya *dharuriyah* mengindikasikan hubungan yang jelas dengan *maqashid al-syari'ah*.⁷⁸

Ilmu Ekonomi harusnya menyelesaikan persoalan-persoalan kebutuhan manusia, baik mengatasi kemiskinan, kelangkaan ataupun persoalan kebutuhan secara mikro maupun makro, sehingga ilmu ekonomi dapat mencapai falah yang diukur dengan *mashlahah*. Ada tiga aspek dasar dalam ekonomi yaitu; konsumsi, produksi dan distribusi. Ketika tiga aspek ini dikelola dalam ekonomi Islam maka pertama, konsumsi; umat dituntut untuk memilih dan memutuskan apa, bagaimana dan kapan dibutuhkan sehingga *mashlahah* dapat diwujudkan. Kedua, produksi; apa, bagaimana caranya barang itu dihasilkan agar tercapai *mashlahah*. Ketiga, distribusi: apa, bagaimana distribusi itu dapat menghasilkan *mashlahah* kepada umat.

⁷⁸ Muhammad Ibn Muhammad Al-Ghazali, *Al-Mustasfa Min Ilm Ushul* (Mesir: Maktabah al-Jumdiyah, 2010).

c. Keberkahan

Kata berkah dalam bahasa Arab, yakni *barakah* yang artinya tumbuh dan tambah, Ahmad bin Muhammad bin Ali al-Maqry menjelaskan bahwa berkah artinya bertambah dan tumbuh. Menurut kamus bahasa Indonesia, berkah adalah karunia Tuhan yang mendatangkan kebahagiaan bagi kehidupan manusia. Pada kalimat “*rahmatullahi wabarakatuh*” artinya semoga rahmat Allah dan berkahnya, barakah dalam kalimat di atas artinya kebahagiaan. Kriteria berkah adalah harta yang halal yang didapat dengan cara halal pula. Artinya zat (benda) dan cara mendapatkan harta benda sesuai dengan ajaran agama, begitu pula dengan pendistribusian harta harus pula dengan cara halal, salah satu contohnya adalah mengeluarkan zakat dari harta dengan tujuan harta berkah. Dalam ilmu ekonomi dikenal istilah Multiplier, Konsep Multiplier dalam Islam dapat ditemukan di beberapa ayat di dalam Al-Qur’an, di antaranya; QS Al-An’am: 160. “Barangsiapa membawa amal yang baik, maka baginya (pahala) sepuluh kali lipat amalnya; dan barangsiapa yang membawa perbuatan jahat maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan)”.⁷⁹

Dalam Ayat ini dijelaskan bahwa barangsiapa yang datang satu kebajikan, maka untuknya adalah sepuluh kali ganda. Ayat ini diperintahkan kita masing masing

⁷⁹ Musa Asy’ari, *Islam: Etos Kerja Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*.

memperbanyak berbuat baik. Artinya ialah barangsiapa yang datang kepada Tuhan di hari kiamat dengan sifat-sifat yang baik, maka ia akan mendapat ganjaran atau pahala dari sisi Allah QS Al-Baqarah (2): 261. Ayat di atas memperlihatkan akan keuntungan pendapatan berganda pada setiap aktivitas ekonomi. Dalam konsep ekonomi Islam, kebijakan fiskal bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama. Konsep fikih zakat menyebutkan bahwa sistem zakat berusaha untuk mempertemukan pihak surplus Muslim dengan pihak deficit Muslim.⁸⁰ Hal ini dengan harapan terjadi proyeksi pemerataan pendapatan antara surplus dan deficit Muslim atau bahkan menjadikan kelompok yang deficit (mustahik) menjadi surplus (*muzakki*). Zakat bukanlah satu kegiatan yang semata-mata untuk tujuan duniawi, seperti distribusi pendapatan, stabilitas ekonomi dan lainnya, tetapi juga mempunyai implikasi untuk kehidupan akhirat.⁸¹

Konsep multiplier semestinya diambil sebagai konsep untuk mensejahterakan umat, seperti halnya yang dipahami dari ayat yang telah diuraikan bahwa kebaikan

⁸⁰ Asep Saepudin Jahar, "Marketing Islam Through Zakat Institutions in Indonesia," *Studia Islamika: Indonesian Journal for Islamic Studies* 22, no. 3 (2015).

⁸¹ Fahmi Yunus Hafas Furqani, Ratna Mulyany, "Zakat for Economic Empowerment of The Poor in Indonesia: Models and Implications," *IQTISHADIA: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam* 11, no. 2 (2018).

akan bernilai ganda seperti hanya ketika menanam sebutir biji yang nantinya akan menjadi sebatang pohon yang memiliki tangkai dan setiap tangkai memiliki puluhan buah. Zakat tidak semestinya hanya dipandang sebagai pemberian akan tetapi lebih dari itu yakni sebagai investasi dunia dan akhirat, ketika zakat di jadikan investasi maka akan memunculkan pertambahan pendapatan bagi kaum miskin, memberikan peluang kepada mereka untuk produktif. Dengan tingginya produktivitas maka akan memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi. Pada kurva di bawah ini akan menunjukkan zakat sebagai bentuk investasi yang akan memberikan dampak ganda bagi pendapatan atau peningkatan profit. Berlakunya zakat sebagai investasi membawa implikasi pada perubahan pendapatan/profit antar kelompok masyarakat, perubahan pendapatan merupakan gambaran atas kesejahteraan masyarakat. Dengan perilaku muzakki yang mengeluarkan zakat, infak dan sedekah yang dipahami sebagai investasi maka menambah pendapatan/penerimaan para mustahik, sehingga mustahik memiliki peluang untuk investasi, melakukan usaha produktif.⁸²

Bahwa satu kebaikan akan memberikan efek ganda menjadi puluhan kebaikan dan satu biji akan memunculkan puluhan, ratusan buah. Demikian pula zakat konsumtif maupun zakat produktif akan meningkatkan pertumbuhan perekonomian selama penurunan permintaan segmen kaya diimbangi oleh

⁸² Choiriyah, "Pemikiran Ekonomi Muhammad Baqir Ash Shadr."

peningkatan volume perdagangan segmen miskin yang lebih besar.⁸³

⁸³ Muhammad, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*.

BAGIAN III

Strategi Peningkatan Kreativitas Kelompok Tani

Strategi Peningkatan Kreativitas Kelompok Tani di Kabupaten Tulungagung dalam Menghadapi Kebijakan *Green Economy*

Dalam konteks pertanian kontemporer, *green economy* merupakan konstruksi yang sangat kompleks dalam hal upayanya untuk mengintegrasikan masalah ekonomi, lingkungan, dan social. Hal ini menunjukkan adanya bentuk tata kelola yang diperlukan untuk mengatur proses penghijauan lingkungan. Dengan demikian, hal ini menimbulkan tantangan empiris dan teoritis baru bagi representasi sektor pertanian pada aspek masa depan sosial lingkungan. Sektor pertanian sendiri dalam konteks Indonesia memiliki peran penting untuk menumbuhkan perwujudan lingkungan hijau yang berorientasi pada kesehatan masyarakat.

Pelaksanaan *green economy* sendiri di Kabupaten Tulungagung berorientasi pada pelaksanaan sektor pertanian yang merepresentasikan adanya program pertanian yang mengedepankan perlindungan lingkungan. Pelaksanaan sektor pertanian tidak hanya berorientasi pada peningkatan komoditas pertanian bagi petani, melainkan lebih daripada itu untuk memberikan dampak lingkungan yang positif pada citra penghijauan lahan. Hal ini sebagaimana dilaksanakan oleh

kelompok tani di Kabupaten Tulungagung yang melihat adanya pertumbuhan dan potensi pertanian maupun perkebunan yang berorientasi pada stabilitas ekosistem masyarakat.

“Sebagai masyarakat desa, saya melihat ekonomi hijau merupakan gagasan untuk menumbuhkan kembali potensi-potensi sektor pertanian dan perkebunan. Sektor ini menjadi salah satu pemangku aspek ekonomi yang mampu memberikan pemasukan pada masyarakat serta menimbulkan penghijauan kembali alam yang berfungsi untuk stabilitas ekosistem alam”.⁸⁴

Pemahaman tentang aktualisasi green economy pada dasarnya untuk mewujudkan hubungan sektor pertanian dan kelestarian alam. Hal ini bisa diwujudkan melalui penerapan praktik pertanian berkelanjutan dengan mengutamakan efisiensi penggunaan sumber daya dan pengurangan limbah serta peningkatan produktivitas pertanian yang tidak merusak lingkungan. Pada pelaksanaannya, green economy juga melakukan pendorongan terhadap penggunaan teknologi ramah lingkungan dengan upaya kegiatan yang mengurangi dampak negatif bagi kelestarian lingkungan. Oleh karenanya, hubungan integrasi antara sektor pertanian dan kelestarian alam menjadi sarana untuk melakukan pembangunan ekonomi yang inklusif secara berkelanjutan dengan kelestarian alam.

“Dalam pengamatan saya, tentu perwujudan ekonomi hijau memiliki hubungan erat dengan sektor pertanian. Selama ini di wilayah ini, sektor pertanian menjadi salah satu sarana untuk memberikan penghijauan terhadap lingkungan serta menjadi salah satu ladang perekonomian bagi masyarakat. Sektor pertanian juga

⁸⁴ Wawancara dengan Bapak Nur Anwar, Ketua Kelompok Tani Teratai Emas Jaya, Bandung Tulungagung, Juni-Juli 2024.

berfungsi sebagai edukasi bagi kesehatan lingkungan tentang pentingnya ekosistem keseimbangan alam berbasis tanaman”.⁸⁵

Dalam praktiknya, untuk mendukung green economy dalam sektor pertanian dibutuhkan kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah menjadi penentu dalam pelaksanaan sektor pertanian secara inklusif.

“Beberapa forum yang saya ikuti dan diselenggarakan oleh pemerintah daerah hingga ke desa maupun dinas terkait, selalu mengedukasi akan pentingnya peningkatan pertanian sebagai sarana penyeimbang antara sektor ekonomi dan ekosistem lingkungan. Beberapa forum yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun dinas terkait juga memberikan kebijakan tentang akselerasi lahan pertanian dan pemanfaatannya untuk mendukung perekonomian masyarakat dan ekosistem lingkungan. Tentu ini menjadi hal yang positif untuk menyongsong kembali ekosistem lingkungan yang mampu memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat”.⁸⁶

Hal di atas tentu untuk memberikan dampak positif terhadap keberlangsung sektor pertanian yang ramah lingkungan.

“Selama ini yang saya rasakan, praktik kebijakan green economy direalisasikan melalui beberapa kebijakan seperti subsidi pupuk organik, pelatihan dan edukasi pertanian ramah lingkungan, penggunaan teknologi ramah lingkungan, pengolahan dan pengelolaan limbah pertanian, akses penjualan pertanian yang ramah lingkungan, kredit hijau dan pendanaan berkelanjutan,

⁸⁵ Wawancara dengan Bapak Nur Anwar, Ketua Kelompok Tani Teratai Emas Jaya, Bandung Tulungagung, Juni-Juli 2024.

⁸⁶ Wawancara dengan Bapak Nur Anwar, Ketua Kelompok Tani Teratai Emas Jaya, Bandung Tulungagung, Juni-Juli 2024.

pengelolaan sumber daya air, dan penghijauan konservasi tanah berbasis agribisnis berkelanjutan serta kemitraan dengan masyarakat pegiat lingkungan”.⁸⁷

Dalam pelaksanaannya, kebijakan green economy dilakukan oleh kelompok tani. Pelaksanaan kebijakan oleh kelompok tani memiliki peran untuk mengadopsi dan menerapkan praktik-praktik pertanian berkelanjutan. Kelompok tani di Kabupaten Tulungagung berfungsi sebagai agen perubahan yang mempromosikan pelaksanaan pertanian dengan pengelolaan sumber daya alam. Praktik ini mendukung dan berkolaborasi dengan pemerintah untuk mewujudkan green economy yang bermanfaat bagi stabilitas lingkungan.

“Kelompok tani di daerah tani merespons kebijakan green economy dengan beragam cara yang positif dan konstruktif. Banyak petani menyambut baik program ini karena mereka melihat manfaat jangka panjang bagi tanah dan hasil pertanian mereka. Mereka mulai mengadopsi praktik pertanian berkelanjutan, seperti penggunaan pupuk organik, teknik rotasi tanaman, dan pengendalian hama alami. Pelatihan dan edukasi yang diberikan juga sangat membantu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka. Namun, ada juga tantangan yang dihadapi, seperti keterbatasan modal untuk beralih ke teknologi ramah lingkungan dan kesulitan dalam memasarkan produk organik. Untuk mengatasi ini, kelompok tani sering kali membentuk koperasi atau asosiasi untuk memperkuat posisi mereka dalam mengakses pasar dan sumber daya. Selain itu, kesadaran lingkungan di kalangan petani semakin meningkat,

⁸⁷ Wawancara dengan Bapak Heri Susanto, Perangkat Desa Ngungghahan, Bandung Tulungagung, Juni-Juli 2024.

mendorong mereka untuk lebih menjaga kelestarian alam. Generasi muda juga mulai dilibatkan dalam aktivitas pertanian berkelanjutan, dengan harapan dapat menjadi penerus yang lebih peduli terhadap lingkungan. Secara keseluruhan, meskipun terdapat tantangan, respons terhadap kebijakan green economy di daerah tani sangat positif dan menjanjikan”.⁸⁸

Selanjutnya, untuk mewujudkan green economy, kelompok tani mempraktikkan kreativitas dalam pengembangan sektor pertanian.

“1. Pengairan dan irigasi, 2. Bibit tanaman, 3. Penggunaan mesin pertanian”.⁸⁹

Kreativitas dan inovasi dapat membantu kelompok tani dalam menghadapi tantangan green economy dengan cara-cara yang beragam dan efektif. Dengan demikian, kreativitas dan inovasi menjadi kunci bagi kelompok tani untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang dalam era green economy, memastikan pertanian yang lebih berkelanjutan dan sejahtera bagi generasi mendatang.

“Selama ini kekompakan para anggota kelompok tani tani mampu menciptakan pola pertanian hijau dengan mengedepankan proses pengairan dan tanaman padi yang menciptakan penghijauan lingkungan”.⁹⁰

⁸⁸ Wawancara dengan Bapak Nur Anwar, Ketua Kelompok Tani Teratai Emas Jaya, Bandung Tulungagung, Juni-Juli 2024.

⁸⁹ Wawancara dengan Bapak Nur Anwar, Ketua Kelompok Tani Teratai Emas Jaya, Bandung Tulungagung, Juni-Juli 2024.

⁹⁰ Wawancara dengan Bapak Nur Anwar, Ketua Kelompok Tani Teratai Emas Jaya, Bandung Tulungagung, Juni-Juli 2024.

Upaya strategi yang digunakan kelompok tani untuk meningkatkan kreativitas dalam sektor pertanian dilakukan melalui pembentukan jaringan dan kemitraan untuk peningkatan dan perwujudan petani kreatif.

“Kelompok tani tani membentuk jaringan serta kemitraan dengan perusahaan agribisnis untuk mendapatkan akses ke sumber daya dan pengetahuan baru”.⁹¹

Dalam konteks ini, ide-ide kreatif kelompok tani sangat diperlukan untuk menunjang perwujudan kreativitas kelompok tani dalam akselerasi pertanian.

“Tani sering mengadakan pertemuan rutin untuk saling tukar pendapat dan informasi terkait dengan dunia pertanian”.⁹²

Ide-ide kreatif kelompok tani kemudian disalurkan melalui berbagai pelatihan dan kursus yang diselenggarakan oleh pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat untuk meningkatkan kreativitas kelompok tani berbasis green economy.

“Ada, ada program Yes dalam peningkatan petani kreatif”.⁹³

Dalam praktiknya, kreativitas kelompok tani juga didukung oleh peran pemerintah daerah dengan penyelenggaraan berbagai event untuk memberikan fasilitas terhadap kelompok tani dalam mengembangkan kreativitas pertanian.

“Pemerintah daerah selama ini memberikan berbagai bantuan dan program peningkatan perekonomian petani,

⁹¹ Wawancara dengan Bapak Nur Anwar, Ketua Kelompok Tani Teratai Emas Jaya, Bandung Tulungagung, Juni-Juli 2024.

⁹² Wawancara dengan Bapak Nur Anwar, Ketua Kelompok Tani Teratai Emas Jaya, Bandung Tulungagung, Juni-Juli 2024.

⁹³ Wawancara dengan Bapak Bapak Heri Susanto, Perangkat Desa Ngungghahan, Bandung Tulungagung, Juni-Juli 2024.

termasuk bantuan yang berkaitan dengan teknologi pertanian serta seminar-seminar yang diperuntukkan untuk peningkatan petani kreatif”.⁹⁴

Selanjutnya, kelompok tani juga memerlukan adanya dukungan finansial baik dari internal maupun eksternal untuk menunjang inovasi dan kreativitas pertanian secara berkelanjutan. Hal ini untuk memfasilitasi beberapa langkah strategi yang diambil kelompok tani dalam merepresentasikan kreativitas dan inovasi di dunia pertanian.

“Kelompok tani memiliki beberapa aset yang memiliki penghasilan untuk menunjang finansial kelompok tani, selain itu tani juga memiliki kas yang diperuntukkan untuk kepentingan bersama dalam kemajuan usaha pertanian”.⁹⁵

Dalam mengimplementasikan dukungan dari masyarakat dan sektor internal maupun eksternal, kelompok tani juga menerapkan strategi kreativitas pada sektor lokal.

“Tani mengadopsi praktik pertanian berkelanjutan, seperti penggunaan pupuk organik dan teknik pengelolaan air yang efisien, untuk mengurangi dampak lingkungan”.⁹⁶

Melalui kreativitas dan inovasi kelompok tani diharapkan memiliki dampak positif terhadap keberlanjutan pertanian di daerah.

⁹⁴ Wawancara dengan Bapak Heri Susanto, Perangkat Desa Ngungghahan, Bandung Tulungagung, Juni-Juli 2024.

⁹⁵ Wawancara dengan Bapak Nur Anwar, Ketua Kelompok Tani Teratai Emas Jaya, Bandung Tulungagung, Juni-Juli 2024.

⁹⁶ Wawancara dengan Bapak Nur Anwar, Ketua Kelompok Tani Teratai Emas Jaya, Bandung Tulungagung, Juni-Juli 2024.

“Selama ini dampaknya positif, termasuk dalam hal peningkatan produktivitas secara berkelanjutan”.⁹⁷

Selanjutnya, dampak positif terhadap kreativitas dan inovasi kelompok tani perubahan signifikan dalam praktik pertanian setelah penerapan strategi peningkatan kreativitas.

“Ada, perubahannya kelompok tani semakin kompak untuk menerapkan pengetahuan yang telah didapatkan terkait dengan green economy”.⁹⁸

Meskipun demikian, kreativitas dan inovasi kelompok tani mendapatkan berbagai tantangan yang berkaitan dengan akselerasi perjalanan kelompok tani dalam mengembangkan sektor pertanian.

“Selama ini tani mengalami keterbatasan akses terhadap sumber daya dan teknologi modern sering kali menjadi hambatan, karena biaya yang tinggi dan keterbatasan pengetahuan”.⁹⁹

Selanjutnya, dalam rangka mengatasi hambatan-hambatan tersebut dilakukan upaya membangun kelompok tani dari sektor internal maupun eksternal.

“Meningkatkan kekompakan dan jejaring kerjasama dengan elemen terkait”.¹⁰⁰

⁹⁷ Wawancara dengan Bapak Nur Anwar, Ketua Kelompok Tani Teratai Emas Jaya, Bandung Tulungagung, Juni-Juli 2024.

⁹⁸ Wawancara dengan Bapak Nur Anwar, Ketua Kelompok Tani Teratai Emas Jaya, Bandung Tulungagung, Juni-Juli 2024.

⁹⁹ Wawancara dengan Bapak Nur Anwar, Ketua Kelompok Tani Teratai Emas Jaya, Bandung Tulungagung, Juni-Juli 2024.

¹⁰⁰ Wawancara dengan Bapak Nur Anwar, Ketua Kelompok Tani Teratai Emas Jaya, Bandung Tulungagung, Juni-Juli 2024.

Upaya evaluasi terhadap keberhasilan strategi peningkatan kreativitas dan inovasi kelompok tani diperlukan untuk menentukan arah ke berlangsung sektor pertanian di tingkat daerah.

“Terdapat pertemuan bulanan dengan anggota dan pemerintah desa untuk bersama-sama mengevaluasi dan menentulan arah kelanjutan”.¹⁰¹

Langkah-langkah sebagaimana di atas diperlukan untuk menentukan masa depan kelompok tani dalam konteks green economy.

“Saya berharap kelompok tani semakin mampu mengadopsi praktik-praktik pertanian berkelanjutan yang tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga melestarikan lingkungan”.¹⁰²

Strategi Peningkatan Kreativitas Kelompok Tani di Kabupaten Trenggalek dalam Menghadapi Kebijakan *Green Economy*

Kreativitas kelompok tani dalam konteks pembangunan berkelanjutan merupakan interpretasi dari representasi kebijakan berkelanjutan di sektor pertanian. Hal ini sebagai bentuk upaya memantik kelompok tani untuk menuju kreativitas dan inovasi pertanian. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, diperlukan pendekatan yang holistik dan kolaboratif, melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, lembaga swadaya

¹⁰¹ Wawancara dengan Bapak Nur Anwar, Ketua Kelompok Tani Teratai Emas Jaya, Bandung Tulungagung, Juni-Juli 2024.

¹⁰² Wawancara dengan Bapak Nur Anwar, Ketua Kelompok Tani Teratai Emas Jaya, Bandung Tulungagung, Juni-Juli 2024.

masyarakat, akademisi, dan sektor swasta. Dengan adanya sinergi antara pihak-pihak terkait, kelompok tani dapat lebih mudah mengakses pengetahuan, teknologi, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas serta menjaga kelestarian lingkungan. Selain itu, dukungan berupa pelatihan, pendampingan, dan pembiayaan juga sangat penting untuk memperkuat kapasitas kelompok tani dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada di sektor pertanian berkelanjutan.

Kreativitas dalam dunia pertanian juga dituntut untuk mengimplementasikan green economy demi terwujudnya keseimbangan ekosistem lingkungan. Kreativitas petani berbasis green economy merupakan langkah strategis untuk menyeimbangkan antara ekonomi dan lingkungan melalui sektor pertanian. Oleh karena itu, green economy dipahami sebagai langkah strategis perwujudan ekonomi hijau.

“Yang saya pahami tentang green economy merupakan menjalankan roda perekonomian dengan menjaga keseimbangan lingkungan berbasis penghijauan. Tujuan green economy adalah untuk mewujudkan keseimbangan lingkungan dan penghasilan ekonomi”¹⁰³.

Kebijakan dan program green economy memiliki relevansi terhadap pertumbuhan pertanian dan peningkatan kesehatan masyarakat melalui ekosistem yang hijau. Dalam konteks ini relevansi green economy menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kesehatan lingkungan.

¹⁰³ Wawancara dengan Bapak Marwiji, Ketua Kelompok Tani Margo Rahayu II, Kampak Trenggalek, Juni-Juli 2024.

“Tentu sangat relevan, hal ini karena pelaksanaan pertanian di daerah tani sangat memperhatikan dampak lingkungan, yaitu berkaitan dengan kesehatan masyarakat serta ekosistem kebersihan masyarakat”.¹⁰⁴

Dengan melihat relevansi green economy terhadap keseimbangan lingkungan, maka kebijakan pemerintah berkaitan dengan green economy sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

“Saya melihat kebijakan green economy yang diterapkan oleh pemerintah daerah sebagai langkah positif menuju pembangunan berkelanjutan. Kebijakan ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk mengintegrasikan aspek lingkungan ke dalam agenda pembangunan ekonomi. Dengan fokus pada efisiensi sumber daya, pengurangan emisi karbon, dan peningkatan energi terbarukan, green economy dapat menciptakan peluang baru untuk pertumbuhan ekonomi sekaligus melestarikan lingkungan”.¹⁰⁵

Selanjutnya, melalui kebijakan green economy diharapkan memiliki dampak terhadap akselerasi green economy di bidang pertanian.

“Terdapat beberapa kebijakan yang sangat berdampak positif terhadap kelompok tani tani, diantaranya adalah pelaksanaan forum-forum pembinaan dan pembelajaran bagi petani serta

¹⁰⁴ Wawancara dengan Bapak Marwiji, Ketua Kelompok Tani Margo Rahayu II, Kampak Trenggalek, Juni-Juli 2024.

¹⁰⁵ Wawancara dengan Bapak Marwiji, Ketua Kelompok Tani Margo Rahayu II, Kampak Trenggalek, Juni-Juli 2024.

hubungan finansial dalam rangka permodalan terhadap para petani”.¹⁰⁶

Kemudian, kelompok tani meresponnya dengan melaksanakan setiap program dan kebijakan pemerintah.

“Tani meresponnya dengan baik dan siap menjalankan setiap program pemerintah daerah untuk merealisasikan green economy”.¹⁰⁷

Kemudian, bukti kreativitas atau inovasi yang telah dilakukan oleh kelompok tani sebagai bukti dan program dan kebijakan pemerintah tentang kreativitas petani berbais green economy.

“Tentu saja, diantaranya adalah untuk kreativitas dan inovasi yang dilakukan oleh kelompok tani melalui penggunaan teknologi pertanian”.¹⁰⁸

Dalam pelaksanaannya, kreativitas dan inovasi kelompok tani memiliki relevansi terhadap perwujudan green economy sebagai langkah menciptakan keseimbangan ekosistem lingkungan.

“Sebagai praktiknya meskipun kelompok tani sering menggunakan teknologi pertanian, namun aspek keramahan lingkungan untuk mewujudkan ekosistem seimbang di lingkungan

¹⁰⁶ Wawancara dengan Bapak Marwiji, Ketua Kelompok Tani Margo Rahayu II, Kampak Trenggalek, Juni-Juli 2024.

¹⁰⁷ Wawancara dengan Bapak Marwiji, Ketua Kelompok Tani Margo Rahayu II, Kampak Trenggalek, Juni-Juli 2024.

¹⁰⁸ Wawancara dengan Bapak Marwiji, Ketua Kelompok Tani Margo Rahayu II, Kampak Trenggalek, Juni-Juli 2024.

tani merupakan salah satu upaya yang diwujudkan oleh teman-teman kelompok tani”.¹⁰⁹

Selanjutnya upaya dan strategi untuk meningkatkan kreativitas kelompok petani dilakukan melalui konsolidasi dan kekompakan para anggota.

“Sering mengadakan pertemuan rutin dengan anggota maupun pemerintah serta lembaga-lembaga terkait untuk mendapatkan berbagai inovasi-inovasi terbaru dalam dunia pertanian”.¹¹⁰

Kreativitas kelompok tani diaplikasikan sebagaimana ide-ide kreatif yang didapat dari berbagai forum dan seminar-seminar tentang pertanian.

“Yaa yang pasti melalui pertemuan rutin anggota dan forum-forum resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah dan lembaga terkait”.¹¹¹

Melalui pelatihan dan seminar pertanian kelompok tani memiliki pengetahuan yang kreatif.

“Ada, baik dari lembaga internal maupun eksternal serta pemerintah”.¹¹²

Selanjutnya, kreativitas kelompok tani juga didukung oleh kebijakan pemerintah daerah.

¹⁰⁹ Wawancara dengan Bapak Marwiji, Ketua Kelompok Tani Margo Rahayu II, Kampak Trenggalek, Juni-Juli 2024.

¹¹⁰ Wawancara dengan Bapak Marwiji, Ketua Kelompok Tani Margo Rahayu II, Kampak Trenggalek, Juni-Juli 2024.

¹¹¹ Wawancara dengan Bapak Marwiji, Ketua Kelompok Tani Margo Rahayu II, Kampak Trenggalek, Juni-Juli 2024.

¹¹² Wawancara dengan Bapak Marwiji, Ketua Kelompok Tani Margo Rahayu II, Kampak Trenggalek, Juni-Juli 2024.

“Sangat mendukung, dengan melibatkan kebijakan yang mengarah pada perwujudan petani kreatif dan inovatif”.¹¹³

Selain kebijakan pemerintah daerah, kreativitas kelompok tani juga didukung oleh finansial dari internal maupun eksternal.

“Ada, baik internal maupun eksternal serta pemerintah yang berorientasi pada pemodal pertanian”.¹¹⁴

Dalam praktiknya, kreativitas dan inovasi kelompok tani diaplikasikan melalui kebijakan green economy.

“Salah satu strategi utama adalah penerapan praktik pertanian ramah lingkungan, seperti penggunaan pupuk organik dan pestisida alami yang mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan”.¹¹⁵

Dampak terhadap kreativitas kelompok tani tersebut mempengaruhi produktivitas dan keberlanjutan di tingkat desa.

“Sangat berdampak positif terhadap keseimbangan ekosistem lingkungan”.¹¹⁶

Melalui upaya pembangunan pertanian secara berkelanjutan, perubahan signifikan terhadap praktik pertanian diterapkan melalui kebijakan green economy dan kebijakan pemerintah daerah.

¹¹³ Wawancara dengan Bapak Marwiji, Ketua Kelompok Tani Margo Rahayu II, Kampak Trenggalek, Juni-Juli 2024.

¹¹⁴ Wawancara dengan Bapak Marwiji, Ketua Kelompok Tani Margo Rahayu II, Kampak Trenggalek, Juni-Juli 2024.

¹¹⁵ Wawancara dengan Bapak Marwiji, Ketua Kelompok Tani Margo Rahayu II, Kampak Trenggalek, Juni-Juli 2024.

¹¹⁶ Wawancara dengan Bapak Marwiji, Ketua Kelompok Tani Margo Rahayu II, Kampak Trenggalek, Juni-Juli 2024.

“Ada, kelompok tani semakin meningkatkan produktivitasnya”.¹¹⁷

Meskipun demikian, akselerasi kreativitas kelompok tani tetap saja mendapatkan tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan pertanian.

“Beberaps berkaitan dengan perubahan iklim, karena di daerah tani akses pengairan terkadang sulit”.¹¹⁸

Oleh karenanya, dalam rangka menghadapi tantangan tersebut, kelompok tani melakukan strategi dalam mengatasi hambatan melalui praktik-praktik pertanian berbasis teknologi.

“Dengan meningkatkan teknologi pertanian pada pengairan dan peningkatan sumber-sumber pertanian yang ada”.¹¹⁹

Selanjutnya upaya evaluasi terhadap keberhasilan kreativitas kelompok tani dilakukan melalui evaluasi terhadap penerapan kebijakan.

“Tani mengevaluasinya dengan penerapan kebijakan di lingkungan internal kelompok tani”.¹²⁰

Kelompok tani mempersiapkan diri untuk menghadapi kebijakan green economy yang lebih ketat di masa depan dengan berbagai cara. Mereka mulai beralih ke praktik pertanian berkelanjutan yang lebih ramah lingkungan, seperti penggunaan

¹¹⁷ Wawancara dengan Bapak Marwiji, Ketua Kelompok Tani Margo Rahayu II, Kampak Trenggalek, Juni-Juli 2024.

¹¹⁸ Wawancara dengan Bapak Marwiji, Ketua Kelompok Tani Margo Rahayu II, Kampak Trenggalek, Juni-Juli 2024.

¹¹⁹ Wawancara dengan Bapak Marwiji, Ketua Kelompok Tani Margo Rahayu II, Kampak Trenggalek, Juni-Juli 2024.

¹²⁰ Wawancara dengan Bapak Marwiji, Ketua Kelompok Tani Margo Rahayu II, Kampak Trenggalek, Juni-Juli 2024.

pupuk organik dan pestisida alami. Selain itu, mereka juga meningkatkan efisiensi penggunaan air dan energi, serta memanfaatkan teknologi pertanian canggih untuk meningkatkan produktivitas tanpa merusak lingkungan. Edukasi dan pelatihan tentang pertanian hijau juga gencar dilakukan, sehingga para petani lebih siap menghadapi perubahan kebijakan dan tuntutan pasar yang semakin peduli terhadap isu-isu lingkungan. Dengan langkah-langkah ini, kelompok tani berharap dapat tetap berdaya saing dan berkontribusi positif terhadap keberlanjutan lingkungan hidup.

“Kelompok tani tani mengadopsi teknologi pertanian modern yang mendukung efisiensi dan keberlanjutan, seperti sistem irigasi tetes yang hemat air serta sensor tanah untuk pemantauan kondisi tanah”.¹²¹

Dengan persiapan menghadapi tantangan masa depan, kelompok tani mempersiapkan dalam menghadapi perubahan kebijakan lingkungan.

“Tetap menjaga hubungan kerjasama dengan lembaga terkait serta mempertahankan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan”.¹²²

¹²¹ Wawancara dengan Bapak Marwiji, Ketua Kelompok Tani Margo Rahayu II, Kampak Trenggalek, Juni-Juli 2024.

¹²² Wawancara dengan Bapak Marwiji, Ketua Kelompok Tani Margo Rahayu II, Kampak Trenggalek, Juni-Juli 2024.

Strategi Peningkatan Kreativitas Kelompok Tani di Kabupaten Blitar dalam Menghadapi Kebijakan *Green Economy*

Kelompok tani menjadi salah satu wadah akselerasi sektor pertanian di tingkat desa dan daerah. Posisi kelompok tani sangat strategis untuk merepresentasikan produktivitas dan inovasi dalam dunia pertanian. Kelompok tani juga menjadi sarana untuk mengimplementasikan setiap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan dunia pertanian. Oleh karenanya kelompok tani sebagai objek dan subjek yang sangat strategis untuk mengawal terwujudnya negara agraris yang ideal dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, dunia pertanian tidak bisa dilepaskan dari konsep green economy. Hal ini dikarenakan konsep green economy merupakan wujud dari pelaksanaan pertanian berbasis ekonomi yang ramah terhadap ekosistem lingkungan. Oleh karena itu, kelompok tani memiliki peran penting dalam mewujudkan aktualisasi green economy.

“Sebatas yang saya pahami, green economy merupakan ekonomi hijau yang bisa diwujudkan melalui sektor pertanian”.¹²³

Pelaksanaan green economy memiliki representasi terhadap perwujudan praktek pertanian yang ideal di tengah masyarakat. Hal ini dikarenakan praktek pertanian yang dilakukan oleh kelompok tani memiliki aspek keramahan lingkungan dan penjagaan terhadap ekosistem lingkungan tanpa memindahkan aspek ekonomi berkelanjutan.

¹²³ Wawancara dengan Bapak Asrori, Ketua Kelompok Tani Sri Lestari, Kanigoro Trenggalek, Juni-Juli 2024.

“Yang pasti hubungan antara dunia pertanian dan green economy memiliki relevansi dalam menciptakan keseimbangan ekosistem lingkungan”.¹²⁴

Selanjutnya, realisasi green economy juga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah daerah.

“Saya melihat kebijakan green economy yang diterapkan oleh pemerintah daerah sebagai langkah positif menuju pembangunan berkelanjutan. Kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan mempromosikan penggunaan sumber daya alam yang lebih efisien. Selain itu, kebijakan ini juga dapat membuka peluang ekonomi baru, menciptakan lapangan kerja hijau, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, keberhasilan kebijakan ini sangat tergantung pada partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta dan masyarakat, serta konsistensi dan efektivitas dalam pelaksanaannya”.¹²⁵

Hal ini bisa di lihat pada kebijakan-kebijakan sebagai berikut:

“Subsidi untuk Pertanian Berkelanjutan: Pemerintah menyediakan subsidi untuk penggunaan pupuk organik dan pestisida alami. Ini membantu kelompok tani mengurangi ketergantungan pada bahan kimia yang merusak lingkungan dan meningkatkan kesehatan tanah”.¹²⁶

¹²⁴ Wawancara dengan Bapak Asrori, Ketua Kelompok Tani Sri Lestari, Kanigoro Trenggalek, Juni-Juli 2024.

¹²⁵ Wawancara dengan Bapak Asrori, Ketua Kelompok Tani Sri Lestari, Kanigoro Trenggalek, Juni-Juli 2024.

¹²⁶ Wawancara dengan Bapak Asrori, Ketua Kelompok Tani Sri Lestari, Kanigoro Trenggalek, Juni-Juli 2024.

Melalui kebijakan di atas, kelompok tani merespon dengan beberapa langkah strategis berbasis green economy.

“Meresponnya dengan baik dengan menjalankan setiap program yang diterapkan pemerintah untuk menerapkan prinsip ekonomi hijau”.¹²⁷

Beberapa contoh kreativitas atau inovasi yang telah dilakukan oleh kelompok tani adalah:

“Pembuatan pupuk organik”.¹²⁸

Selanjutnya kreativitas dan ekonomi kelompok tani dapat menciptakan pola pertanian berbasis green economy.

“Kreativitas yang tani lakukan mampu menumbuhkan pertanian yang ramah lingkungan”.¹²⁹

Selanjutnya strategi yang digunakan kelompok planet untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam dunia pertanian direalisasikan melalui diversifikasi produk dalam pengembangan varietas tanaman, seperti tembakau.

“Kelompok tani mencoba diversifikasi produk dengan mengembangkan produk olahan atau mencoba varietas tanaman baru, sehingga kelompok tani dapat menemukan peluang pasar yang lebih luas dan meningkatkan nilai tambah dari hasil pertanian”.¹³⁰

¹²⁷ Wawancara dengan Bapak Asrori, Ketua Kelompok Tani Sri Lestari, Kanigoro Trenggalek, Juni-Juli 2024.

¹²⁸ Wawancara dengan Bapak Asrori, Ketua Kelompok Tani Sri Lestari, Kanigoro Trenggalek, Juni-Juli 2024.

¹²⁹ Wawancara dengan Bapak Asrori, Ketua Kelompok Tani Sri Lestari, Kanigoro Trenggalek, Juni-Juli 2024.

¹³⁰ Wawancara dengan Bapak Asrori, Ketua Kelompok Tani Sri Lestari, Kanigoro Trenggalek, Juni-Juli 2024.

Tentunya kreativitas dari inovasi kelompok tani dipengaruhi oleh berbagai ide dan kreatif yang didapat melalui berbagai kebijakan dan forum-forum pertanian.

“Tani mendapatkan ide-ide kreatif melalui pertemuan rutin anggota dan seminar yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten”.¹³¹

Ide-ide kreatif kelompok tani didapatkan melalui pelatihan dan seminar yang diselenggarakan oleh pemerintah. Forum ini tentu memiliki relevansi terhadap peningkatan kreativitas pertanian.

“Yang pasti ada”.¹³²

Berkaitan dengan peran pemerintah, pemerintah memiliki peran dalam mendukung kreativitas kelompok tani.

“Pemerintah daerah membantu menciptakan pasar yang lebih luas bagi produk pertanian melalui promosi dan pengembangan pasar lokal maupun ekspor. Regulasi dan kebijakan yang mendukung praktik pertanian berkelanjutan juga diterapkan untuk memastikan bahwa inovasi yang dilakukan oleh kelompok tani sejalan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan”.¹³³

Selain itu, kelompok tani juga mengimplementasikan kebijakan pemerintah daerah melalui kerjasama dengan organisasi

¹³¹ Wawancara dengan Bapak Asrori, Ketua Kelompok Tani Sri Lestari, Kanigoro Trenggalek, Juni-Juli 2024.

¹³² Wawancara dengan Bapak Asrori, Ketua Kelompok Tani Sri Lestari, Kanigoro Trenggalek, Juni-Juli 2024.

¹³³ Wawancara dengan Bapak Asrori, Ketua Kelompok Tani Sri Lestari, Kanigoro Trenggalek, Juni-Juli 2024.

dan lembaga lain yang memiliki fokus pada kajian-kajian tentang pertanian.

“Tani membangun hubungan dan relasi dengan lembaga-lembaga terkait untuk merumuskan upaya pengembangan pertanian di kelompok tani tani”.¹³⁴

Melalui kerjasama dan relasi dengan lembaga terkait, kelompok tani juga memiliki dukungan finansial untuk menunjang keberlangsungan aktivitas pertanian.

“Ya ada, dari dukungan modal internal maupun internal dari pabrik rokok dan pemerintah serta lembaga keuangan”.¹³⁵

Strategi kreativitas yang diterapkan oleh kelompok tani mencakup berbagai pendekatan inovatif untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang dalam sektor pertanian.

“Tani menggunakan teknik pertanian berkelanjutan, seperti penggunaan pupuk organik dan pestisida alami”.¹³⁶

Kemudian, dampak dari strategi kreativitas dan inovasi kelompok tani memiliki dampak positif terhadap eksistensi pertanian di tingkat desa.

“Sangat berdampak positif terhadap eksistensi keolompok pertanian tani”.¹³⁷

¹³⁴ Wawancara dengan Bapak Asrori, Ketua Kelompok Tani Sri Lestari, Kanigoro Trenggalek, Juni-Juli 2024.

¹³⁵ Wawancara dengan Bapak Asrori, Ketua Kelompok Tani Sri Lestari, Kanigoro Trenggalek, Juni-Juli 2024.

¹³⁶ Wawancara dengan Bapak Asrori, Ketua Kelompok Tani Sri Lestari, Kanigoro Trenggalek, Juni-Juli 2024.

¹³⁷ Wawancara dengan Bapak Asrori, Ketua Kelompok Tani Sri Lestari, Kanigoro Trenggalek, Juni-Juli 2024.

“Terdapat, tani semakin meningkatkan praktik pertanian berbasis keseimbangan lingkungan dan ekosistem”.¹³⁸

Selanjutnya, upaya evaluasi terhadap keberhasilan strategi peningkatan kreativitas dan inovasi kelompok tani diperlukan untuk menentukan arah ke berlangsung sektor pertanian di tingkat daerah. Langkah-langkah di atas diperlukan untuk menentukan masa depan kelompok tani dalam konteks green economy.

Implementasi Konsep Ekonomi Islam dalam Penguatan Kreativitas Kelompok Tani di Kabupaten Tulungagung untuk Menghadapi Kebijakan *Green Economy*

Konsep ekonomi Islam dalam penguatan kreativitas kelompok tani merupakan sandaran epistemologis untuk menentukan bahwa aktivitas pertanian di kelompok tani dilakukan melalui prinsip-prinsip ekonomi Islam. Prinsip-prinsip ekonomi Islam dijalankan melalui sebuah pemahaman bahwa pemerataan dan keadilan dalam sektor pertanian adalah aplikasi dari sebuah kebijakan di bidang pertanian. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, kelompok tani diharapkan mampu mengembangkan inovasi dan kreativitas yang berkelanjutan. Hal ini meliputi distribusi sumber daya yang adil, penetapan harga yang wajar, dan pemberian dukungan finansial yang transparan dan etis. Sebagai hasilnya, para petani dapat meningkatkan produktivitas mereka tanpa harus mengorbankan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan bersama.

¹³⁸ Wawancara dengan Bapak Asrori, Ketua Kelompok Tani Sri Lestari, Kanigoro Trenggalek, Juni-Juli 2024.

Hal ini sebagaimana pemahaman bahwa ekonomi Islam merupakan menekankan adanya pemerataan dalam aktivitas perekonomian.

“Dalam pemahaman saya, penerapan keadilan merupakan salah satu bukti adanya aktualisasi dari ekonomi Islam. Dalam pelaksanaannya, saya menekankan pada semua anggota dan semua masyarakat petani di wilayah ini untuk membangun ekosistem pertanian yang mengedepankan tolong-menolong, saling membantu, dan menerapkan sistem pemerataan dalam fasilitasi pertanian”.¹³⁹

Dalam pelaksanaannya, prinsip ekonomi Islam diterapkan sebagai landasan setiap kegiatan kelompok tani.

“Pada kelompok tani ini, saya sebagai ketua kelompok tani selalu menekankan adanya kerjasama antar anggota pada aspek pemodalan, fasilitasi dalam perawatan tanaman pertanian, dan aspek penjualan maupun pengolahan hasil pertanian. Dengan langkah ini diharapkan para anggota tidak mengalami kebingungan ketika terbentur dengan permodalan, perawatan tanaman pertanian, dan sulitnya akses penjualan”.¹⁴⁰

Selain itu, prinsip ekonomi Islam membantu kelompok tani untuk menerapkan prinsip keseimbangan ekosistem lingkungan sebagai perwujudan dari green economy.

“Selama ini, prinsip penghijauan menjadi salah satu ciri khas kelompok tani dengan menerapkan berbagai tanaman yang menciptakan stabilitas lingkungan, artinya berbagai tanaman di

¹³⁹ Wawancara dengan Bapak Nur Anwar, Ketua Kelompok Tani Teratai Emas Jaya, Bandung Tulungagung, Juni-Juli 2024.

¹⁴⁰ Wawancara dengan Bapak Nur Anwar, Ketua Kelompok Tani Teratai Emas Jaya, Bandung Tulungagung, Juni-Juli 2024.

kelompok tani tani diorientasikan untuk menerapkan keseimbangan alam, saya kira ini yang merupakan prinsip keseimbangan alam dan penjagaan lingkungan sebagaimana diajarkan dalam prinsip ekonomi Islam, yaitu perilaku ekonomi yang tidak melakukan perusakan terhadap alam semesta”.¹⁴¹

Selain itu, ekonomi Islam juga membantu dalam meningkatkan kreativitas dan inovasi kelompok tani. Hal ini dikarenakan ekonomi Islam menjadi landasan untuk menentukan arah dan strategi pengembangan kelompok tani demi terwujudkan kemaslahatan bersama.

“Ya paling tidak, para anggota kelompok tani tani menerapkan prinsip kemandirian dan kebersamaan. Dalam hal ini kemandirian ekonomi kelompok tani merupakan bukti adanya keseriusan tani dalam penerapan ekonomi yang memfasilitasi kepentingan pribadi maupun kelompok. Melalui tukar pikiran, tani akhirnya memunculkan kreativitas dalam hal pertanian, seperti kreativitas dalam bentuk pembuatan benih tanaman, pembuatan pupuk organik, dan penentuan jenis tanaman yang sesuai dengan kelompok tani tani. Prinsip kebersamaan ini saya kira menjadi salah satu ciri khas untuk mewujudkan ekonomi yang merata antar anggota”.¹⁴²

Melalui pemaparan data di atas, dapat disimpulkan bahwa prinsip ekonomi Islam telah mampu menjadi penguat terhadap beraktivitas kelompok tani di Kabupaten Tulungagung dalam menghadapi kebijakan green economy.

¹⁴¹ Wawancara dengan Bapak Nur Anwar, Ketua Kelompok Tani Teratai Emas Jaya, Bandung Tulungagung, Juni-Juli 2024.

¹⁴² Wawancara dengan Bapak Nur Anwar, Ketua Kelompok Tani Teratai Emas Jaya, Bandung Tulungagung, Juni-Juli 2024.

Implementasi Konsep Ekonomi Islam dalam Penguatan Kreativitas Kelompok Tani di Kabupaten Trenggalek untuk Menghadapi Kebijakan *Green Economy*

Implementasi konsep ekonomi islam dalam penguatan kreativitas kelompok tani di Kabupaten Trenggalek mengarah pada sebuah langkah strategis untuk merespon isu lingkungan. Praktek ini didasarkan pada sebuah aktivitas pertanian yang merepresentasikan perlindungan terhadap lingkungan dan ekosistem alam. Harapannya, praktik ini mampu mengaktualisasikan prinsip ekonomi Islam dalam setiap aktivitas pertanian. Hal ini sebagaimana pemahaman para kelompok tani bahwa ekonomi Islam adalah nilai standart sebagai kontrol aktivitas perekonomian dalam dunia pertanian.

“Dalam pandangan saya, konsep ekonomi Islam memiliki representasi dalam menumbuhkan semangat menciptakan pola perekonomian dengan mempertimbangkan kemaslahatan bersama, yakni terwujudnya keseimbangan ekosistem alam. Dalam konteks pertanian, ekonomi Islam menjadi pijakan untuk menjalankan roda ekonomi dengan memanfaatkan kekayaan alam tanpa merusaknya”¹⁴³

Konsep ekonomi islam dalam prakteknya diterapkan melalui kegiatan dan aktivitas kelompok petani sebagai manifestasi dari perumusan setiap rencana dan rancangan aktivitas kelompok tani dalam menelurkan aktivitas pertanian.

“Penerapan prinsip ekonomi Islam di kelompok tani tani diterapkan melalui kebersamaan dalam perumusan kegiatan dan aktivitas perekonomian. Hal ini diperuntukkan untuk menjaga

¹⁴³ Wawancara dengan Bapak Marwiji, Ketua Kelompok Tani Margo Rahayu II, Kampak Trenggalek, Juni-Juli 2024.

kebersamaan dan kekompakan dalam merumuskan aktivitas perekonomian yang membawa keberhasilan secara bersama”.¹⁴⁴

Relevansi ekonomi Islam dalam aktivitas pertanian diperuntukkan untuk pembangunan perekonomian secara berkelanjutan.

“Tanggung jawab sosial mengajak kelompok tani untuk memperhatikan kesejahteraan masyarakat sekitar, termasuk memberikan dukungan kepada yang kurang mampu dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang bermanfaat bagi komunitas”.¹⁴⁵

Selain itu, penerapan ekonomi Islam dapat membantu kelompok tani menghadapi kebijakan green economy.

“Prinsip keadilan dalam ekonomi Islam memastikan distribusi sumber daya yang adil dan merata, yang dapat mendukung petani dalam mendapatkan akses yang sama terhadap teknologi dan sumber daya ramah lingkungan”.¹⁴⁶

Implementasi Konsep Ekonomi Islam dalam Penguatan Kreativitas Kelompok Tani di Kabupaten Blitar untuk Menghadapi Kebijakan *Green Economy*

Implementasi konsep ekonomi Islam dalam penguatan kreativitas kelompok tani di Kabupaten Blitar untuk menghadapi kebijakan green economy menitikberatkan pada prinsip

¹⁴⁴ Wawancara dengan Bapak Marwiji, Ketua Kelompok Tani Margo Rahayu II, Kampak Trenggalek, Juni-Juli 2024.

¹⁴⁵ Wawancara dengan Bapak Marwiji, Ketua Kelompok Tani Margo Rahayu II, Kampak Trenggalek, Juni-Juli 2024.

¹⁴⁶ Wawancara dengan Bapak Marwiji, Ketua Kelompok Tani Margo Rahayu II, Kampak Trenggalek, Juni-Juli 2024.

keberlanjutan dan keseimbangan lingkungan. Kelompok tani di Blitar mengintegrasikan nilai-nilai Islam seperti keadilan, kepedulian terhadap lingkungan, dan kebersamaan dalam setiap kegiatan pertanian. Dengan menghadapi kebijakan green economy, para petani di Blitar mulai beralih ke praktik pertanian yang lebih ramah lingkungan.

“Dalam sektor pertanian, ekonomi Islam bisa diaplikasikan melalui prinsip dasar dalam menjalankan program kelompok tani berbasis pemberdayaan masyarakat. Ini sesuai dengan prinsip ekonomi Islam dengan mengedepankan adanya pemerataan dan kesejahteraan bagi masyarakat”.¹⁴⁷

Selanjutnya, konsep ekonomi Islam diterapkan dalam kegiatan kelompok tani di tingkat desa.

“Penerapan ekonomi Islam dalam kegiatan kelompok tani diimplementasikan melalui aktivitas pertanian yang dirumuskan secara bersama-sama oleh para anggota. Harapannya semua aktivitas kelompok tani mengarah pada keadilan dan pemerataan yang implikasinya bisa dirasakan dengan kemanfaatan secara bersama”.¹⁴⁸

Prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam penerapannya memiliki relevansi dalam mewujudkan pertanian berkelanjutan.

¹⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Asrori, Ketua Kelompok Tani Sri Lestari, Kanigoro Trenggalek, Juni-Juli 2024.

¹⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Asrori, Ketua Kelompok Tani Sri Lestari, Kanigoro Trenggalek, Juni-Juli 2024.

“Prinsip keadilan dan pemerataan. Di mana prinsip ini mampu sebagai landasan untuk merumuskan kebijakan internal di lingkungan kelompok tani”.¹⁴⁹

Penerapan ekonomi Islam dalam konteks pertanian juga memiliki implikasi terhadap perwujudan perlindungan lingkungan sebagai manifestasi dari kebijakan *green economy*.

“Melalui prinsip kemanfaatan, penjagaan terhadap lingkungan bisa dilakukan melalui aktivitas pertanian yang inklusif dan ramah lingkungan. Dengan langkah ini, *green economy* mampu diwujudkan melalui perekonomian hijau”.¹⁵⁰

1. Strategi peningkatan kreativitas kelompok tani di kabupaten Tulungagung, Trenggalek, dan Blitar dalam menghadapi kebijakan *green economy*

| Kelompok Tani di Tulungagung | Kelompok Tani di Trenggalek | Kelompok Tani di Blitar |
|---|--|--|
| Menerapkan praktik pertanian dengan kreativitas pembentukan kelompok tani yang bergerak pada aktivitas pertanian inklusif. Praktek ini diaplikasikan melalui penguatan sistem pupuk dan peningkatan pengetahuan dalam pertanian padi. | Menerapkan praktik kreativitas pertanian dengan peningkatan pemahaman tentang struktur tanah dan pola pengairan irigasi yang | Menerapkan praktik kelompok tani dengan kreativitas yang dilakukan melalui kerjasama dengan badan eksternal. Dalam praktiknya, kreativitas dilakukan melalui penanaman |

¹⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Asrori, Ketua Kelompok Tani Sri Lestari, Kanigoro Trenggalek, Juni-Juli 2024.

¹⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Asrori, Ketua Kelompok Tani Sri Lestari, Kanigoro Trenggalek, Juni-Juli 2024.

| | | |
|--|-------------------|--|
| | ramah lingkungan. | tembakau yang mampu menjangkau pabrik rokok untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Praktik kreativitas penanaman tembakau juga dilakukan melalui nilai keramahan lingkungan sebagai perwujudan green economy. |
|--|-------------------|--|

2. Implementasi konsep ekonomi Islam dalam penguatan kreativitas kelompok tani di kabupaten Tulungagung, Trenggalek, dan Blitar untuk menghadapi kebijakan *green economy*

| Kelompok Tani di Tulungagung | Kelompok Tani di Trenggalek | Kelompok Tani di Blitar |
|---|---|--|
| Dalam rangka menghadapi kebijakan green economy, kelompok tani di Tulungagung mulai beralih ke praktik pertanian yang | Upaya mengadopsi prinsip-prinsip ekonomi Islam, kelompok tani di Trenggalek menyesuaikan diri dengan kebijakan green economy. | Implementasi konsep ekonomi Islam dalam penguatan kreativitas kelompok tani di Kabupaten Blitar untuk menghadapi kebijakan green economy menitikberatkan pada prinsip keberlanjutan dan keseimbangan lingkungan. |

| | | |
|--|---|---|
| <p>lebih ramah lingkungan. Kelompok tani di Tulungagung mengadopsi teknik pertanian organik yang mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya dan mendorong penggunaan pupuk alami serta pestisida nabati. Hal ini tidak hanya menjaga kesehatan tanah dan air untuk meningkatkan kualitas dan keamanan produk pertanian.</p> | <p>Kelompok tani di Trenggalek mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam secara bijaksana, meminimalkan limbah dan pencemaran melalui pengairan dan penggunaan teknologi pertanian yang ramah lingkungan, serta memastikan bahwa aktivitas pertanian tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga menjaga alam.</p> | <p>Kelompok tani di Blitar mengintegrasikan nilai-nilai Islam seperti keadilan, kepedulian terhadap lingkungan, dan kebersamaan dalam setiap kegiatan pertanian mereka.</p> |
|--|---|---|

BAGIAN IV

Kajian Ekonomi Islam Terhadap Kreativitas Kelompok Tani

Strategi Peningkatan Kreativitas Kelompok Tani di Kabupaten Tulungagung, Trenggalek, dan Blitar dalam Menghadapi Kebijakan *Green Economy*

Dalam konteks kontemporer, kebijakan *green economy* menjadi salah satu isu penting dalam pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan berkelanjutan di tengah masyarakat Indonesia.¹⁵¹ Dalam hal ini, Kabupaten Tulungagung, Trenggalek, dan Blitar merupakan salah satu daerah yang memiliki sektor pertanian yang sangat luas. Kondisi ini tentu memiliki berbagai dinamika dan tantangan untuk kemudian merealisasikan prinsip-prinsip *green economy* dalam aktivitas pertanian. Salah satunya adalah dengan meningkatkan kreativitas kelompok tani berdasarkan langkah *green economy* untuk menunjukkan keberhasilan sektor pertanian sebagai sarana untuk lahan pencaharian masyarakat serta untuk memberikan dampak pembangunan berkelanjutan di tengah masyarakat kontemporer.

Green economy sendiri merupakan konsep pembangunan yang mengedepankan kelestarian lingkungan untuk

¹⁵¹ Eleonore Loiseau, et al, "Green Economy and Related Concepts: An Overview," *Journal of Cleaner Production* 139, no. 15 (2016), <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.08.024>.

menumbuhkan pola kehidupan masyarakat yang inklusif.¹⁵² Dalam konteks pertanian, *green economy* menekankan praktik pertanian yang menggunakan teknologi hijau dengan praktik yang ramah lingkungan untuk mewujudkan kesejahteraan petani. Langkah ini untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan sekaligus meningkatkan produktivitas kualitas hidup masyarakat melalui penghasilan pertanian dan kondisi lingkungan yang mendukung kesehatan masyarakat.

Dalam konteks kelompok tani, kebijakan *green economy* menuntut adanya integrasi terhadap praktik pertanian yang ramah lingkungan dengan mengedepankan pembangunan berkelanjutan.¹⁵³ Dalam konteks ini sehingga diperlukan adanya inovasi dan adaptasi bagi kelompok tani untuk mengejawantahkan diri dalam pola dan proses pertanian yang relevan dalam rangka merespon perwujudan *green economy*. Dalam praktiknya, kelompok tani di Kabupaten Tulungagung, Trenggalek, dan Blitar melakukan identifikasi terhadap tantangan dan peluang untuk merumuskan strategi yang efektif dalam mewujudkan pertanian ramah lingkungan. Tantangan ini berkaitan dengan keterbatasan akses terhadap teknologi ramah lingkungan dan kurangnya pengetahuan tentang praktik *green economy*, serta kurangnya modal dalam konteks pertanian. Oleh karenanya, dukungan pemerintah terhadap potensi produk organik dan kemampuan

¹⁵² Ayesha Afzal, Ehsan Rasoulinezhad, & Zaki Malik, "Green Finance and Sustainable Development in Europe," *Economic Research-Ekonomska Istraživanja* 35, no. 1 (2022).

¹⁵³ Jihad Lukis Panjawa, Budi Rahardjo, & Amelia Cyntia Kusuma Wardhani, "Upaya Implementasi Sistem Pertanian Terintegrasi Bagi Kelompok Tani Desa Pogalan Kabupaten Magelang," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 3 (2023).

adaptasi petani merupakan salah satu aspek dominan dalam rangka mewujudkan pertanian berdasarkan nilai dasar green economy.¹⁵⁴

Akselerasi kreativitas petani di Jawa Timur bisa dibuktikan dengan adanya data petani milenial di provinsi Jawa Timur. Hal ini tentu menunjukkan adanya kreativitas terhadap sistem pertanian di wilayah Jawa Timur untuk menunjukkan kemajuan yang sangat signifikan.¹⁵⁵



Sumber: radio.pasuruankab.go.id

Sementara itu, kreativitas kelompok tani di Kabupaten Tulungagung, Trenggalek, dan kabupaten Blitar melakukan inovasi produk dan diversifikasi tanaman sebagai upaya untuk mendorong pengembangan produk organik dengan memiliki nilai jual tinggi untuk merespon permintaan pasar. Melalui strategi ini,

¹⁵⁴ Temuan Penelitian di Kelompok Tani Kabupaten Tulungagung, Trenggalek, dan Blitar, Juni-Juli 2024

¹⁵⁵ Admin, "Petani Milenial Jatim Terbanyak Se-Indonesia," *Radio.Pasuruankab.Go.Id*, 24 Desember, 2023, <https://radio.pasuruankab.go.id/berita/petani-milenial-jatim-terbanyak-se-indonesia>.

menanam tanaman yang bernilai tinggi dalam konteks ekonomi dengan prinsip green economy telah mengejawantahkan pada aspek untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas kelompok tani di Kabupaten Tulungagung, Trenggalek, dan Blitar. Inovasi produk organik merupakan langkah penting yang diambil oleh kelompok tani di Kabupaten Tulungagung, Trenggalek, dan Blitar dalam upaya meningkatkan nilai tambah produk pertanian di Kabupaten Tulungagung, Trenggalek, dan Blitar. Dengan mengadopsi teknik pertanian organik, petani dapat menghasilkan produk yang lebih sehat dan ramah lingkungan, yang memiliki daya tarik tinggi di pasar. Misalnya, kelompok tani di daerah Kabupaten Tulungagung, Trenggalek, dan Blitar telah berhasil mengembangkan sayuran dan buah-buahan organik yang bebas dari pestisida kimia, sehingga memenuhi standar kualitas yang diinginkan oleh konsumen yang peduli terhadap kesehatan dan lingkungan. Selain itu, sertifikasi organik yang diterima oleh produk-produk ini juga meningkatkan kepercayaan dan nilai jual di pasar lokal.¹⁵⁶

Sebagai langkah kreativitas kelompok tani di Kabupaten Tulungagung, Trenggalek, dan Blitar juga melakukan kolaborasi dan kemitraan dengan berbagai pihak untuk mengaktualisasikan prinsip pertanian berdasarkan green economy. Kelompok tani menjalin kemitraan dengan pemerintah serta lembaga terkait untuk mendukung teknis dan finansial dalam penyediaan program pertanian. Dalam hal ini kelompok tani melakukan berbagai peningkatan dalam konteks pelatihan dan bantuan sosial untuk

¹⁵⁶ Temuan Penelitian di Kelompok Tani Kabupaten Tulungagung, Trenggalek, dan Blitar, Juni-Juli 2024

mengadopsi berbagai perkembangan dalam dunia pertanian, seperti teknologi dan pengembangan produk pertanian.¹⁵⁷

Dalam prakteknya, sebagai upaya merespon kebijakan green economy, kelompok tani menggunakan teknologi pertanian dan pengembangan produk pertanian berbasis inklusivitas terhadap lingkungan. Keramahan kelompok tani terhadap eksistensi lingkungan bisa dibuktikan melalui upaya pengembangan berbagai strategi inovatif untuk meningkatkan kreativitas dan daya saing kelompok tani dalam tantangan green economy. Kelompok tani di Kabupaten Tulungagung, Trenggalek, dan gitar memiliki fokus terhadap penerapan teknologi pertanian ramah lingkungan untuk mengoptimalisasikan produksi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Teknologi seperti pemanfaatan pupuk organik, irigasi tetes, dan pengolahan limbah pertanian menjadi salah satu strategi yang solutif dalam merespon kebijakan green economy. Harapannya, penggunaan terhadap air dan pupuk kimia dapat dikurangi secara signifikan untuk mengurangi biaya produksi, dan yang paling penting adalah untuk menjaga kelestarian lingkungan.

Inovasi yang dilakukan oleh kelompok tani direalisasikan melalui diversifikasi produk pertanian. Dalam praktiknya, pengembangan produk organik yang ramah lingkungan memiliki nilai jual lebih tinggi di lingkungan pasar lokal. Dengan landasan ini, petani tidak lagi tergantung pada sebuah komoditas bahan pokok, melainkan mulai beralih untuk mengembangkan tatanan hortikultura dan produk herbal. Upaya diversifikasi ini diperuntukkan untuk meningkatkan pertahanan ekonomi

¹⁵⁷ Temuan Penelitian di Kelompok Tani Kabupaten Tulungagung, Trenggalek, dan Blitar, Juni-Juli 2024

kelompok tani dalam menghadapi perubahan pasar dan kondisi alam yang tidak menentu. Upaya lain yang dilakukan oleh kelompok tani adalah dengan mengadopsi sistem pertanian terpadu (*intergrated farming*). Upaya ini untuk mengintegrasikan berbagai elemen produksi pertanian dalam satu ekosistem yang saling mendukung satu sama lain.

Bentuk lain dari kreativitas kelompok tani di Kabupaten Tulungagung, Trenggalek, dan Blitar juga dilakukan melalui pemanfaatan teknologi pengelolaan air hujan untuk mengatasi problematika kekeringan. Teknologi seperti penampungan air hujan dan teknologi pengelolaan air sungai senter penggunaan irigasi yang ideal telah membantu mengurangi ketergantungan pada musim hujan. Langkah lain yang dilakukan oleh kelompok tani adalah dengan penggunaan pupuk organik dan pestisida nabati yang diperuntukkan untuk memperoleh dampak negatif terhadap tanah dan air, sekaligus sebagai upaya mempromosikan kesehatan lahan pertanian dalam jangka panjang.¹⁵⁸

Selain melalui langkah-langkah di atas, kelompok tani di Kabupaten Tulungagung, Trenggalek, dan Blitar juga menerapkan langkah kerja sama dengan pemerintah daerah serta lembaga swadaya masyarakat yang fokus pada aspek pertanian dan lingkungan. Kerjasama ini diperuntukkan untuk membangun kemitraan serta untuk mengakses teknologi terbaru dan pengetahuan tentang pengelolaan lahan yang lebih efisien secara berkelanjutan. Tidak hanya itu, kelompok tani juga berfokus pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui program pelatihan dan penyuluhan. Peningkatan kapasitas ini sangat

¹⁵⁸ Temuan Penelitian di Kelompok Tani Kabupaten Tulungagung, Trenggalek, dan Blitar, Juni-Juli 2024

penting agar petani mampu mengikuti perkembangan teknologi serta mengelola usaha pertanian secara lebih efektif dan profesional, sejalan dengan tuntutan green economy.

Dalam menghadapi kebijakan green economy, kelompok tani juga memperkuat jaringan dan solidaritas antar petani melalui pembentukan koperasi. Koperasi ini berfungsi sebagai wadah untuk berbagi pengetahuan, mengelola modal bersama, serta melakukan negosiasi harga yang lebih baik dengan pasar. Dengan adanya koperasi, petani memiliki daya tawar yang lebih kuat dan bisa mendapatkan akses lebih mudah terhadap program bantuan dari pemerintah. Melalui koperasi, kelompok tani juga bisa mengakses program kredit mikro yang disediakan oleh lembaga keuangan, baik pemerintah maupun swasta. Kredit mikro ini membantu petani dalam memenuhi kebutuhan modal kerja, terutama untuk pembelian alat pertanian dan pengembangan usaha olahan produk pertanian. Dengan dukungan finansial ini, petani dapat lebih mudah berinovasi dan meningkatkan produktivitas usaha mereka.

Secara keseluruhan, strategi kreativitas kelompok tani di Kabupaten Tulungagung, Trenggalek, dan Blitar menunjukkan adanya pola adaptasi dengan kebijakan green economy. Dalam prakteknya, kelompok tani di Kabupaten Tulungagung, Trenggalek, dan Blitar beralih dari praktek pertanian konvensional menuju pertanian modern berbasis penjagaan terhadap lingkungan.¹⁵⁹ Selain itu, kelompok tani di Kabupaten Tulungagung, Trenggalek, dan Blitar juga mengadopsi konsep *agroforestry* untuk menjaga keseimbangan ekosistem,

¹⁵⁹ Temuan Penelitian di Kelompok Tani Kabupaten Tulungagung, Trenggalek, dan Blitar, Juni-Juli 2024

meningkatkan produktivitas lahan, dan memperkuat ketahanan pangan lokal. Hal ini menunjukkan kesadaran dan komitmen kelompok tani terhadap prinsip-prinsip keberlanjutan yang diusung dalam kebijakan green economy.

Implementasi Konsep Ekonomi Islam dalam Penguatan Kreativitas Kelompok Tani di Kabupaten Tulungagung, Trenggalek, dan Blitar untuk Menghadapi Kebijakan *Green Economy*

Parameter adanya keberhasilan implementasi adalah adanya perwujudan dalam konteks harapan. Perwujudan nilai dasar merupakan aspek harapan dalam konteks nilai ideal untuk merealisasikan nilai fundamental. Nilai fundamental dalam ekonomi Islam merupakan nilai pokok tentang perwujudan keadilan dan pemerataan dalam aspek ekonomi.¹⁶⁰ Dalam konteks pertanian, nilai dasar ekonomi Islam pada dasarnya bisa di lihat melalui relevansi sektor pertanian dalam perwujudan kesejahteraan masyarakat, baik pada aspek ekonomi maupun kesehatan. Hal ini dikarenakan, sektor pertanian menjadi salah satu tumpuan ekonomi masyarakat serta menjadi salah satu sektor yang mempengaruhi stabilitas kesehatan masyarakat.

Sektor pertanian sendiri menjadi salah satu faktor penting dalam perwujudan stabilitas kehidupan masyarakat baik pada aspek ekonomi maupun kesehatan masyarakat. Pada mulanya, sektor pertanian merupakan salah satu usaha yang bebas, namun demikian pada situasi hari ini sektor pertanian merupakan bentuk

¹⁶⁰ Jikon Lai, "Financialised Ethics, Economic Security and the Promise of Islamic Finance," *Asian Journal of Comparative Politics* 7, no. 1 (2021).

usaha perekonomian yang memiliki dampak yang begitu kuat pada stabilitas lingkungan. Dalam perspektif Islam sendiri, sektor pertanian sejak awal dipahami sebagai bentuk kerjasama untuk mewujudkan kepentingan bersama. Islam mengajarkan tentang menjaga keseimbangan alam dan memberikan manfaat terhadap masyarakat secara luas. Dalam konteks ini, sektor pertanian dipahami sebagai salah satu upaya untuk mendukung prinsip-prinsip perwujudan kemaslahatan umum berupa terpenuhinya kebutuhan pokok dan keseimbangan lingkungan.

Eksistensi ekonomi Islam didasarkan pada pendekatan berbasis nilai-nilai keadilan, kesejahteraan sosial secara berkelanjutan.¹⁶¹ Dalam konteks pertanian, aktualisasi nilai-nilai ekonomi Islam memiliki relevansi untuk memperkuat kelompok tani di wilayah Tulungagung, Trenggalek, dan Blitar.¹⁶² Relevansi dari konsep dan nilai ekonomi Islam pada kelompok tani bisa dilihat melalui kebijakan *green economy* untuk memberikan fokus pada aktivitas pertanian yang memberikan dampak positif terhadap ekosistem lingkungan. Dalam praktiknya, inovasi dan kreativitas dalam pengolahan sumber daya alam menjadi nilai dasar ekonomi Islam untuk menunjukkan perilaku ekonomi yang ramah terhadap ekosistem lingkungan.

Green economy sendiri merupakan upaya pembangunan ekonomi berbasis kelestarian lingkungan. Konsep ini sejalan dengan konsep ekonomi Islam yang mengedepankan pemanfaatan

¹⁶¹ A. Demirguc-Kunt & O. Merrouche T. Beck, "Islamic VS Conventional Banking: Business Model, Efficiency and Stability," *Journal of Banking and Finance* 37, no. 2 (2013): 433.

¹⁶² Temuan Penelitian di Kelompok Tani Kabupaten Tulungagung, Trenggalek, dan Blitar, Juni-Juli 2024

sumber daya alam secara bijak dan tidak merusak. Konsep ini memberikan peluang dan pandangan bagi kelompok tani dalam mengimplementasikan praktik pertanian berkelanjutan. Sejalan dengan hal itu, prinsip dasar ekonomi Islam bertujuan untuk menjaga keseimbangan dan menghindarkan pada kerusakan lingkungan.

Praktik kelompok tani di Kabupaten Tulungagung, Trenggalek, dan Blitar menjadi pilar penting dalam menyokong perekonomian masyarakat. Dalam praktiknya, kelompok tani tidak hanya menitikberatkan pada produksi pangan, melainkan untuk menjaga keberlanjutan ekosistem pertanian dalam rangka menjaga kemanfaatan konsep ekonomi untuk memperkuat kebijakan green economy demi kelestarian lingkungan. Salah satu prinsip dasar ekonomi Islam adalah terwujudnya keadilan dalam distribusi sumber daya pertanian. Tantangan yang dihadapi oleh kelompok tani terhadap akses lahan, modal, dan teknologi pertanian menjadi perhatian ekonomi Islam untuk menerapkan akses keadilan terhadap sumber daya yang dibutuhkan bagi kelompok tani.

Dengan penerapan prinsip keadilan, kelompok tani diharapkan dapat memperoleh akses yang lebih adil terhadap sumber daya tersebut, sehingga dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam menjalankan usaha tani yang berkelanjutan. Dalam konsep ekonomi Islam, kreativitas ekonomi Islam merujuk pada adanya kerjasama kemitraan yang mendorong adanya kerjasama antar individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Dalam pelaksanaannya, kemitraan dan kerjasama kelompok tani dalam bentuk syirkah menjadi sarana untuk memperkuat kerjasama antar anggota kelompok tani. Hal ini akan

meningkatkan kreativitas dan inovasi kelompok tani dalam menghadapi tantangan green economy.

Dalam prinsip ekonomi Islam, kreativitas kelompok tani juga bisa dilakukan melalui skema *qardhul hasan*.¹⁶³ Pengembangan modal dan usaha menjadi skema pembiayaan pertanian sebagai solusi untuk mengatasi masalah permodalan. Melalui upaya penerapan skema ini, kelompok tani memperoleh modalnya diperlukan tanpa terbebani oleh adanya bunga yang memberatkan, sehingga kelompok tani mampu meningkatkan produktivitas dan kreativitas secara fokus dan ideal. Dalam konteks permodalan terhadap kelompok tani, dalam nilai dasar ekonomi Islam dukungan dan peran pemerintah merupakan aspek yang sangat penting untuk mendukung akses permodalan tanpa bunga. Kebijakan yang mendukung akses modal tanpa bunga, kemudahan distribusi hasil pertanian halal, serta regulasi yang mendorong praktik pertanian berkelanjutan, akan memberikan ruang bagi kelompok tani untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menghadapi tantangan green economy.

Dalam persepsi prinsip ekonomi Islam,¹⁶⁴ legitimasi pengelolaan sumber daya alam menekankan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan sumber daya pertanian. Dalam rangka menghadapi kebijakan green economy, kelompok tani di

¹⁶³ Putri Rizka Citaningati, Kamaluddin, & Ilham Dwitama Haeba, "Implementation of the Qardhul Hasan Agreement at Indonesian Islamic Financial Institutions," *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 8, no. 2 (2022).

¹⁶⁴ Nurul Syazwani Mohd Noor, Abdul Ghafar Ismail, & Muhammad Hakimi Mohd. Shafiai, "Shariah Risk: Its Origin, Definition, and Application in Islamic Finance," *SAGE Open*, 2018, <https://doi.org/10.1177/21582440187702>.

Kabupaten Tulungagung, Trenggalek, dan Blitar mengadopsi praktek pertanian yang ramah lingkungan, seperti penggunaan organik, pengelolaan pengairan secara efisien, dan penerapan teknologi pertanian yang ramah lingkungan. Konsep ekonomi Islam yang menekankan pada keberlanjutan (istidamah) dapat mendorong kelompok tani untuk terus berinovasi dalam praktik pertanian, seperti agroforestri, rotasi tanaman, dan penggunaan energi terbarukan dalam proses produksi.¹⁶⁵

Implementasi prinsip dasar ekonomi Islam dalam kreativitas kelompok tani bisa diwujudkan melalui pemasaran hasil pertanian berbasis halal.¹⁶⁶ Hal ini menjadi aspek penting dalam konsep dan nilai dasar ekonomi Islam dalam aktivitas produksi dan pengertian hasil pertanian. Dalam praktiknya, kelompok tani melakukan perluasan terhadap pasar dalam rangka mempromosikan hasil pertanian yang diproduksi secara alami dengan pedoman ramah lingkungan dan memenuhi standar kesehatan. Selain itu, implementasi nilai dasar ekonomi Islam dalam strategis pertanian juga diaplikasikan melalui pengamatan dan peran zakat bagi kelompok tani. Zakat menjadi salah satu instrumen ekonomi Islam untuk pembayaran sosial melalui dana zakat.¹⁶⁷ Zakat pertanian sendiri dapat dialokasikan untuk membantu petani miskin, meningkatkan produktivitas lahan yang kurang optimal, serta

¹⁶⁵ Temuan Penelitian di Kelompok Tani Kabupaten Tulungagung, Trenggalek, dan Blitar, Juni-Juli 2024

¹⁶⁶ Lihat dalam Sulisty Prabowo & Azmawani Abd Rahman, "Halal Certificate in the Agricultural Products Processing Industry," *Forum Penelitian Agro Ekonomi* 34, no. 1 (2016).

¹⁶⁷ Lihat dalam Hafas Furqani, Ratna Mulyany, "Zakat for Economic Empowerment of The Poor in Indonesia: Models and Implications."

mendukung program-program pelatihan yang bertujuan meningkatkan kreativitas dan inovasi kelompok tani dalam menghadapi tantangan green economy. Dalam konsep lain, ekonomi Islam juga menitikberatkan pada adanya wakaf produktif dalam dunia pertanian. Optimalisasi wakaf produktif ini dapat dioptimalkan untuk mendukung pertanian secara berkelanjutan yang kemudian bisa dimanfaatkan sebagai proses kelompok tani dalam mengembangkan dunia pertanian yang ramah lingkungan.

BAGIAN V

Penutup

Kesimpulan

Strategi peningkatan kreativitas kelompok tani di Kabupaten Tulungagung, Trenggalek, dan Blitar dalam menghadapi kebijakan green economy mencakup penerapan berbagai praktik inovatif dalam pertanian yang berkelanjutan. Kelompok tani di wilayah ini telah berhasil mengadopsi pendekatan pertanian inklusif, yang mencakup penguatan sistem pupuk organik serta peningkatan pengetahuan tentang pertanian padi. Mereka juga fokus pada pengelolaan sumber daya alam, seperti struktur tanah dan pola pengairan yang ramah lingkungan, sehingga dapat mendukung produktivitas pertanian secara berkelanjutan.

Selain itu, kerjasama dengan berbagai badan eksternal telah menjadi elemen penting dalam upaya memperkuat kreativitas kelompok tani. Salah satu contoh yang menonjol adalah penanaman tembakau yang tidak hanya meningkatkan produktivitas tetapi juga menjangkau pasar industri rokok. Inisiatif ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip green economy, di mana penanaman tembakau dilakukan dengan memperhatikan aspek keramahan lingkungan, seperti pengelolaan limbah dan penggunaan energi terbarukan. Strategi-strategi ini menunjukkan bahwa kreativitas dalam pertanian, yang dibarengi dengan penerapan teknologi ramah lingkungan, dapat menjadi solusi efektif dalam menghadapi tantangan kebijakan green economy.

Implementasi konsep ekonomi Islam dalam penguatan kreativitas kelompok tani di Kabupaten Tulungagung, Trenggalek, dan Blitar untuk menghadapi kebijakan green economy menunjukkan adanya transformasi yang signifikan dalam praktik pertanian. Kelompok tani di Tulungagung telah beralih ke teknik pertanian organik, yang mengurangi ketergantungan pada bahan kimia berbahaya dengan memanfaatkan pupuk alami dan pestisida nabati.

Hal ini tidak hanya memberikan dampak positif terhadap kualitas tanah dan air, tetapi juga meningkatkan kualitas serta keamanan produk pertanian, selaras dengan prinsip menjaga lingkungan. Sementara itu, di Kabupaten Trenggalek, kelompok tani telah mengadopsi prinsip-prinsip ekonomi Islam dengan memprioritaskan pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana. Mereka meminimalkan limbah, mengurangi pencemaran, dan menggunakan teknologi ramah lingkungan dalam sistem pengairan dan pertanian. Pendekatan ini menekankan keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan pelestarian alam, sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan keberlanjutan dalam ekonomi Islam. Melalui langkah-langkah ini, kelompok tani di kedua wilayah tersebut tidak hanya dapat mempertahankan produktivitas pertanian, tetapi juga berperan aktif dalam mendukung kebijakan green economy yang menitikberatkan pada kelestarian lingkungan dan kesejahteraan bersama.

Mengingat pentingnya kajian ekonomi berbasis green economy dalam pergulatan Kelompok tani, perlu kiranya ada upaya jangka panjang dalam menyusun rencana tindak lanjut atas program kedepan, jalan panjang membangun model semacam ini tak bisa jika hanya dilakukan oleh individu atau kelompok semata,

melainkan harus ada dukungan penuh dari khalayak umum, akademisi maupun pengampu kebijakan setempat.

Usaha menyusun program harus digali dari akar aktual kondisi yang terjadi, sajian atas buku ini semoga sedikit banyak dapat melahirkan *insight* baru bagi praktisi dan pengamat di kemudian hari.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman Ba Bakr. *Dirasat Tathbiqiyyah Haula Falsafah Al-Maqashid Fi as-Syari'ah Al-Islamiyah*. Beirut: Dar al-Fikr, 2007.
- Ackil Maulana Marwan, Muhamad Aqim Adlan, & Rosdiana Himmati. "The Role of Islamic Banking Through Green Investment in Increasing Economic Growth in Indonesia." *Journal of Business Management and Islamic Banking* 2, no. 3 (2023).
- Adiwarman A. Karim. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Admi. "Data Produksi Pertanian Pagi Kabupaten Trenggalek." *Dinas Pertanian*, 2022. <https://satudata.trenggalekkab.go.id/dataset/127/2022/data-produksi-pertanian-padi>.
- Admin. "Begini Gambaran Dan Potensi Pertanian Di Kabupaten Blitar." *Serayunusantara.Com*, 23 Mei, 2023. <https://serayunusantara.com/begini-gambaran-dan-potensi-pertanian-di-kabupaten-blitar/>.
- . "Petani Milenial Jatim Terbanyak Se-Indonesia." *Radio.Pasuruankab.Go.Id*, 24 Desember, 2023. <https://radio.pasuruankab.go.id/berita/petani-milenial-jatim-terbanyak-se-indonesia>.
- Ahmad Mifidiol Muthohar. *Analisis Preferensi Berkah Dalam Kecenderungan Pilihan Berzakat Ke Lembaga Zakat Di*

- Jalur Joglosemar*. Jogjakarta: Disertasi UIN Sunan Kalijaga, 2014.
- Akhmad Mujahidin. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Andi Tri Wahyudi. “Upaya Terhadap Permasalahan Lahan, Birokrasi, Dan Infrastruktur Yang Menghambat Masuknya Investasi.” *Www.Kompasiana.Com*, 24 Juni, 2021.
<https://www.kompasiana.com/anditriwahyudi4386/60d41f3406310e796c368402/upaya-terhadap-permasalahan-lahan-birokrasi-dan-infrastruktur-yang-menghambat-masuknya-investasi-pada-sektor-pertanian-indonesia>.
- Arif Nur'aini & Muhammad Ngizzul Muttaqin. “Istihsan Sebagai Metode Istimbath Hukum Imam Hanafi Dan Relevansinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah.” *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 30, no. 1 (2020).
- Asep Saepudin Jahar. “Marketing Islam Through Zakat Institutions in Indonesia.” *Studia Islamika: Indonesian Journal for Islamic Studies* 22, no. 3 (2015).
- Ashari. “Optimalisasi Kebijakan Kredit Program Sektor Pertanian Di Indonesia.” *Analisis Kebijakan Pertanian* 7, no. 1 (2009): 21–42.
- Asti Amelia Novita. “Environmental Governance and Climate Change Adaptation in Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik* 7, no. 1 (2021).
- Ayesha Afzal, Ehsan Rasoulinezhad, & Zaki Malik. “Green Finance and Sustainable Development in Europe.” *Economic Research-Ekonomska Istraživanja* 35, no. 1 (2022).

- Azwar Iskandar & Khaerul Aqbar. "Green Economy Indonesia Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah." *AL-MASHRAFIYAH: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah* 3, no. 2 (2019).
- Badan Ekonomi Kreatif. *Opus: Ekonomi Kreatif Outlook 2019*. Jakarta: Badan Ekonomi Kreatif, 2018.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar. "Luas Panen Dan Produksi Padi Kabupaten Blitar 2023 Angka Sementara," n.d.
<https://blitarkab.bps.go.id/pressrelease/2024/01/10/128/luas-panen-dan-produksi-padi-kabupaten-blitar-2023---angka-sementara-.html>.
- Badan Statistik. "Badan Statistik Kabupaten Blitar," 2022.
<https://blitarkab.bps.go.id/publication/2022/02/25/9bb576865560d13c1e1125bb/kabupaten-blitar-dalam-angka-2022.html>.
- . "Badan Statistik Kabupaten Tulungagung," n.d.
<https://tulungagungkab.bps.go.id/statictable/2021/12/16/5307/produksi-padi-menurut-kecamatan-dan-jenis-padi-di-kabupaten-tulungagung-2020.html>.
- . "Badan Statistik Kabupaten Tulungagung," 2022.
<https://tulungagungkab.bps.go.id/statictable/2023/11/22/5673/jenis-tanah-menurut-penggunaannya-di-kabupaten-tulungagung-2022.html>.
- Bogdan, R.C & Biklen, S.K. *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods. Third Edition*. Boston: Allyn and Bacon, 1998.
- BPS Kabupaten Trenggalek. "Data Produksi Pertanian Padi," n.d.

<https://satudata.trenggalekkab.go.id/dataset/127/2022/data-produksi-pertanian-padi>.

- Carunia Mulya Firdausy. *Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2017.
- Choiriyah. “Pemikiran Ekonomi Muhammad Baqir Ash Shadr.” *Islamic Banking* 2, no. 1 (2016).
- Choirul Huda. “Ekonomi Islam Dan Kapitalisme: Merunut Benih Kapitalisme Dalam Ekonomi Islam.” *Economica* VII, no. 1 (2016): 30.
- D’Jam’an Satori. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Dahiri. “Analisis Kritis Terhadap Kinerja Sektor Pertanian Subsektor Tanaman Pangan.” *Jurnal Budget* 3, no. 2 (2020): 137–49.
- Daud A. Mustafa, Hashir A. Abdulsalam, & Jibrail B. Yusuf. “Islamic Economics and the Relevance of Al-Qawa’id Al-Fiqhiyyah.” *SAGE Open*, 2016. <https://doi.org/10.1177/21582440166713>.
- David Michael M. San Juan. “Transitioning to a Progressive Green Economy in the Philippines.” *Journal of Developing Societies* 36, no. 2 (2020).
- Dean Stroud, Peter Fairbrother, & Joanne Blake. “Skill Development in the Transition to a ‘Green Economy’: A ‘Varieties of Capitalism’ Analysis.” *The Economic and Labour Relations Review* 25, no. 1 (2014).
- Departemen Agama RI. *Al-Qur’an Tajwid Dan Terjemah*. Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2010.
- Eleonore Loiseau, et al. “Green Economy and Related Concepts: An Overview.” *Journal of Cleaner Production*

- 139, no. 15 (2016).
<https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.08.024>.
- Endro Gunawan. "Persepsi Petani Dalam Implementasi Program Kartu Tani Untuk Mendukung Distribusi Pupuk Bersubsidi." *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan* 28, no. 2 (2020).
- Ernest W. Burgess. *Research Methods in Sociology*. New York: New York Philosophical Library, 1998.
- Erry Ika Rhofita. "Optimalisasi Sumber Daya Pertanian Indonesia Untuk Mendukung Program Ketahanan Pangan Dan Energi Nasional." *Jurnal Ketahanan Nasional* 28, no. 1 (2022).
- Euis Amalia. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Asatrus, 2005.
- Guba, E., and Y. Lincoln. "Do Inquiry Paradigms Imply Inquiry Methodologies?" *Dalam Qualitative Approaches to Evaluation in Education*, Ed. D. M. Fetterman. New York: Praeger, 1999.
- Hafas Furqani, Ratna Mulyany, Fahmi Yunus. "Zakat for Economic Empowerment of The Poor in Indonesia: Models and Implications." *IQTISHADIA: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam* 11, no. 2 (2018).
- Haris Herdiansyah. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Herry A Pradana. "Peranan Sektor Ekonomi Kreatif Pada Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketenagakerjaan Di Kalimantan Selatan." *Jurnal Kebijakan Pembangunan* 13, no. 1 (2018).

- Hye-Kyung Lee. "Rethinking Creativity: Creative Industries, AI and Everyday Creativity." *Media, Culture & Society* 44, no. 3 (2022).
- I Gusti Kade Siladana & Putu Sudira. "Implementation of Creative Economy Entrepreneurial Character Development through the Culture of Sustainable Development and Vocational Stakeholders Partnership." *Jurnal Pendidikan Vokasi* 9, no. 2 (2019).
- Ian Bailey & Federico Caprotti. "The Green Economy: Functional Domains and Theoretical Directions of Enquiry." *Environment and Planning A: Economy and Space* 46, no. 8 (2014).
- Ibtihal Hidayah, Yulhendri, & Nora Susanti. "Peran Sektor Pertanian Dalam Perekonomian Negara Maju Dan Negara Berkembang: Sebuah Kajian Literatur." *Jurnal Salingka Nagari* 1, no. 1 (2022).
- Iffatin Nur, Syahrul Adam, M. Ngizzul Muttaqien. "Maqasid Al-Shari'at: The Main Reference and Ethical Spiritual Foundation for the Dynamization Process of Islamic Law." *Abkam: Jurnal Ilmu Syariah* 20, no. 2 (2020).
- Ihnji Jon. "Reassembling the Politics of 'Green' Urban Redevelopment in East Garfield Park: A Polanyian Approach." *Environment and Planning A: Economy and Space*, 2024.
<https://doi.org/10.1177/0308518X231221019>.
- Irving Seidman. *Interviewing as Qualitative Research*. New York: Teacher College Press, 2005.
- Ismi Imania Ikhsani, Feninda Eka Tasya, Ul Inati, Iradhad Taqwa Sihidi, Ali Roziqin, & Ach. Apriyanto Romadhan. "Arah Kebijakan Sektor Pertanian Di Indonesia Untuk

- Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0.” *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik* V, no. 2 (2020): 138.
- Ismi Imania Imania Ikhsani, Feninda Eka Tasya, Iradhad Taqwa Sihidi, Ali Roziqin, & Ach Apriyanto Romadhan. “Arah Kebijakan Sektor Pertanian Di Indonesia Untuk Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0.” *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik* 5, no. 2 (2020): 134–54.
- J. Howkin. *The Creative Economy*. London: Penguin Book, 2001.
- Jack. C. Richards. *Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics*. Malaysia: Longman Group, 1999.
- James P. Spradley. *Participant Observation*. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1980.
- Jihad Lukis Panjawa, Budi Rahardjo, & Amelia Cyntia Kusuma Wardhani. “Upaya Implementasi Sistem Pertanian Terintegrasi Bagi Kelompok Tani Desa Pogalan Kabupaten Magelang.” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 3 (2023).
- Jikon Lai. “Financialised Ethics, Economic Security and the Promise of Islamic Finance.” *Asian Journal of Comparative Politics* 7, no. 1 (2021).
- John W. Creswell. *Qualitative Inquiry and Research Design, 3rd Ed.* Los Angeles: SAGE, 2013.
- Jonathan Sarwono. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Juli Panglima Saragih. “Tantangan Kebijakan Pengembangan Sektor Pertanian Di Masa Datang.” *Kajian* 21, no. 2 (2016).

- Kementerian PPN/Bappenas. *Green Economy Index: A Step Forward to Measure the Progress of Low Carbon and Green Economy in Indonesia*. Jakarta: Bappenas, 2020.
- Khudzaifah Dimiyati & Kelik Wardiono. *Metode Penelitian Hukum*. Surakarta: Fakultas Hukum UMS, 2004.
- Komunikasi LCDI. “Bappenas Luncurkan Indeks Ekonomi Hijau Untuk Mendukung Transformasi Ekonomi Indonesia.” *Lcdi-Indonesia.Id*, 25 Agustus, 2022. [https://lcdi-indonesia.id/2022/08/25/bappenas-luncurkan-indeks-ekonomi-hijau-untuk-mendukung-transformasi-ekonomi-indonesia/#:~:text=Laporan Indeks Ekonomi Hijau menyebutkan%2C upaya transisi menuju,persen%2C setara USD 13.890-14.975 per kapita pada 2045.](https://lcdi-indonesia.id/2022/08/25/bappenas-luncurkan-indeks-ekonomi-hijau-untuk-mendukung-transformasi-ekonomi-indonesia/#:~:text=Laporan%20Indeks%20Ekonomi%20Hijau%20menyebutkan%20upaya%20transisi%20menuju,persen%20setara%20USD%2013.890-14.975%20per%20kapita%20pada%202045.)
- Lexy J. Meleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996.
- Linda Dale Bloomberg & Marie F. Volpe. *Completing Your Qualitative Dissertation: A Roadmap From Beginning to End*. London: SAGE, 2008.
- M. Ely, M. Anzul, T. Friedman, D. Garner & A.C. Steinmetz. *Doing Qualitative Research: Circles within Circles*. New York: Falmer Press, 1999.
- M. S. Cato. *Green Economics: An Introduction to Theory, Policy and Practice*. London: Earthscan, 2012.
- M.E. Pangestu. *Pengembangan Industri Kreatif Menuju Visi Ekonomi Kreatif Indonesia 2025*. Jakarta: Departemen Perdagangan Republik Indonesia, 2008.
- Ma'zumi. “Maqashid Syari'ah Dalam Perilaku Ekonomi.” *Journal of Islamic Economics, Finance and Banking* 3, no. 1 (2019).

- Marya Yenita Sitohang, Rahmat Saleh, & Irin Oktafiani. "Sulitnya Regenerasi Petani Pada Kelompok Generasi Muda." *Jurnal Studi Pemuda* 10, no. 1 (2021).
- Mercy Bientri Yunindanova. "Preparing for Indonesian Agricultural Transformation in The Society Era 5.0." *Agrosains: Jurnal Penelitian Agronomi* 24, no. 1 (2022).
- Muhammad. *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2007.
- Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibn Majah*. Beirut: Dar Ihya Al-Turas Al-Arabi, 2000.
- Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari. *Shahih Bukhari*. Beirut: Dar al-Hadits, 1997.
- Muhammad Ibn Muhammad Al-Ghazali. *Al-Mustasfa Min Ilm Ushul*. Mesir: Maktabah al-Jumdiyah, 2010.
- Muhammad Ibn Muhammad Al-Ghozali. *Al-Mustasyfa Min Ilmil Ushul*. Beirut: Dar al-Fikr, 1999.
- Muhammad Yafiz. "Internalisasi Maqashid Syari'ah Dalam Ekonomi Menurut M. Umer Chapra." *Abkam: Jurnal Ilmu Syariah* XV, no. I (2015).
- Mukhamad Zainul Fikri. "Potensi Pertanian Tulungagung Harus Dikenalkan, Pj Bupati Singgung Harga Beras." *Radartulungagung.Jawapos.Com*, 03 November, 2023. <https://radartulungagung.jawapos.com/tulungagung/763213058/potensi-pertanian-tulungagung-harus-dikenalkan-pj-bupati-singgung-harga-beras>.
- Mukhtar. *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta: Referensi, 2013.
- Musa Asy'ari. *Islam: Etos Kerja Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Jogjakarta: LESFI, 1997.

- Musyahid, Achmad. "Diskursus Maslahat Al-Mursalah Era Milenial: Tinjauan Filosofis Terhadap Konsep Maslahat Imam Malik." *Mazabibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019).
- N.K. Denzin and Y.S. Lincoln. *The SAGE Handbook of Qualitative Research*. Thousand Oaks, CA: SAGE, 2011.
- Niko Ramadhani. "Indonesia Sebagai Negara Agraris, Apa Itu Agraris?" *Www.Akseleran.Co.Id*, 08 Juni, 2023. [https://www.akseleran.co.id/blog/agraris-adalah/#:~:text=Sebagai salah satu negara agraris%2C peran sektor pertanian,dari masyarakat pedesaan hingga lebih dari 50 persen.](https://www.akseleran.co.id/blog/agraris-adalah/#:~:text=Sebagai%20salah%20satu%20negara%20agraris%2C%20peran%20sektor%20pertanian,dari%20masyarakat%20pedesaan%20hingga%20lebih%20dari%2050%20persen.)
- Noeng Muhadjir. *Metodologi Keilmuan: Paradigma Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 2007.
- Nova Ladiansi. "Problematika Pembangunan Ekonomi Indonesia Pada Sektor Pertanian." *Www.Kompasiana.Com*, 24 November, 2021. [https://www.kompasiana.com/nova74069/619de31906310e02a31ce502/problematika-pembangunan-ekonomi-indonesia-pada-sektor-pertanian.](https://www.kompasiana.com/nova74069/619de31906310e02a31ce502/problematika-pembangunan-ekonomi-indonesia-pada-sektor-pertanian)
- Nurul Syazwani Mohd Noor, Abdul Ghafar Ismail, & Muhammad Hakimi Mohd. Shafiai. "Shariah Risk: Its Origin, Definition, and Application in Islamic Finance." *SAGE Open*, 2018. [https://doi.org/10.1177/21582440187702.](https://doi.org/10.1177/21582440187702)
- Paul C. Cozby. *Methods in Behavior Research*, Terj. Maufur. Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Policy Brief. *Permasalahan, Tantangan Dan Kebijakan Pembangunan Pertanian 2020-2024*. Jakarta: Pusat Sosial

- Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, 2019.
- Prasetyo, R., & Saksono, R. N. A. “Pengaruh Subsidi Input Terhadap Nilai Tukar Petani Padi Di Indonesia.” *Jurnal Good Governance* 15, no. 2 (2019).
- Prayudi Prayudi, Kartika Ayu Ardhanariswari, & Ninik Probosari. “Indonesia’s Creative Economy Agency’s Communication Strategy in Supporting Creative City.” *Jurnal ASPIKOM* 7, no. 1 (2022).
- Press Release. “The World Bank Supports Indonesia’s Agriculture Sector to Become More Resilient and Inclusive.” *Www.Worldbank.Org*, 09 September, 2022. <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2022/09/09/the-world-bank-supports-indonesia-agriculture-sector-to-become-more-resilient-and-inclusive>.
- Putri Rizka Citaningati, Kamaluddin, & Ilham Dwitama Haeba. “Implementation of the Qardhul Hasan Agreement at Indonesian Islamic Financial Institutions.” *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 8, no. 2 (2022).
- Radha R. Sharma. “Green Management and Circular Economy for Sustainable Development.” *Vision: The Journal of Business Perspective* 24, no. 1 (2020).
- Robert Bogdan & Steven J Taylor. *Introduction to Qualitative Research Methods: A Phenomenological Approach to the Social Sciences*. New York: John Wiley & Sons, 2000.
- Satrio Pratomo, Khusnul Azhar & Dias Satria. “Role of Creative Economy on Local Economic Development.” *Journal of Indonesian Applied Economics* 9, no. 1 (2021).

- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Sulistyo Prabowo & Azmawani Abd Rahman. “Halal Certificate in the Agricultural Products Processing Industry.” *Forum Penelitian Agro Ekonomi* 34, no. 1 (2016).
- Sutrisno Hadi. *Metode Research*. Yogyakarta: Andi Ofset, 2000.
- . *Metodologi Penelitian Research I*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1987.
- Syahrial, Ilham Martadona, & Nurkholiza Harahap. “Development and Growth Pattern of Agricultural Sector in Economic Development.” *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian* 19, no. 3 (2023).
- T. Beck, A. Demirguc-Kunt & O. Merrouche. “Islamic VS Conventional Banking: Business Model, Efficiency and Stability.” *Journal of Banking and Finance* 37, no. 2 (2013): 433.
- Tim Editor. “Dampak Perubahan Iklim Pada Pertanian: Tantangan Dan Solusi.” *Www.Kompasiana.Com*, 14 September, 2023.
<https://www.kompasiana.com/cids0504/6500822ce1a1672ac6085b62/dampak-perubahan-iklim-pada-pertanian-tantangan-dan-solusi>.
- . “Green Economy Index Becomes Measuring Instrument for Green Economic Performance in Indonesia.” *Tempo.Co*, 15 Desember, 2022.
<https://en.tempo.co/read/1668778/green-economy-index-becomes-measuring-instrument-for-green-economic-performance-in-indonesia>.

- Trigus D. Susilo. "Potensi Komoditas Pertanian Di Trenggalek Yang Bagus Untuk Investasi." *Kabartrenggalek.Com*, 16 Januari, 2023.
<https://kabartrenggalek.com/2023/01/potensi-komoditas-pertanian-di-trenggalek-yang-bagus-untuk-investasi.html>.
- Ujang Maman. "Efektifitas Pupuk Bersubsidi Terhadap Peningkatan Produktivitas Padi Sawah." *Jurnal Agribisnis Terpadu* 14, no. 2 (2021): 176.
- Wahbah al-Zuhaili. *Al-Wajiz Fi Ushul Fiqh*. Beirut: Dar al-Fikr, 2003.
- Winarno Surakhmad. *Pengantar Penelitian Ilmiah; Dasar, Metode, Tehnik*. Bandung: Putra Aksara, 2011.
- Zul Asfi Arroyhan Daulay. "Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif Dengan Metode Triple Helix (Studi Pada UMKM Kreatif Di Kota Medan)." *Tansiq* 1, no. 2 (2018).

Biodata Penulis

Dr. H. M. Aqim Adlan, M.El., lahir di Kediri, 16 April 1974. PNS Dosen FEBI dan PASCAs UIN Sayyid Ali Rahmatullah. Saat menempuh pendidikan SMPN Kota Kediri nyambi di Madrasah Diniyyah Ponpes Lirboyo dan SMA sambil “ngalong” di Madrasah Al-Islah Bandar Kidul. Setamat SMA pada tahun 1992 langsung melanjutkan studi di IAIN Sunan Ampel kota Malang sambil mondok di Ponpes Nurul Huda Mergosono sambil sesekali ikut kegiatan PMII hingga merampungkan sarjananya di IAIN Sunan Ampel Malang pada tahun 1997. Setelah mengabdikan menjadi seorang guru di MTs dan MA Tribakti, salah satu Yayasan Pendidikan di bawah naungan Pondok Pesantren Lirboyo Kediri selama 6 tahun, pada tahun 2003 penulis melanjutkan studi S2 di IAIN Sunan Ampel Surabaya dengan mengambil konsentrasi Ekonomi Islam hingga menyelesaikan studi pada tahun 2005 dengan tetap mengabdikan menjadi guru di madrasah tersebut dan mulai tahun 2017 melanjutkan S3 pada prodi Studi Islam (SI) dan selesai pada tahun 2022 di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

Pada tahun 2006, penulis mulai mengajar di STAIN Tulungagung (sekarang UIN Tulungagung) dan pada tahun 2008 penulis diangkat menjadi CPNS melalui jalur seleksi umum dengan pangkat terakhir proses ke IV A di bulan nopember 2024. Di bulan Februari 2023 ditetapkan sebagai Kajar Ekonomi dengan membawahi 3 prodi (PS, ES dan AKS) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Tulungagung sampai sekarang. Pernah

merangkap sebagai dosen tidak tetap di Institut Agama Islam Tribakti (IAIT) Lirboyo Kediri sampai tahun 2017. Sepulang dari Malang, penulis aktif di kegiatan NU dan MUI mulai dari tingkat kecamatan dan Kota Kediri serta menjadi Sekretaris IAEI (Ikatan Ahli Ekonomi Islam) DPD Kab. Tulungagung dan di Tingkat Wilayah menjadi koordinator Devisi Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah. Saat ini penulis yang masih aktif di ISNU Kota Kediri sebagai Ketua dan pernah di juga aktif LAKPESDAM NU Kota Kediri menjadi Wakil Ketua dan Bendahara, telah dikarunai 4 anak, M. Faiz Nurullah, M. Najih Adnan, Tsaqib Ahmad Rafif dan Ahmad Fawwaz Afnan Dzaki buah pernikahan dengan Hj. Sayyidatun Ni'mah.

Artikel yang pernah di hasilkan diantaranya adalah: *Fiqh Sosial: Upaya Aktualisasi Fiqh Klasik* (Jurnal Ahkam, vol. 14 no.1 Tahun 2012 STAIN Tulungagung, ISSN 1411-271X), *Perbandingan antara Konsep dan Praktek Bayt al-Maal dengan Sistem Keuangan Negara Islam* (Jurnal Dinamika Penelitian. Vol. 13 No. 1 Tahun 2013 STAIN Tulungagung , ISSN 1412-2669), *Pengelolaan Jasa Keuangan Mikro Syariah pada Perempuan Jama'ah Yasin Tablil di Kabupaten Tulungagung/Laporan Pengabdian Masyarakat Kelompok* (Jurnal Laporan Pelaksanaan Community Outreach DIKTIS Desember 2015, ISBN 978-979-8442-53-7), *Penyelesaian Kredit Macet Perbankan dalam Pandangan Islam (Tinjauan Regulasi Kasus Kredit Macet Akibat bencana Alam)* (Jurnal An Nisbah, vol 2 no. 2 April Th 2016 FEBI IAIN Tulungagung, ISSN 2406-8276), *ANALISIS DAMPAK BRAND LOYALTY, BRAND AWARENESS, PERCEIVED QUALITY DAN BRAND ASSOCIATION TERHADAP CUSTOMER VALUE PADA MAHASISWA*

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN TULUNGAGUNG (Artikel Kelompok, Jurnal An Nisbah, vol. 04 No. 02 April 2018), PERAN PEMERINTAH DALAM MENYELAMATKAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DI ERA PANDEMI COVID-19 (Sebuah Kajian dalam Perspektif Ekonomi Islam) di Jurnal yang sama Vol 08 No. 01 April Tahun 2021, Cooperation Dilemma: Between Islamic Values and Digitalization, Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman Volume 32, Nomor 1, Januari 2021, *RELIGION AND POLITICAL ECONOMY: R20 for World Economy and Peace* di Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman – Vol 18 Tahun 2023 -Sinta 2, dll. Adapun buku serial penelitian kelompok: *Etika Berfatwa dalam Masyarakat Majemuk (Studi atas Beberapa Kasus Fatwa Majelis Ulama Indonesia Pasca Orde Baru)* (STAIN Tulungagung press 2010, ISBN: 978-602-8615-12-9) *Tinjauan Akad Murabahah Perbankan Shari'ah dalam Perspektif Hukum Islam*, (STAIN Tulungagung press 2013). Pernah mengikuti beberapa pelatihan formal dan informal, diantaranya Peningkatan Kewalitas Dosen Muda, Peningkatan Kwalitas Penelitian Dosen Madya PKPNU, MKNU, dll.

Labib Muzaki Shobir, S.Hum., M.Pd.I., lahir di Blitar, 16 April 1980. Saat menempuh Taman Pendidikan Al-Qur'an Sedayau Gresik, SD Maron Srengar Blitar MTs. Al-Hukmah Langkapan, MA Al Hikmah Langkapan. Sejak SD sambil menempuh di Madrasah Diniyyah Ponpes Darur-roja'. Selang 1 tahun melanjutkan Pendidikan S1 di UIN Sayyid Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Umaniora Jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Selama kuliah Aktif pada Unit kegiatan Mahasiswa Intra, yaitu UKM Radio Simfoni FM dan tergabung dalam persatuan radio kampus nasional, juga aktif Himpunan program Studi, serta Majelis Permusyawaratan Mahasiswa. Menyelesaikan S1 pada tahun 2004, Setelah masuk ke dua kerja pada tahun 2006 melanjutkan Pendidikan S2 di STAIN Tulungagung Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Islam Jurusan Pendidikan Islam, dan selesai 2008.

Saat ini masih proses Pendidikan S3 di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Program Studi Islam, konstrasi Sosiologi Agama, dan sedang menyelesaikan disertasi dengan tema, *Antogistic Tolerance: Relasi Muslim-Kristen di Jawa*. Bergabung dengan UIN Satu Tulungagung sejak 2015 menjadi dosen luar biasa, dan 2016 diangkat menjadi Dosen Tetap di fakultas Ekonomi dan Bisnis. Periode, 2018-2020 menjadi tim satuan pengawas internal, dan 2019-2022 menjadi sekretaris Program Doktor Studi Islam. Menikah dengan Khotimatut Thoyyibah dan dikaruniai tiga anak; Uways Aldebaron Ahmad, Raja Quthby Akmal, dan Afra Ratu Rumaisa. Karya tulis diantara; *Tasawuf Enterpreneurship: Membangun Etika Kewirausahaan Berbasis Prophetic Intelligence, Spiritualitas Dalam Perspektif Agama-Agama: Sebuah Pencarian Titik Temu* dan tulisan dengan team:

Pengaruh Penggunaan Bahan Ajar Berbasis Kontekstual Terhadap Keterampilan Pemahaman Tematik Siswa Sekolah Dasar.

KELompok TANI **GREEN** *Berebut* **GREEN** **ECONOMY**

Buku ini mengulas potensi dan tantangan sektor pertanian di Indonesia dalam menghadapi transformasi menuju ekonomi hijau. Melalui lima bagian utama, buku ini membahas strategi peningkatan kreativitas kelompok tani dalam mendukung kebijakan *Green Economy* yang dicanangkan pemerintah, serta mengintegrasikan nilai-nilai ekonomi Islam sebagai landasan pengembangan.

Penulis menggambarkan kontribusi sektor agraria dalam pertumbuhan ekonomi, menyajikan kajian kebijakan pertanian Indonesia, serta menyoroti bagaimana konsep ekonomi hijau dapat mengurangi emisi karbon dan menciptakan lapangan kerja ramah lingkungan. Buku ini juga memuat studi kasus dari tiga kabupaten, yaitu Tulungagung, Trenggalek, dan Blitar, untuk menunjukkan implementasi strategi yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

Dengan pendekatan ilmiah dan praktis, buku ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada para praktisi, pemerhati, dan akademisi untuk mendorong revitalisasi sektor pertanian melalui sinergi antara kreativitas, kebijakan publik, dan nilai-nilai keadilan dalam Islam.

Akademia Pustaka

Jl. Sumbergempol, Sumberdadi, Tulungagung

🌐 <https://akademiapustaka.com/>

✉ redaksi.akademia.pustaka@gmail.com

📧 @redaksi.akademia.pustaka

📷 @akademiapustaka

☎ 081216178398

